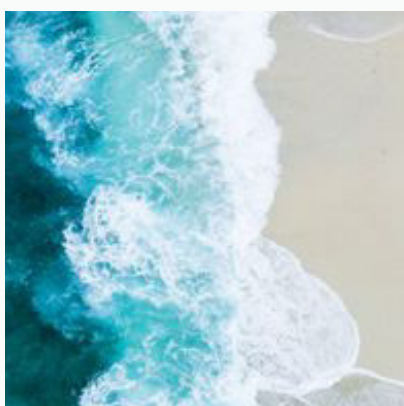


LAPORAN KINERJA

2024

BIRO KEUANGAN DAN BMN
SEKRETARIAT JENDERAL



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 Biro Keuangan dan BMN dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro Keuangan dan BMN yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kerja tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pencapaian kinerja Biro Keuangan dan BMN di tahun 2024 telah mencapai 105,13 dengan predikat “Baik”. Capaian ini sudah melampaui dari target namun masih perlu ditingkatkan di Tahun Anggaran Berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Biro Keuangan dan BMN ke depannya.



Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu serta memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Harapan atas penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi refleksi untuk peran strategis seluruh jajaran Biro Keuangan dan BMN semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Jakarta, 16 Januari 2024
Kepala Biro Keuangan dan BMN

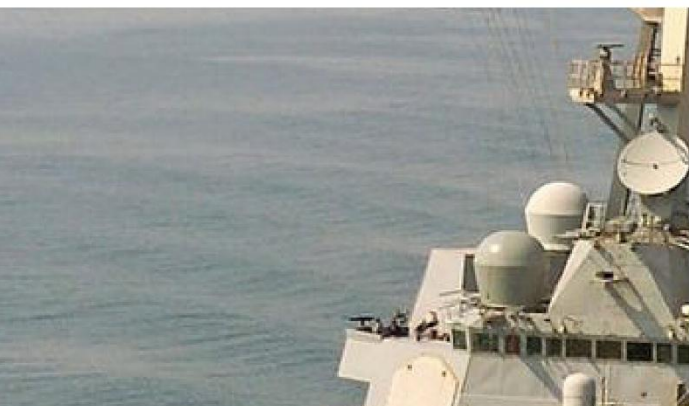


**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN
SETYAWATI, S.Sos.,M.Ak.,CFrA

RINGKASAN **EKSEKUTIF**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2024, Biro Keuangan dan BMN merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut, Biro Keuangan dan BMN telah merinci sasaran kegiatan, dimana di setiap sasaran kegiatan disertai Indikator Kinerja sebagai alat bantu untuk mengetahui pencapaian sasaran yang dimaksud. Pada Tahun 2024 ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja beserta targetnya.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 berisikan capaian Indikator Kinerja yang telah dicapai Biro Keuangan dan BMN selama TA 2024. Tahun 2024. 21 Indikator Kinerja yang telah dicapai pada sampai dengan Triwulan IV dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 105,13 dan termasuk dalam predikat “Baik” dengan 21 (dua puluh satu) rincian realisasi dan target capaian Indikator Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan WTP (5) dari target WTP (5) dengan persentase capaian 100%;
- 2) Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 85,00 dari target 74,00 dengan persentase capaian 116.04%;
- 3) Realisasi Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan 3 dari target 3 dengan persentase capaian 100%;
- 4) Realisasi Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan 3.51 dari target 3.35 dengan persentase capaian 104.78%;
- 5) Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 93.84 dari target 93,76 dengan persentase capaian 100.09%;
- 6) Realisasi Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan 3.34 dari target 3 dengan persentase capaian 111.33%;
- 7) Realisasi Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;
- 8) Realisasi Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan 75 dari target 75 dengan persentase capaian 100%;
- 9) Realisasi Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 0,09 dari target kurang dari 0,5 dengan persentase realisasi 120,00%

- 10) Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal 100,00 dari target 95,00 dengan persentase capaian 104.41%;
- 11) Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal 88.72 dari target 81 dengan persentase capaian 109.53%;
- 12) Realisasi Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal 94 dari target 82.5 dengan persentase capaian 113.94%;
- 13) Realisasi Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;
- 14) Realisasi Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Keuangan dan BMN 88.29 dari target 75 dengan persentase capaian 117.72%;
- 15) Realisasi Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100.00%;
- 16) Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN 88.59 dari target 85 dengan persentase capaian 104.22%;
- 17) Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;
- 18) Realisasi Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN 84.55 dari target 84 dengan persentase capaian 100.65%;
- 19) Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN 100 dari target 95 dengan persentase capaian 105.26%;
- 20) Realisasi Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro Keuangan dan BMN 100 dari target 94 dengan persentase capaian 106.38%;
- 21) Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%): 99.55 dari target 95 dengan persentase capaian 104.79%.

Dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang baik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan dan BMN terus berupaya untuk melaksanakan koordinasi dan pembinaan yang berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban di Bidang Keuangan dan BMN secara **Smart, Akuntabel, Integritas. Loyalitas, Sinergi** (SAILS).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi memberikan semangat baru kepada seluruh pegawai di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga sasaran dan tujuan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan maksimal.

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Sumber Daya Manusia	4
1. Organisasi Biro Keuangan dan BMN	4
2. Sumber Daya Manusia Biro Keuangan dan BMN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024	7
B. Perjanjian Kinerja	8
C. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	10
D. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024, Rencana Kerja 2024, dan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Perjanjian Kinerja	15
1. Analisis Capaian Kinerja	18
1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	18
2) Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	22
3) Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	29
4) Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	33
5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	36
6) Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	40
7) Nilai Pengelolaan PNBSP Sektor Kelautan dan Perikanan	44
8) Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan	46
9) Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023	50

10) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	54
11) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	60
12) Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal	63
13) Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	65
14) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	67
15) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN	69
16) Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN	71
17) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN	74
18) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN	76
19) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	80
20) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN	83
21) Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN	85
BAB IV PENUTUP	87
Kesimpulan Umum	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dan BMN tahun 20247

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 20248

Tabel 3 Program dan Kegiatan (dalam Rupiah)9

Tabel 4 Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai Evaluasi
Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 10

Tabel 5 Nilai Capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024..... 16

Tabel 6 Capaian kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 17

Tabel 7 Perbandingan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024 19

Tabel 8 Perbandingan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP dari Tahun 2019 -
2023..... 19

Tabel 9 Perkembangan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan KL BUN Tahun
2019-2023..... 19

Tabel 10 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 202422

Tabel 11 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan dari Tahun 2019 - 2023.22

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) Triwulan IV 2024
.....23

Tabel 13 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP29

Tabel 14 Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2023 dan 202430

Tabel 15 Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan
Perikanan dari Tahun 2019 - 202330

Tabel 16 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024 34

Tabel 17 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Aset KKP dari Tahun 2019 - 2023..34

Tabel 18 Tiga Aspek Pengukuran Nilai IKPA.....36

Tabel 19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024
.....37

Tabel 20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 202337

Tabel 21 Nilai IKPA Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	37
Tabel 22 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	40
Tabel 23 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023	40
Tabel 24 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	45
Tabel 25 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023	45
Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja nilai pengelolaan PNPB sektor kelautan dan perikanan Triwulan IV tahun 2024	45
Tabel 27 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	46
Tabel 28 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023	47
Tabel 29 Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	50
Tabel 30 Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 - 2023	50
Tabel 31 Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan Laporan Keuangan 2023 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	51
Tabel 32 Rincian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan lingkup Unit Eselon II Sekretariat Jenderal	52
Tabel 33 Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	54
Tabel 34 Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 - 2023	54
Tabel 35 Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Lingkup Unit Eselon I.....	55

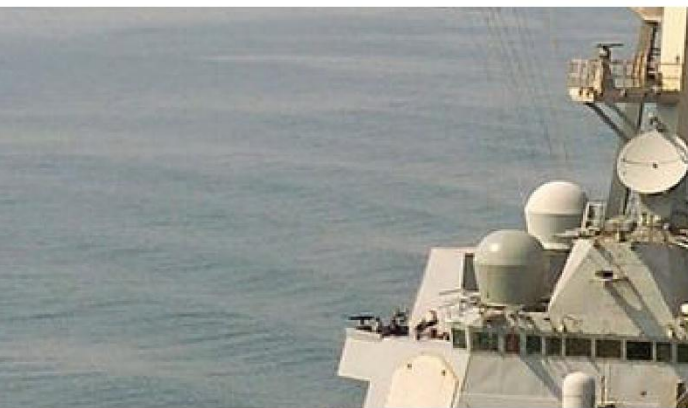
Tabel 36 Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut di Lingkup Unit Eselon II Sekretariat Jenderal.....	56
Tabel 37 Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 4288/SJ.2/HP.470/XI/2024 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Dalam Rangka Pencapaian Optimal IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Pada Triwulan IV Tahun 2024.....	56
Tabel 38 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	61
Tabel 39 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 – 2023.....	61
Tabel 40 Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	63
Tabel 41 Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 – 2023.....	63
Tabel 42 Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	66
Tabel 43 Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 – 2023.....	66
Tabel 44 Tahapan Penilaian Capaian Implementasi SBK KKP	66
Tabel 45 Perbandingan Capaian Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	68
Tabel 46 Perbandingan Capaian Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Tahun 2019 – 2023.....	68
Tabel 47 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	69
Tabel 48 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023.....	69

Tabel 49 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	72
Tabel 50 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023	72
Tabel 51 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024 ..	74
Tabel 52 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023	74
Tabel 53 Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Unit Eselon II Lingkungan Sekretariat Jenderal Triwulan IV 2024	75
Tabel 54 Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	77
Tabel 55 Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023	77
Tabel 56 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	80
Tabel 57 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023	80
Tabel 58 Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024	82
Tabel 59 Perbandingan Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	84
Tabel 60 Perbandingan Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023	84
Tabel 61 Realisasi Anggaran Biro Keuangan dan BMN per 30 Juni 2024	85
Tabel 62 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024	86

Tabel 63 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023	86
--	----

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Triwulan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Keuangan dan BMN atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas kinerja yang telah dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkaitan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas kinerja Biro Keuangan dan BMN selama Tahun Anggaran 2024 dalam rangka transparansi realisasi APBN. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 adalah, sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Keuangan dan BMN dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 2) Menjadi media publikasi capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN selama Tahun Anggaran Berjalan kepada masyarakat dan *stakeholder*.

C. Tugas dan Fungsi

Biro Keuangan dan BMN merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2024. Biro Keuangan dan BMN dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara dan memiliki 10 (sepuluh) fungsi yaitu:

- a. Koordinasi dan pengendalian kepatuhan perbendaharaan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pelaporan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi bidang keuangan;
- e. koordinasi penyusunan standar biaya keluaran, penelaahan rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pelaksanaan anggaran;
- f. koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan badan layanan umum;
- g. koordinasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta penyelesaian kerugian negara;
- h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Keuangan dan BMN dan Barang Milik Negara; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Biro Keuangan dan BMN dan Barang Milik Negara.

D. Sumber Daya Manusia

1. Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Adapun susunan organisasi Biro Keuangan dan BMN sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditampilkan sebagai berikut:

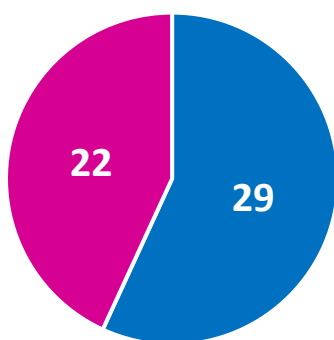
Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN



2. Sumber Daya Manusia Biro Keuangan dan BMN

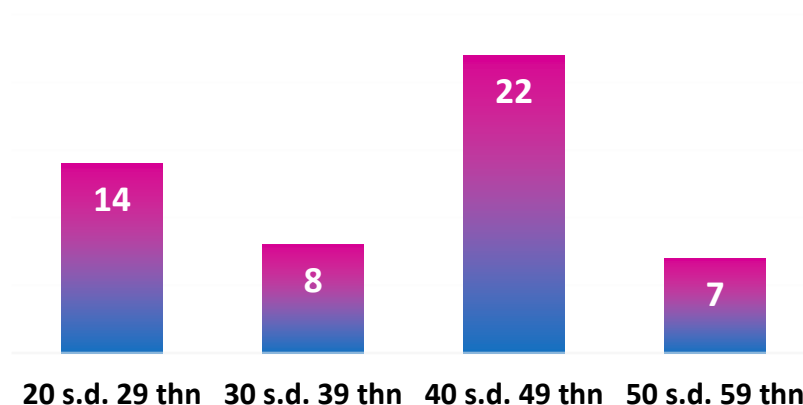
Per 31 Desember 2024, Biro Keuangan dan BMN memiliki total 51 pegawai ASN yang terdiri dari sejumlah 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin 29 orang pria dan 22 orang wanita.

Jenis Kelamin



■ Pria ■ Wanita

Usia



Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas merupakan kelebihan sekaligus kekurangan dalam sebuah Unit Organisasi. Kuantitas yang tidak terlalu banyak dapat memudahkan Pimpinan untuk melakukan koordinasi secara efisien kepada Ketua Tim Kerja maupun Pelaksana. Kemudian

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024. Hal ini bertujuan agar indikator kinerja yang digunakan selaras dengan yang tercantum dalam rencana strategis Setjen KKP Nomor 11 Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dan BMN untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dan BMN tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN

Selanjutnya dari sasaran strategi tersebut disusunlah peta strategi. Peta strategi adalah sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang tanggung jawab/ kinerja. Pada tahun 2024 dengan dukungan anggaran sebesar Rp17.546.573.000, Biro Keuangan dan BMN telah menyepakati 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja dengan Sekretaris Jenderal yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				JAN	OKT
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Opini BPK atas LK KKP (Opini)	WTP (5)	WTP (5)
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	73,25	73,25
		3	Level Maturitas SPIP KKP (Level)	3	3
		4	Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	3,35	3,35
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (Nilai)	93,76	93,76
		6	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Persen)	3	3
		7	Nilai pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100
		8	Nilai Kinerja Pembinaan Badan Layanan Umum Sektor Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	75
		9	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023 (Persen)	≤0,5	≤0,5
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Persen)	95	95
			Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	86	-
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	-	81
		12	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (Persen)	82,5	82,5
		13	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN	14	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			JAN	OKT
		15 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Keuangan (persen)	100	100
		16 Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	85	85
		17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (persen)	100	100
		18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN (nilai)	84	84
		19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN (persen)	95	95
		20 Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (persen)	94	94
		21 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (persen)	95	95

Biro Keuangan dan BMN melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut: (Tambah Tabel Sebelum Revisi)

Tabel 3 Program dan Kegiatan (dalam Rupiah)

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	9.839.930.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	7.706.643.000
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024		17.546.573.000

C. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Penentuan target Indikator Kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2023. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai pemanfaatan informasi kinerja pada tabel berikut:

Tabel 4 Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai Evaluasi Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						106,75	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN		
Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan dan BMN	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,45	3,66	106,09			Indikator Kinerja dihapus di tahun 2024 karena sudah ditarik menjadi Indikator Kinerja Biro SDMAO
Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,35	3,48	103,88	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3,35	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023
Opini BPK atas LK KKP (opini)	Opini	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	5	100	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	WTP (5)	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023
Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	Indeks	Maximize	Akumulasi	0.65	0.65	0.81	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	73,25	Penghitungan Indikator Kinerja ini mengalami perubahan komponen sehingga target nilai akhir juga berubah menjadi 73.25 di Akhir Tahun 2024
Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	100	120	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	82.5	Peningkatan target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,75	91.99	98.12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93.76	Target disusun berdasarkan Syarat Pembangunan Unit Kerja berpredikat WBK di tahun 2024
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	90.84	105.63	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	81	Target dan Nomenklatur disesuaikan dari Peraturan dan Ketentuan yang disosialisasikan oleh Kementerian Keuangan di Triwulan IV Tahun 2024
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	≤0.5	0	120	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023	≤0,5	Target disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
							(%)		
Level Maturitas SPIP KKP (level)	Level	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	3	100	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	75	99.12	120	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	95	Target disusun berdasarkan hasil validasi Indikator Kinerja tahun 2023
Nilai pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023
							Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	3	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024
							Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024
							Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan						107,50	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan dan BMN		
							Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	75	Merupakan Indikator Kinerja baru dengan adanya pembangunan Zona Integritas di Biro Keuangan dan BMN
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100	Sasaran Kinerja Indikator Kinerja ini dipindah ke SK kedua yaitu Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan dan BMN di tahun Anggaran 2023
Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	79	89.49	113.28	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	85	Target disusun berdasarkan Nota Dinas Nomor 85 Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (%)	100	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.5	85.5	106.21	Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	84	Target disusun berdasarkan Memorandum Nomor

Sasaran /Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN (persen)	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	75	100	120	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN (persen)	95	Target disusun berdasarkan Memorandum/Nota Dinas
Unit kerja Biro Keuangan dan BMN yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Persen	Maximize	Rata-rata	92	133.33	120	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	94	Target disusun berdasarkan Memorandum
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	99.36	120	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95	Target disusun berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2023

D. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 – 2024, Rencana Kerja 2024, dan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

Upaya Biro Keuangan dan BMN mencapai Indikator Kinerja selalu menerapkan keselarasan antara Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Renja KKP Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati di Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN telah mengalami perubahan pada bulan Oktober 2024. Perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah mengubah target dan nomenklatur “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal” menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Sekretariat Jenderal” dengan target semula 86 menjadi 81.

Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024	Rencana Kerja KKP Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)	Keterangan
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	Selaras dan Tercapai
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Selaras dan Tercapai
Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian	Selaras dan Tercapai

Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024	Rencana Kerja KKP Tahun 2024	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)	Keterangan
Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Kelautan dan Perikanan (Indeks)	
Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	Selaras dan Tercapai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	Selaras dan Tercapai
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	Terdapat perubahan nomenklatur dan target pada revisi PK
Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)	Selaras dan Tercapai
Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	Perbedaan nomenklatur pada Renja dan PK tidak mengubah Manual Indikator Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	Selaras dan Tercapai
Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Selaras dan Tercapai

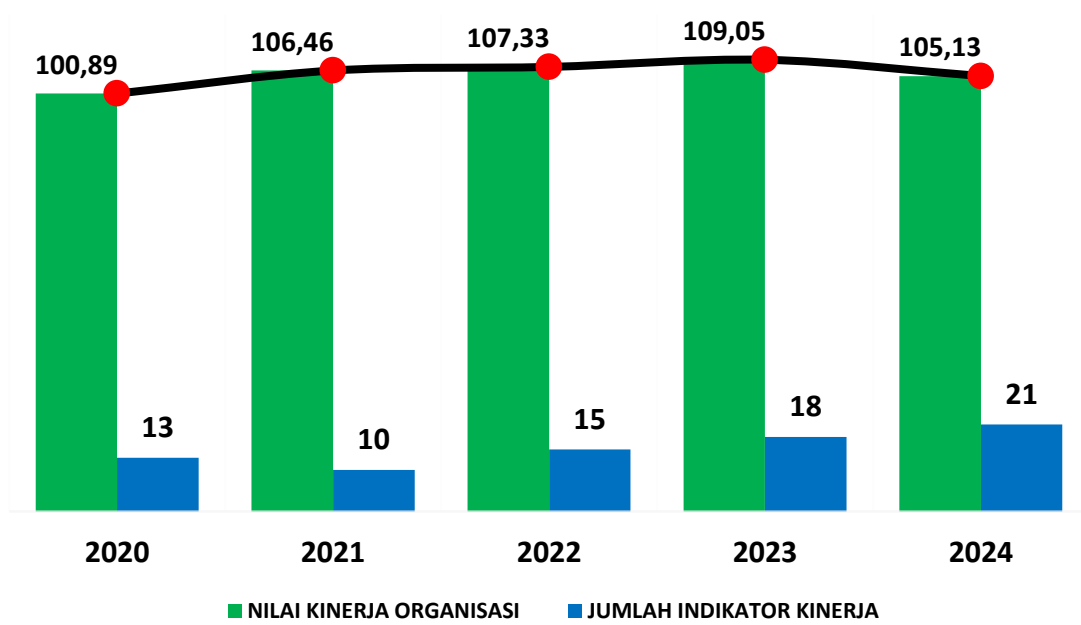
BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Capaian Perjanjian Kinerja



Gambar 2 Perbandingan NKO Tahunan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

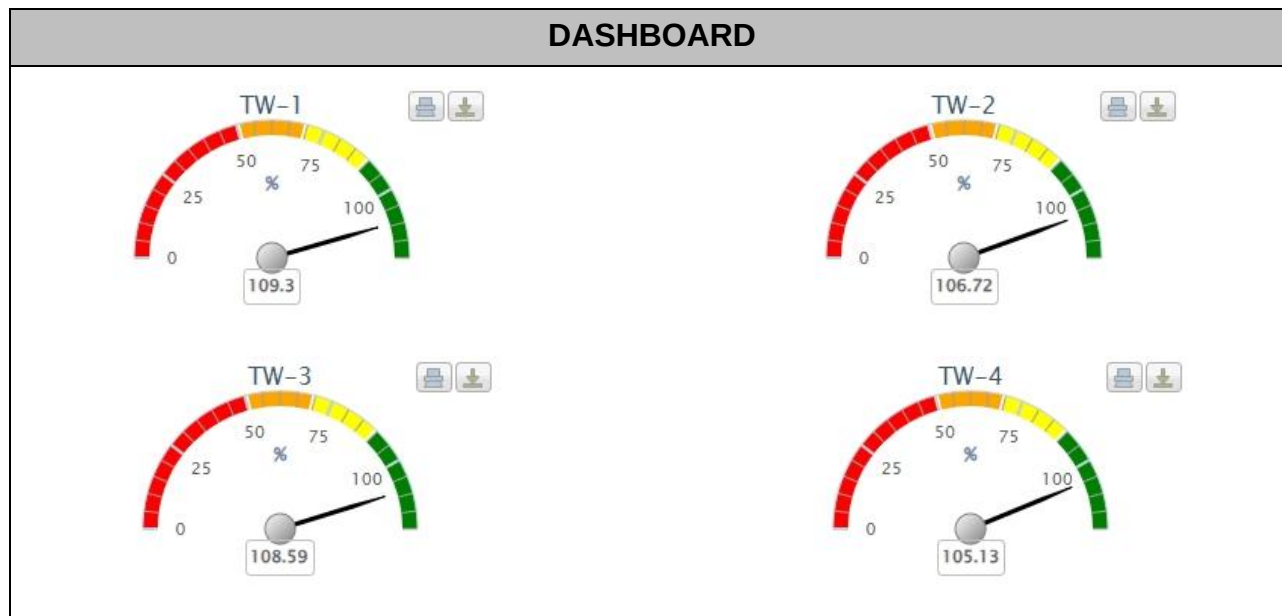
Indikator Kinerja yang capaiannya diukur secara triwulanan/semesteran/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Biro Keuangan dan BMN dilakukan secara triwulanan. NKO Biro Keuangan dan BMN di Triwulan IV Tahun 2024 adalah 105,13. Perbandingan antar capaian NKO di triwulan yang sama mengalami penurunan dari NKO Triwulan IV Tahun 2023 sedangkan dibandingkan tahun 2020 lebih tinggi 4,1 poin.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan aplikasi *web-based* di laman www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual Indikator Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan dan BMN merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Tim Kerja di lingkungan Biro Keuangan dan BMN. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja serta seluruh perjanjian kinerja di level 2 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro Keuangan dan BMN menggunakan sistem aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id*, dengan tampilan *dashboard* capaian Biro Keuangan dan BMN Triwulan IV seperti pada Tabel berikut:

Tabel 5 Nilai Capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024



Sumber: *kinerjaku.kkp.go.id*

Capaian kinerja Biro Keuangan dan BMN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Capaian kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target (Triwulan)	Capaian (Triwulan)
		IV	IV
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN			
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	5	5
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	73,25	85
3	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3	3
4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3,35	3,51
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,76	93,84
6	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	3	3,34
7	Nilai pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100
8	Nilai Kinerja Pembinaan Badan Layanan Umum Sektor Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	75
9	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (Persen)	≤0.5	0,09
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Persen)	95	100
11	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	81	88,72
12	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (Persen)	82.5	94
13	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian kelautan dan Perikanan (Persen)	100	100
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN			
14	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Nilai)	75	88,29
15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan (Persen)	100	100
16	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	85	88.59
17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (Persen)	100	100
18	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	84	84,55
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (Persen)	95	100
20	Persentase Unit Kerja Biro Keuangan dan BMN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94	100
21	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (Persen)	95	99,55

1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN

Nilai capaian sasaran kegiatan ini didukung oleh **13 (tiga belas)** Indikator Kinerja dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK) yaitu:

- 1) Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP)
- 2) WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP)
- 3) Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP)
- 4) Opini tidak wajar.
- 5) Opini tidak menyatakan pendapat (TMP)

Capaian opini atas laporan keuangan KKP dihitung secara tahunan berdasarkan perolehan Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP pada periode tahun sebelumnya, sehingga untuk target tahun 2024 merupakan opini BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dengan opini WTP (5) pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Perbandingan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP (5)	WTP (5)	WTP (5)	WTP (5)	100	WTP (5)	WTP (5)	100

Tabel 8 Perbandingan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Opini BPK merupakan Indikator Kinerja yang baru diturunkan kepada Biro Keuangan dan BMN pada Triwulan IV Tahun 2023 memperoleh Opini “WTP” dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu WTP. Capaian di tahun ini merupakan keempat kalinya Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh Opini WTP dari sebelumnya pernah mendapat Opini WDP pada Laporan Keuangan Tahun 2019 di tahun anggaran 2020.

Perkembangan opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK/L) dan KL BUN Tahun 2019-2023, Entitas Pemeriksaan pada tahun 2023 mencakup 84 K/L dan satu BUN yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9 Perkembangan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan KL BUN Tahun 2019-2023

Opini	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	85	84	82	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	2	4	1	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	-	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	87	88	83	85

Keberhasilan yang dicapai selama Penatausahaan LK dilaksanakan, Narasi Keberhasilan:

- 1) Reviu Pengelolaan Kas, berhasil menurunkan saldo:
 - a. Kas di Bendahara Pengeluaran dari sebelumnya per 31 Desember 2022 senilai Rp182.819.395,00 menjadi senilai Rp206.500,00 per 31 Desember 2023;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan dari sebelumnya per 31 Desember 2022 senilai Rp134.123.000,00 menjadi senilai Rp81.395.000,00 per 31 Desember 2023
- 2) Berkurangnya temuan BPK atas temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari sebelumnya pada Laporan Keuangan Tahun 2022 senilai Rp6.661.024.959,00 menjadi Rp5.947.823.376,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2023
- 3) Sampai dengan Semester I 2024 telah dilaksanakan Identifikasi Properti Investasi pada 9 Saker Lingkup KKP, yaitu pada BRBIH Depok, PPN Kwandang, PPS Bungus, BRPBAPP Maros, Poltek KP Bitung, BPPP Banyuwangi, BPPP Tegal, Setditjen PKRL, dan BBRBLPP Gondol. Hasil identifikasi diketahui terdapat 18 NUP BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi senilai Rp633.961.170.701,00 pada PPS Bungus dan PPN Kwandang yang harus dicatat pada Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024

Kendala yang menjadi Perhatian selama pelaksanaan LK Semester I 2024 Narasi Kendala:

- 1) Terdapat 170 Satker lingkup KKP (di luar Ditjen PSDKP) yang memiliki Aset Lancar senilai Rp1.405.196.580 dan Aset Tetap senilai Rp59.184.816.676 yang harus dilikuidasi karena perubahan kebijakan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 2) Penatausahaan piutang negara belum tertib, yaitu terdapat piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp5.457.201.393,37 belum dicatat dalam Laporan Keuangan
- 3) Terdapat aset eks Deptan perolehan sebelum tahun 2000 seluruhnya senilai Rp1.193.475.596,00 dalam kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusan dan aset yang tidak diketahui keberadaannya seluruhnya senilai Rp451.721.000,00 belum diproses penyelesaiannya.

Rekomendasi Perbaikan pelaksanaan LK Tahun 2024, Narasi Rekomendasi:

- 1) Satker Dana Dekonstrasi TA 2024 agar menyelesaikan hak dan kewajiban terkait aset dan hutang, selanjutnya dilakukan likuidasi satker dengan menyusun Laporan Keuangan Likuidasi per 30 Juni 2024.

- 2) UAPPA Eselon I agar melakukan penertiban penatausahaan Piutang Negara yang belum maupun yang sudah diserahkan kepada PUPN
- 3) UAPPA Eselon I agar melakukan penertiban pengelolaan BMN aset Eks Deptan terutama terkait penghapusan BMN Rusak Berat dan BMN yang tidak diketahui keberadaannya.

Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, Narasi Strategi

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK
- 2) Memanfaatkan menu To Do List, Monitoring, Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan
- 3) Melakukan Rekonsiliasi Eksternal Periode Juni 2024 s.d. 19 Juli 2024
- 4) Memastikan LKKL Semester I Tahun 2024 telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran
- 5) Melakukan telaah laporan keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, dan K/L
- 6) Mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi resiprokal secara memadai
- 7) Melakukan identifikasi terhadap BMN yang memenuhi Properti Investasi sebagai tindak lanjut temuan BPK dan melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi
- 8) Melakukan jurnal balik/penyesuaian awal tahun atas saldo-saldo yang relevan sesuai ketentuan penyesuaian akrual
- 9) Untuk LK Satker Dekonsentrasi lingkup Setjen, DJPT, DJPB, DJPKRL, dan DJPDSPKP, pastikan bahwa Satker-Satker tersebut sudah dilakukan likuidasi
- 10) Mengoptimalkan peran APIP dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan.

2) Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indeks Pengelolaan Keuangan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan entitas yang transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Maka pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Aspek Kualitas Pengelolaan Keuangan merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Tabel 10 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	0,81	73,25	73	82	112,32	-	82	-

Tabel 11 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	0,81

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 93/SJ.2/TU.210/II/2025 Perihal Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Triwulan IV 2024 Penghitungan aspek capaian di tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023 sehingga terdapat perbedaan target dan capaian Indikator Kinerja. Pada Triwulan IV 2024, nilai Indeks Pengelolaan Keuangan mencapai angka 85 dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 73.5.

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) Triwulan IV 2024

No	Komponen	Nilai Tercapai	Porsi IK	Capaian Indikator Kinerja Periodik
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Alokasi Belanja	4	15%	12
2	Penyelesaian Kualitas Pelaporan Keuangan	4	15%	12
3	Penyerapan Realisasi Anggaran	4	20%	16
4	Transparansi Pengelolaan Keuangan	5	15%	15
5	Kondisi Keuangan	4	15%	12
6	Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan	4,5	20%	18
Nilai Akumulasi Capaian Periodik				85

Rincian capaian angka yang diperoleh dari tabel di atas terdiri dari Dimensi indeks pengelolaan keuangan, sebagai berikut:

1) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Alokasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen perencanaan dan alokasi anggaran dengan indeks pengelolaan keuangan. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Alokasi Anggaran adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kesesuaian dokumen perencanaan dan alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan indeks pengelolaan keuangan. Selain itu, laporan ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan di masa mendatang. Berdasarkan Dokumen Penyelesaian Kualitas Laporan Keuangan pada Triwulan IV TA 2024 ini disampaikan telah diselesaikan seluruh satker yang telah menyelesaikan Mengidentifikasi kecocokan dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran, Menganalisis konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan keuangan, Mengidentifikasi tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan alokasi anggaran, Mengevaluasi konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, dan Menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan. Atas kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Alokasi Belanja terdapat kesesuaian dengan ketepatan sebesar 4. Dengan nilai $4 \times 20 \times 15\% = 12$ sehingga capaian nilai Penyelesaian sebesar 12

2) Penyelesaian Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan menjadi aspek penting dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi penyelesaian kualitas pelaporan keuangan sebagai bagian dari indeks

pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dari kajian ini akan menyoroti tingkat penyelesaian kualitas pelaporan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Dokumen Penyelesaian Kualitas Laporan Keuangan pada Triwulan I TA 2023 ini disampaikan telah diselesaikan 98% dari seluruh satker yang telah menyelesaikan to do list, monitoring dan rincian dengan penyelesaian tertinggal 6 satker TP kabupaten kota berasal dari ditjen PRL dengan nilai $4 \times 20 \times 15\% = 12$ sehingga capaian nilai Penyelesaian sebesar 12.

3) Penyerapan Realisasi Anggaran

Penyerapan realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk menilai penyerapan realisasi anggaran sebagai bagian dari indeks pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dari kajian ini akan menyoroti tingkat penyerapan realisasi anggaran serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Dokumen Penyerapan Realisasi Anggaran pada Triwulan IV TA 2023 ini disampaikan telah diselesaikan seluruh satker yang telah menyelesaikan Mengevaluasi penyerapan realisasi pendapatan dan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menganalisis kontraktual belanja barang dan modal serta daftar kontrak PHLN dan PNBP. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terdapat kesesuaian dengan ketepatan sebesar 4 dikarenakan proses realisasi di selesaikan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan nilai $4 \times 20 \times 20\% = 16$ sehingga capaian nilai Penyelesaian sebesar 16

4) Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat transparansi pengelolaan keuangan sebagai bagian dari indeks pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dari kajian ini akan menyoroti tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan dalam hal tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Proses Transparansi pada Anggaran pada Triwulan IV TA 2024 ini disampaikan telah diselesaikan seluruh satker yang telah menyelesaikan Mengevaluasi proses rekapitulasi penyampaian rekonsiliasi keuangan. Memantau proses penyampaian laporan keuangan berjenjang. Melakukan rekonsiliasi internal antara catatan keuangan internal dengan catatan eksternal. Memantau proses tutup periode dalam pengelolaan keuangan. Melakukan rekonsiliasi dengan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikelola oleh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Telah dilakukan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan nilai $5 \times 20 \times 15\% = 12$ sehingga capaian nilai Penyelesaian sebesar 15

5) Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan yang sehat dan terkelola dengan baik sangat penting dalam menjamin kelangsungan dan efektivitas operasional sebuah instansi pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan sebagai bagian dari indeks pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dari kajian ini akan menyoroti tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan dalam hal tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Proses Transparansi pada Anggaran pada Triwulan IV TA 2024 ini disampaikan telah diselesaikan seluruh satker yang telah menyelesaikan Mengevaluasi proses rekapitulasi penyampaian rekonsiliasi keuangan. Memantau proses penyampaian laporan keuangan berjenjang. Melakukan rekonsiliasi internal antara catatan keuangan internal dengan catatan eksternal. Memantau proses tutup periode dalam pengelolaan keuangan. Melakukan rekonsiliasi dengan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikelola oleh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Telah dilakukan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan nilai $4 \times 20 \times 15\% = 12$ sehingga capaian nilai Penyelesaian sebesar 12

6) Tindak Lanjut atas Pemeriksaan

Tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan merupakan aspek penting dalam menjamin akuntabilitas dan kredibilitas keuangan suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan sebagai bagian dari indeks pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Pasal 25 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Keuangan oleh BPK RI menyatakan (1) setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak 1 M, (2) setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 M. Pasal 26 UU No. 15/2004 menyatakan (1) setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 th 6 bln atau denda paling banyak 500 juta, (2) setiap org yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana penjara paling lama 1 th 6 bln atau denda paling banyak 500 juta.

Kesimpulan dari kajian ini akan menyoroti efektivitas tindak lanjut terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam hal tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu fungsi manajemen yang dapat menjamin agar perencanaan dapat diwujudkan sesuai rencana adanya pengawasan yang ketat, dan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit perlu dilakukan tindaklanjut agar tercipta perbaikan manajemen semakin baik. Penyelesaian tindaklanjut yang kunjung tidak selesai dikarenakan beberapa faktor antara lain ;

- a. Temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Audit tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan penyebabnya tidak tepat sesuai kondisi temuan yang disajikan
- b. Rekomendasi yang disajikan kejadiannya sudah berlanjut dan sulit untuk ditindaklanjuti (proses lelang sudah ditetapkan dan kontrak sudah/baru berjalan) rekomendasi untuk tender ulang/evaluasi ulang
- c. Auditi dalam menyampaikan data tindaklanjut belum/sudah lengkap tapi tidak sesuai yang diminta dalam rekomendasi Laporan Hasil Audit

- d. Petugas yang menangani penyelesaian tindaklanjutan Laporan Hasil Audit belum memahami / tidak punya pengalaman / tidak punya kompetensi sehingga penyelesaian tindaklanjutnya berlarut larut
- e. Tindaklanjut Hasil Audit beserta data pendukungnya setelah disampaikan kepada BPK RI, BPKP dan Itjen KKP tidak ada petugas yang melakukan monitoring

Berdasarkan Proses Kondisi Keuangan di lingkungan KKP pada Triwulan IV TA 2024 ini disampaikan telah diselesaikan seluruh satker yang telah Berdasarkan Proses Transparansi pada Anggaran pada Triwulan IV TA 2024 ini disampaikan telah diselesaikan seluruh satker yang telah menyelesaikan. Telah dilakukan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan nilai $4,5 \times 20 \times 15\% = 18$ sehingga capaian nilai Penyelesaian sebesar 18

Berdasarkan Usulan Biro Keuangan dan BMN, Indikator Kinerja ini tidak akan dimunculkan di tahun anggaran 2025 dikarenakan sudah termasuk di dalam komposit penghitungan Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan KKP antara lain:

- 1) Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Alokasi Anggaran, Biro Keuangan dan BMN telah menganalisis konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan;
- 2) Untuk Dimensi Penyelesaian Kualitas Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan dan BMN telah memfokuskan Tingkat penyelesaian kualitas pelaporan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Untuk Dimensi Penyerapan Realisasi Anggaran, Biro Keuangan dan BMN telah melakukan analisis terhadap kontraktual belanja barang dan modal serta daftar kontrak PHLN dan PNBPN;
- 4) Untuk Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan, Biro Keuangan dan BMN, telah memfokuskan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan dalam hal tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 5) Untuk Dimensi Kondisi Keuangan, Biro Keuangan dan BMN akan memfokuskan kondisi keuangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan KKP;
- 6) Untuk Dimensi Tindak Lanjut atas Pemeriksaan, Biro Keuangan dan BMN akan lebih fokus kepada efektivitas tindak lanjut terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam hal tersebut di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3) Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan

Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu:

- 1) Penetapan Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. Kualitas Sasaran Strategis
 - b. Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis
- 2) Struktur dan Proses, yang terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan
- 3) Pencapaian Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - b. Keandalan Pelaporan Keuangan
 - c. Pengamanan atas Aset
 - d. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Adapun Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP terpola dalam lima tingkatan sebagai berikut:

Tabel 13 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Level Maturitas		Interval Skor
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Biro Keuangan selaku pengampu indikator kinerja Level Maturitas SPIP KKP masih terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan SPIP KKP karena adanya Area of Improvement dan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi BPKP pada Tahun 2023.

Capaian Level Maturitas SPIP dinilai berdasarkan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Triwulan IV periode tahun berjalan, sehingga belum capaian pada Triwulan IV 2024 belum dapat diukur. Seluruh capaian 5 tahun terakhir Level Maturitas SPIP mencapai target yaitu Level 3. Adapun realisasi capaian dan target Level Maturitas SPIP KKP tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	3	3	3	100	3	3	100

Tabel 15 Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/SP-42/D1/02/2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Perolehan nilai Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV adalah 3 atau mendapat 100% capaian dari target tahunan dan Renstra 2024. Selama lima tahun terakhir perolehan Level Maturitas SPIP konsisten di angka 3 dengan target yang sama di level 3.

Adapun upaya yang telah dilakukan Biro Keuangan dalam mendukung keberhasilan pencapaian Level 3 Maturitas SPIP selama Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan UAPA

Telah dilakukan reviu Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendaliannya oleh Inspektorat Mitra kepada masing-masing Unit Eselon I pada akhir Bulan Juni s.d. Minggu pertama Bulan Juli Tahun 2024. Atas kondisi tersebut seluruh Unit Eselon I telah mengkoordinasikan pelaksanaan Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas (PITE) dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) pada Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3096/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Batas Waktu Penyampaian Kompilasi Hasil Penilaian Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2024.

Atas kondisi tersebut diperlukan koordinasi kepada seluruh Unit Eselon I atas pengujian atribut pengendalian dan pengujian aplikasi yang dilakukan setelah cut-off tanggal 31 Oktober 2024. Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengujian Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas (PITE) dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) secara sampling pada Unit Eselon I DJPB, BPPSDMKP, dan BPPMHKP

2) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan UAPPA-E1 Setjen

- a. Telah dilakukan reviu Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendaliannya oleh Inspektorat I pada tanggal 2 s.d. 5 Juli Tahun 2024 dan seluruh Satker dan Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal telah menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari Inspektorat I tersebut.
- b. Telah dilaksanakan rapat Identifikasi Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas (PITE) dan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) lingkup Setjen. Setelah dilakukan pemantauan, seluruh Satker dan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal seluruhnya telah melaksanakan pengujian PITE dan PUTIK.

Diperlukan koordinasi kepada seluruh Satker dan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal atas pengujian atribut pengendalian dan pengujian aplikasi yang dilakukan setelah cut-off tanggal 31 Oktober 2024.

- 1) Telah terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut area of improvement (Aoi) BPKP pada tanggal 22 Agustus 2024;
- 2) Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah disampaikan kepada BPKP pada tanggal 2 September 2024, saat ini masih

dilakukan evaluasi oleh Tim BPKP. Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “Terkelola dan Terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,455”.

Dengan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada Level 4 (Terkelola dan Terukur).

Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan IV telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan yaitu implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hambatan tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Kementerian PPN/BAPPENAS masih menyusun rancangan awal RPJMN, ASTA CITA Presiden, 17 Program Prioritas, dan 17 Program Cepat (quick win);
- b. Sebagai tindak lanjut dari poin 1, KKP masih menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis yang pada saat ini masih tahap penyusunan arah kebijakan strategi, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, kerangka kelembagaan, dan pendanaan 2025-2029 yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

Berdasarkan hasil evaluasi atas hambatan tersebut, Satgas SPIP Kementerian akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi Kepmen-KP Nomor 61 Tahun 2024 tentang pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Satgas SPIP Eselon I untuk membuat langkah-langkah dalam implementasi Kepmen KP Nomor 61 Tahun 2024 dengan kondisi Rencana Strategis Kementerian belum ditetapkan;

4) Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indeks Pengelolaan Aset adalah Hasil pengukuran indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kementerian/Lembaga sesuai indikator yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara, Indeks Pengelolaan Aset KKP dinilai dengan menjumlahkan nilai dari 8 parameter setelah dikalikan dengan bobot masing-masing parameter. 8 parameter tersebut yaitu:

- 1) Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN
- 2) Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset
- 3) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN
- 4) Asuransi BMN
- 5) Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN
- 6) Tindak lanjut BMN Rusak Berat
- 7) BMN memiliki dokumen kepemilikan
- 8) Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan

Tabel 16 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,48	3,36	3,36	3,51	104,46	-	3,51	-

Tabel 17 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Aset KKP dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	3,48

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-22/KN/KN.2/2024 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian/Lembaga Tahun 2023 realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai angka 3,51 atau 104,46% dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 3,36. Indikator Kinerja ini hanya memiliki perbandingan nilai capaian di tahun 2023 yang disebabkan Indikator Kinerja ini diusulkan menjadi Indikator Mandatory dari Kementerian Keuangan dan dijadikan syarat Indikator Kinerja Pembentuk Nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB.

Capaian Indeks Pengelolaan Aset dinilai berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan (DJKN) atas pengelolaan BMN yang penilaiannya dilakukan pada TW IV tahun berjalan. Apabila hasil tersebut belum disampaikan pada akhir TW IV, maka penilaian dapat menggunakan hasil IPA tahun sebelumnya atau penilaian mandiri oleh Biro Keuangan dan BMN berdasarkan parameter yang telah ditetapkan.

Biro Keuangan dan BMN selaku pengampu indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset KKP masih terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan BMN yang andal dengan semangat optimalisasi aset negara.

Adapun upaya yang telah dilakukan Biro Keuangan dan BMN dalam mendukung keberhasilan pencapaian IPA KKP sesuai target yang diharapkan pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut:

1. Penyerahan Laporan Keuangan Laporan Barang Milik Negara Semester I

Telah dilakukan kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara serta Monitoring dan Evaluasi Kualitas Data Keuangan Tingkat Eselon I Semester I Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Aston Kemayoran City Hotel telah disampaikan secara tepat waktu, sesuai dengan Surat Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.2402/SJ.2/TU.330/VII/2024 dan Nomor B.2403/SJ.2/TU.330/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

2. Asistensi Penyusunan RKBMN

Biro Keuangan dan BMN telah melakukan kegiatan asistensi penyusunan RKBMN di masing-masing Eselon I agar dapat menyelesaikan RKBMN sesuai dengan jadwal dalam surat Kementerian Keuangan Nomor S-70/KN/KN.2/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA -K/L) Tahun Anggaran 2026.

3. Penyampaian Form Pemantauan Pengelolaan BMN.

Dalam rangka monitoring Pengelolaan BMN, Biro Keuangan dan BMN melaksanakan rapat rekonsiliasi pengelolaan BMN yang mengundang unit Eselon I. Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan form yang perlu diisi oleh unit Eselon I untuk dapat memonitoring penyelesaian usulan pengelolaan BMN dalam rangka mencapai nilai terbaik dalam salah satu indikator.

Capaian Indeks Pengelolaan Aset dinilai berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Keuangan (DJKN) atas pengelolaan BMN yang penilaiannya dilakukan pada TW IV tahun berjalan. Apabila hasil tersebut belum disampaikan pada akhir TW IV, maka penilaian dapat menggunakan hasil IPA tahun sebelumnya atau penilaian mandiri oleh Biro Keuangan dan BMN berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Untuk TW I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena beberapa parameter belum dapat dinilai yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada nilai parameter belum terlaksana pada TW I 2024. Realisasi capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Aset KKP Triwulan IV Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I /K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 18 Tiga Aspek Pengukuran Nilai IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Nilai IKPA terdiri dari nilai IKPA Satker, nilai IKPA Unit Eselon I, dan nilai IKPA K/L.

- Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi pada Satker.
- Nilai IKPA unit eselon I merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator pada seluruh Satker dalam lingkup eselon I.
- Nilai IKPA K/L merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator pada seluruh unit eselon I dalam lingkup K/L.

- Nilai IKPA dikategorikan menjadi:
- sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
 - baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
 - cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
 - kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Tabel 19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	91,99	93,76	93,76	93,84	100,08	93,76	91,39	97,37

Tabel 20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	87	93,58	88	92,15	89	91,54	89	93,38	93,75	91.99

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025 Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 Realisasi tahun 2024 mencapai angka 93,84 atau 100,08% dari target 93,76. Tahun 2023 belum mencapai target dikarenakan terjadi perubahan kenaikan target yang diminta dari target semula 89 menjadi 93,75. Berikut tabel rincian capaian IKPA di setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.

Tabel 21 Nilai IKPA Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Unit Eselon I	Nilai IKPA
1	Inspektorat Jenderal	98,34
2	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	96,08
3	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	94,25
4	Ditjen Perikanan Tangkap	92,77
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	92,50
6	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	92,55
7	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92,13
8	Sekretariat Jenderal	92,10
9	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	91,86
Kementerian Kelautan dan Perikanan		93,84

Adapun kendala proses capaian IKPA yang disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan, sehingga terjadi deviasi pada Hal III DIPA dengan Realisasi anggaran karena adanya ketidaksinkronan antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan ikut berpengaruh juga terhadap nilai IKPA. Beberapa bagian keuangan pada masing-masing unit eselon I sudah menyampaikan Revisi Halaman III DIPA, namun bagian perencana hanya memproses revisi anggaran saja. Seharusnya antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan berkoordinasi untuk melakukan identifikasi dan mereformulasi/merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta segera merevisi Hal III DIPA agar nilainya indikator Deviasi Hal III DIPA IKPA tidak terlalu rendah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN dalam mendukung keberhasilan capaian nilai IKPA pada tahun 2024 antara lain:

- a. Menyampaikan Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA pada Aplikasi OMSPAN sehubungan dengan Kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA .2024 melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 4566/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024; dan
- b. Beberapa upaya peningkatan capaian IKPA di Triwulan IV antara lain:

- 2) Peningkatan capaian indikator Penyelesaian Tagihan

Dalam rangka peningkatan capaian indikator penyelesaian tagihan, Biro Keuangan melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data kontrak yang berakhir sampai dengan bulan berkenaan. Berdasarkan data kontrak tersebut, Unit Eselon I diharapkan menyampaikan ke Satuan Kerja di lingkupnya dan segera menyelesaikan pertanggungjawaban untuk kontrak yang telah jatuh tempo, mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk kontrak yang akan jatuh tempo, dan melakukan revisi karwas kontrak apabila terjadi addendum kontrak. Berikut beberapa dokumen upaya peningkatan indikator capaian penyelesaian tagihan:

- 3) Peningkatan capaian indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Dalam rangka peningkatan capaian indikator Pengelolaan UP dan TUP, Biro Keuangan melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas kepada seluruh Unit Eselon I dengan melampirkan data UP dan TUP Satuan Kerja yang akan berakhir di bulan berkenaan. Berdasarkan data UP dan TUP tersebut, Unit Eselon I diharapkan menyampaikan ke Satuan Kerja di lingkungannya dan segera mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) GUP dan PTUP dengan tujuan menghindari pertanggungjawaban yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Berikut beberapa dokumen yang dilaksanakan Biro Keuangan dalam upaya peningkatan capaian indikator UP dan TUP di Unit Eselon I yang dimana Nota Dinas sebanyak tiga dokumen perihal Penyampaian Batas Waktu Revolving Uang Persediaan dan Pertanggungjawaban TUP setiap bulannya.

4) Peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA

Dalam rangka peningkatan capaian indikator Deviasi Halaman III DIPA, Biro Keuangan dan BMN melakukan upaya dengan menyampaikan Nota Dinas ke seluruh Unit Eselon I dan Memorandum di lingkup Sekretariat Jenderal mengenai batas waktu pmutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) di halaman III DIPA, dan himbauan untuk merealisasikan anggaran sesuai RPD yang telah ditetapkan.

- 5) Selain itu Biro Keuangan juga melakukan upaya peningkatan capaian IKPA di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui rapat koordinasi dengan mengundang Unit Eselon I dan Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal maupun Unit Eselon I lainnya di lingkungan KKP. Rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui kendala dan mendapatkan solusi atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkup masing-masing Unit Eselon I.

6) Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indeks Pengelolaan Badan Layanan Umum (IPB) adalah satuan ukur yang ditetapkan untuk menilai kinerja pengelolaan BLU di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan hasil realisasi Penerimaan BLU, pelaksanaan perbaikan kinerja BLU melalui penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Keuangan, dan pelaporan. Penilaian IKU ini dilakukan setahun sekali dengan sistem penilaian indeks paling tinggi 4.

- 1) Persentase realisasi PNPB BLU
- 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan satker BLU.

Berdasarkan Memorandum Nomor 108/SJ.2/TU.210/II/2025 Perihal Capaian IKU Nilai Pengelolaan PNPB Sektor KP, Indeks Pengelolaan BLU KKP, dan Nilai Kinerja Pembinaan BLU Sektor KP Triwulan IV 2024 capaian Indikator Kinerja ini tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 22 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	3	3	3,34	111,33	-	-	-

Tabel 23 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja BLU-PNPB Nomor 108/SJ.2/TU.210/II/2025 Perihal Capaian IKU Nilai Pengelolaan PNPB Sektor KP, Indeks Pengelolaan BLU KKP, dan Nilai Kinerja Pembinaan BLU Sektor KP Triwulan IV 2024 Indeks Pengelolaan BLU KKP merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dengan perolehan realisasi 3,34 atau 111,33% dari target 3. Indeks Pengelolaan BLU merupakan Indikator Kinerja baru yang ditetapkan oleh Tim Kerja PNPB dan BLU. Dengan penghitungan pada penjelasan sebelumnya, capaian Indeks Pengelolaan BLU dapat mencapai target di tahun pertama Indikator Kinerja ditetapkan.

No	Parameter	Bobot
1	Presentase Realisasi PNPB BLU	40%
2	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kementerian keuangan	35%
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan BLU	25%
	Total Bobot	100%

1) Presentase Realisasi PNPB BLU

Realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp174.279.307.263,00, atau sebesar 173,88% dibandingkan dengan Target Pendapatan BLU sebesar Rp100.230.621.000,00

No	Nama Satker BLU	Pagu 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	13.941.063.000	18.549.091.873	133,05
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	6.398.900.000	5.907.372.829	92,32
3	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	27.358.090.000	15.322.808.878	56,01
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	3.552.374.000	71.502.985.814	2.012,82
5	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	7.241.100.000	9.644.752.839	133,19
6	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan (LPMUKP)	41.739.094.000	53.352.295.030	127,82
	GRAND TOTAL	100.230.621.000	174.279.307.263	173,88

Setelah dikonversi ke dalam indeks yang telah ditentukan (tabel dibawah), maka diperoleh **nilai indeks 4**, dengan kata lain melebihi target (nilai indeks 3).

NILAI INDIKATOR	INDEKS
NI 1 $\geq$ 85%	Indeks 4 (Sangat Baik)
75% $\leq$ NI 1 < 85%	Indeks 3 (Baik)
50% $\leq$ NI 1 < 75%	Indeks 2 (Cukup)
NI 1 < 50%	Indeks 1 (Buruk)

2) Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

Pada Tahun 2023 terdapat 3 BLU yang dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan keseluruhan sudah dilakukan tindak lanjut pada tahun 2024, maka persentase capaian terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Keuangan adalah 100%

No	Nama Satker	Pelaksanaan Monev	Tindak Lanjut		Persentase
			Sudah TL	Progress	
1	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	12 s.d. 15 September 2023	✓		100%
2	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	31 Oktober s.d. 3 November 2023	✓		100%
3	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	24 s.d. 26 Juli 2023	✓		100%
Rata-rata					100%

Setelah dikonversi ke dalam indeks yang telah ditentukan (tabel dibawah), maka diperoleh **nilai indeks 3**, dengan kata lain melebihi target (nilai indeks 3).

Nilai Indikator	Indeks
NI 2 $\geq$ 85%	Indeks 4 (Sangat Baik)
75% $\leq$ NI 2 < 85%	Indeks 3 (Baik)
50% $\leq$ NI 2 < 75%	Indeks 2 (Cukup)
NI 2 < 50%	Indeks 1 (Buruk)

3) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BLU

- a. Laporan Implementasi Tarif TA 2023 disampaikan oleh satker BLU kepada PK BLU (Kementerian Keuangan) pada Januari 2024, dengan data sebagai berikut. Dari 6 satker BLU lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 1 satker yang belum menyampaikan Laporan Implementasi Tarif TA 2023, maka persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BLU adalah sebesar 83,33%

No	Nama Satker	Laporan Implementasi Tarif		Nilai
		Diajukan	Disetujui	
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	✓	✓	3
2	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	✓	✓	3
3	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	✓	✓	3
4	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	✓	✓	3
5	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan (LPMUKP)	✓	✓	3
6	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal			0
	Nilai Rata-rata			2,5

- b. Sampai saat ini yang sudah memiliki Dewan Pengawas adalah satker BLU LPMUKP. Penyampaian Laporan Dewan Pengawas LPMUKP kepada Menteri dan Kementerian Keuangan tertera pada tabel dibawah ini.

No	Nama Laporan	Tanggal Penyampaian	Nilai
1	Laporan Dewan Pengawas BLU LPMUKP Periode Semester II Tahun 2023	27 Februari 2024	3
2	Laporan Dewan Pengawas BLU LPMUKP Periode Semester I Tahun 2024	31 Agustus 2024	3
	Nilai Rata-rata		3

Nilai akhir atas indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BLU adalah **2,75**, dengan kata lain pencapaian tidak sesuai target (nilai indeks 3)

No	Parameter	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Presentase Realisasi PNPB BLU	4,00	40%	1,60
2	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kementerian keuangan	3,00	35%	1,05
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan BLU	2,75	25%	0,69
Total Bobot			100%	3,34

Nilai Akhir Indek Pengelolaan BLU triwulan IV TA 2024 = 3,34

7) Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR melalui tahapan pengusulan Kementerian Negara/Lembaga dan pembahasan Kementerian Keuangan. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Perencanaan yang berkualitas merupakan tujuan utama dari siklus penganggaran yang berawal dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kualitas pengelolaan anggaran negara dapat diukur melalui perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel i-account. Dengan perencanaan APBN yang berkualitas, diharapkan pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin optimal dan bermanfaat seluas-luasnya untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Penerimaan negara yang optimal merupakan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang meliputi pajak, bea cukai dan PNBP. PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. Pengelolaan PNBP berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP sektor kelautan dan perikanan berasal dari penerimaan PNBP SDA perikanan dan PNBP lainnya berupa penerimaan yang diperoleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok serta pendapatan badan layanan umum. Pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang menjadi ruang lingkup Biro Keuangan dan BMN yaitu:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Pertanggungjawaban;
- 4) Pengawasan.

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja BLU-PNBP Nomor 108/SJ.2/TU.210/I/2025 Perihal Capaian IKU Nilai Pengelolaan PNBP Sektor KP, Indeks Pengelolaan BLU KKP, dan Nilai Kinerja Pembinaan BLU Sektor KP Triwulan IV 2024, capaian Indikator Kinerja nilai pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan sampai dengan Triwulan IV TA 2024 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	TRIWULAN IV			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100	-	100	-

Tabel 25 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100

Nilai Pengelolaan PNBP memperoleh realisasi 100% dari target 100%. Capaian dua tahun sebelumnya melampaui target sebesar 100% karena merupakan Indikator Kinerja yang baru dibentuk pada tahun 2022 dengan penanggungjawab Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran.

Capaian Indikator Kinerja nilai pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan tahun 2024 dihitung berdasarkan penilaian atas terpenuhinya 5 (lima) kriteria dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja nilai pengelolaan PNBP sektor kelautan dan perikanan Triwulan IV tahun 2024

No	Kondisi yang Dinilai	Skor			
		Target	Realisasi	Bobot	Realisasi Triwulan IV
1	Penyusunan Usulan dan Penetapan Rencana PNBP	1	1	30%	30
2	Regulasi/Ketentuan Perundang-undangan dalam rangka Pengelolaan PNBP	1	1	10%	10
3	Monitoring pelaksanaan PNBP KKP dilakukan secara bulanan	12	9	30%	30
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PNBP dan disampaikan ke Menteri Keuangan secara semester	2	1	20%	20
5	Penyusunan Usulan Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP ke Menteri Keuangan	1	1	10%	10
Total				100%	100

8) Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan

Nilai Kinerja Pembinaan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah satuan ukur yang ditetapkan untuk menilai kinerja pembina teknis BLU di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru Biro Keuangan dan BMN yang diampu Tim Kerja BLU dan PNPB yang ditetapkan sebagai bentuk inovasi dan kegiatan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pembinaan BLU oleh Unit Eselon I selaku Pembina Teknis dan Biro Keuangan dan BMN selaku Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan BLU di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dengan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022, bahwa pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga (Pasal 201 ayat (1)) dan dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk unit eselon I pada Kementerian Negara/Lembaga yang berperan sebagai pembina teknis (Pasal 202 ayat (4)) maka Indikator Kinerja ini menjadi salah satu alat Menteri dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan BLU di KKP.

Ruang lingkup pembinaan BLU di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diukur kinerjanya pada Indikator Kinerja ini meliputi:

- 1) Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU,
- 2) Penyampaian data/hasil perhitungan layanan BLU kepada Kementerian Keuangan dalam rangka penilaian kinerja BLU (Penilaian aspek pelayanan),
- 3) Penyampaian hasil evaluasi realisasi indikator kinerja Dewan Pengawas kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,
- 4) Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pembinaan BLU ini dinilai setahun sekali pada akhir tahun. Target capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 ini sebesar 100.

Tabel 27 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan	-	75	75	75	100	-	100	-

Tabel 28 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja BLU-PNBP Nomor 108/SJ.2/TU.210/II/2025 Perihal Capaian IKU Nilai Pengelolaan PNBP Sektor KP, Indeks Pengelolaan BLU KKP, dan Nilai Kinerja Pembinaan BLU Sektor KP Triwulan IV 2024 capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pembinaan BLU mendapatkan perolehan nilai 75% atau 100% dari target 75% dan merupakan Indikator Kinerja baru yang ditetapkan di Tahun Anggaran 2024 sehingga tidak ada target yang ditentukan pada Renstra 2024 dan belum ada perbandingan capaian dalam lima tahun terakhir.

No	Parameter	Skor	
		Target	Bobot
1	Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU T-2	1	25%
2	Pelaksanaan Rapat Pembinaan dengan Dewan Pengawas dan BLU dan Pelaporan Kepada Menteri Sekurang-kurangnya 1 kali setahun	2	25%
3	Pelaksaaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BLU dilakukan Secara Bulanan	12	50%
Total Bobot			100%

1) Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU T-2

Pada Tahun 2024, Tim BLU telah melakukan pendampingan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada satker BLU berikut ini:

No	Nama Satker BLU	RBA Tahun	Dilakukan Pendampingan	Keterangan
1	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	2026	13 November 2024	1 Kegiatan
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	2026	17 Desember 2024	1 Kegiatan
3	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	2026	20 Desember 2024	1 Kegiatan
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	2026	17 Desember 2024	1 Kegiatan
5	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	2026	13 November 2024	1 Kegiatan
6	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan (LPMUKP)	2026	17 Desember 2026	1 Kegiatan
Total Kegiatan				6

Tim BLU PNBP telah melakukan 6 kali pendampingan terhadap penyusunan RBA pada 6 Satker BLU, sehingga capaian parameter Pendampingan Penyusunan RBA BLU adalah 6 dengan kata lain sesuai dengan target yang telah ditentukan (6)

2) Pelaksanaan Rapat Pembinaan dengan Dewan Pengawas dan BLU dan Pelaporan Kepada Menteri

Sampai dengan 31 Desember 2024, dari 6 BLU lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 1 satker BLU yang memiliki Dewan Pengawas yaitu BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Pada Tahun 2024 Tim BLU PNPB tidak melaksanakan kegiatan Pembinaan bersama Dewan Pengawas dan BLU secara khusus karena Biro Keuangan ataupun BLU LPMUKP telah melaksanakan beberapa rapat yang membahas berbagai permasalahan dengan turut mengundang Dewan Pengawas.

Untuk pelaporan kepada Menteri tentang pengelolaan BLU dilaksanakan Tim BLU dan PNPB sebanyak 2 kali yaitu Biro Keuangan selaku Pembina Teknis BLU LPMUKP dan Biro Keuangan selaku Pembina BLU di tingkat Kementerian.

Capaian dari parameter Pelaksanaan Rapat Pembinaan dengan Dewan Pengawas dan BLU dan pelaporan kepada Menteri pada tahun 2024 adalah 2, dengan kata lain sesuai target yang telah ditetapkan (2)

3) Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BLU dilakukan Secara Bulanan

Pada tahun 2024, pembinaan dan monitoring pengelolaan BLU yang dilakukan oleh Tim BLU PNPB adalah sebagai berikut:

No	BLU	Pembinaan (Agenda dan Tanggal)	Keterangan
1	Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal	25 Juni 2024	1 Kegiatan
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	17 s.d. 20 September 2024	1 Kegiatan
3-	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	19 s.d. 21 Desember 2024	1 Kegiatan
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	1 s.d. 4 Oktober 2024	1 Kegiatan
5	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo	25 Juni 2024	1 Kegiatan
6	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan (LPMUKP)	12 November 2024	1 Kegiatan
Total Kegiatan			6

Capaian dari parameter Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BLU adalah 6, dengan kata lain mencapai target yang ditetapkan (6)

No	Parameter	Bobot	Target	Target Indeks	
				Realisasi	Sesudah Bobot Parameter
1	Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU T-2	25%	1	1	25%
2	Pelaksanaan Rapat Pembinaan dengan Dewan Pengawas dan BLU dan Pelaporan Kepada Menteri Sekurang-kurangnya 1 kali setahun	25%	2	2	25%
3	Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BLU dilakukan Secara Bulanan	50%	6	6	25%
Total Bobot		100%			75%

Skor Akhir Nilai Kinerja Pembinaan BLU triwulan IV TA 2024 = 75%, dengan kata lain berhasil mencapai target yang telah ditetapkan (75%)

9) Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2023.

Tabel 29 Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	0,01	≤0,5	≤0,5	0.09	182,00	≤0,5	0.09	182,00

Tabel 30 Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	1	0,01	≤1	0,02	≤1	0,1	≤1	0	≤0,5	0,01

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 Perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP Realisasi Indikator Kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal berada di angka 0,09 yang berarti di bawah 5% berdasarkan target tahunan dan Renstra 2024 harus kurang dari atau sama dengan 0,5. Selama lima tahun terakhir realisasi selalu di bawah 1 sampai dengan di tahun 2023 mengalami perubahan target menjadi kurang dari sama dengan 0,5.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP, capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal adalah 0.0904% dari target kurang dari 5% (≤0.5). Rekapitulasi tindak lanjut

temuan keuangan Laporan Keuangan 2023 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 31 Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan Laporan Keuangan 2023 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Unit Eselon I	Target	%
1	Sekretariat Jenderal	≤0,5	0.0904
2	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	≤0,5	0.0441
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.0999
4	Ditjen Perikanan Tangkap	≤0,5	0.0674
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	≤0,5	0.0596
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.1365
7	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.2940
8	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	≤0,5	0.0023
9	Inspektorat Jenderal	≤0,5	0.0317
Jumlah			0.0939

Adapun rincian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan lingkup Unit Eselon II Sekretariat Jenderal ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 32 Rincian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan lingkup Unit Eselon II Sekretariat Jenderal

No.	Unit Eselon II	Target	%
1	Biro Perencanaan	≤0,5	0
2	Biro Keuangan dan BMN	≤0,5	0
3	Biro Hukum	≤0,5	0
4	Biro Umum dan PBJ	≤0,5	0,1912
5	Biro SDMAO	≤0,5	0
6	Biro HKLN	≤0,5	0
7	Pusdatin	≤0,5	0,0204
8	LPMUKP	≤0,5	0
9	BPISDKP	≤0,5	0
10	Satker Dekonsentrasi	≤0,5	0
Jumlah			0.0904

LHP Laporan Keuangan KKP 2015, atas temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tidak Sesuai Ketentuan. Telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut dengan Unit Eselon I dan Satker terkait atas temuan aset pada tanggal 15 Oktober 2024. Terhadap temuan tersebut agar Tim Kerja Pengelolaan BMN Biro Keuangan dan BMN melakukan rapat pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut secara rutin dengan Unit Eselon I dan Unit Kerja terkait.

Tautan pemantauan tindak lanjut sebagai berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1TOB4iMCcvWMThGNqWXBtAMN_lvrN91O?usp=sharing

LHP Laporan Keuangan Tahun 2023, atas temuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp442.566.874,00.

- Terhadap rekomendasi BPK kepada Kepala Biro SDMAO agar memperbaiki mekanisme penerbitan SK Tugas Belajar, Biro SDMAO telah melaksanakan progress penyelesaian Tindak Lanjut antara lain:
 - Menyusun draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tubel di lingkungan KKP, dimana pada bulan oktober 2024 sudah dilakukan harmonisasi untuk dibahas lebih lanjut dengan Unit Eselon I untuk kemudian diharmonisasi dengan Kementerian Hukum oleh Biro Hukum KKP. Adapun target penyelesaian peraturan tersebut adalah pada Bulan November 2024.
 - Menyusun Proses Bisnis (Probis) dan SOP terkait tubel yang akan disampaikan oleh Kepala Biro SDMAO kepada Sekjen dengan ditembuskan kepada Irjen dan Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- Terhadap rekomendasi BPK kepada Kepala Biro Umum dan PBJ terkait temuan Tugas Belajar agar memerintahkan PPK agar lebih cermat dan memerintahkan PPABP agar lebih tertib menghitung gaji dan tunjangan, belum dilakukan penyelesaian tindak lanjut oleh kepala Biro umum dan PBJ sampai dengan Semester I tahun 2024, sehingga diharapkan agar Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan PBJ untuk segera membuat surat perintah kepada PPK dan PPABP.

10) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Obyek capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi Inspektorat Jenderal pada periode pengukuran.

Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 95% selama periode pengukuran. Adapun formula penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33 Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	100	95	95	100	105,26	95	100	105,26

Tabel 34 Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	80	82	83	92,78	65	100	70	97,86	75	99,12

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 Perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2024 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal mencapai angka 100% terhadap target tahunan dan Renstra tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir juga mendapatkan angka di atas target yang ditentukan yaitu di atas 80%.

Capaian nilai Indikator berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2024 mencapai angka 100% atau tuntas dari 196 jumlah rekomendasi. Rekapitulasi capaian di Unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 35 Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Lingkup Unit Eselon I

No.	Unit Eselon I	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Sekretariat Jenderal	196	196	100,00	0	0,00
2	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	453	434	95,81	19	4,19
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	126	126	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69	98	15,31
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	841	790	93,94	51	6,06
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	454	451	99,34	3	0,66
7	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	193	188	97,41	5	2,59
8	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	395	372	94,18	23	5,82
9	Inspektorat Jenderal	65	63	96,92	2	3,08
Jumlah		3363	3162	94,02	201	5,98

Adapun Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024 dengan rincian pada tabel 41:

Tabel 36 Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut di Lingkup Unit Eselon II Sekretariat Jenderal

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Biro Perencanaan	21	21	100	0	0
2	Biro Keuangan dan BMN	36	36	100	0	0
3	Biro Hukum	66	66	100	0	0
4	Biro Umum dan PBJ	0	0	100	0	0
5	Biro SDMAO	7	7	100	0	0
6	Biro HKLN	18	18	100	0	0
7	Pusdatin	11	11	100	0	0
8	LPMUKP	17	17	100	0	0
9	BPISDKP	20	20	100	0	0
Sekretariat Jenderal		196	196	100	0	0

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 4288/SJ.2/HP.470/XI/2024 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Dalam Rangka Pencapaian Optimal IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 28 rekomendasi belum tuntas/selesai dan 10 rekomendasi menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Tabel 37 Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 4288/SJ.2/HP.470/XI/2024 perihal Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Dalam Rangka Pencapaian Optimal IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Pada Triwulan IV Tahun 2024

No.	Unit Eselon II	Tanggal LHP	Sifat Penyelesaian	Objek Pengawasan	Pending	Proses	Total
1	Biro Keuangan dan BMN	14 Agustus 2024	Prioritas/Segera (masuk dalam perhitungan IKU TW IV)	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko TA 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP	-	4	4
2		19 Juli 2024	Prioritas/Segera (masuk dalam perhitungan IKU TW IV)	Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	-	1	1
3		2 September 2024	Prioritas/Segera (masuk dalam perhitungan IKU TW IV)	Hasil Reviu Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi 2023-2024 Lingkup Sekretariat Jenderal	1	2	3

No.	Unit Eselon II	Tanggal LHP	Sifat Penyelesaian	Objek Pengawasan	Pending	Proses	Total
4	Biro Perencanaan	24 Juli 2024	Prioritas/Segera (masuk dalam perhitungan IKU TW IV)	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga	-	1	1
5		7 Oktober 2024	Perhitungan IKU TW I tahun 2025	Reviu Usulan Rapat Order ke-2 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi Project Management Consultant Tahun 2024	2	-	2
6		14 Oktober 2024	Perhitungan IKU TW I tahun 2025	Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA. 2025 lingkup Sekretariat Jenderal	4	2	6
7		1 November 2024	Perhitungan IKU TW I tahun 2025	Hasil Reviu Pembayaran Termin 10, 11, dan 12 Pekerjaan Jasa Konsultasi Project Management Consultant (PMC) pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang	2	-	2
8		11 November 2024	Perhitungan IKU TW I tahun 2025	Hasil Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2024 pada Sekretariat Jenderal	2	-	2
9	Biro Umum dan PBJ	23 Oktober 2024	Perhitungan IKU TW I tahun 2025	Hasil Probit Audit Pelaksanaan PBJ TA 2024 pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	4	-	4
10		8 November 2024	Perhitungan IKU TW I tahun 2025	Hasil Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan III Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal	2	-	2
11	LPMUKP	10 Agustus 2023	Prioritas/Segera (masuk dalam perhitungan IKU TW IV)	Audit Kinerja TA 2022-2023 pada BLU LPMUKP	-	1	1
Total					17	11	28

Dalam rangka mendukung keberhasilan Indikator Kinerja yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan sebagai berikut:

- Biro Keuangan dan BMN

Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan MR antara lain:

- Berkoordinasi dengan Unit Kerja Unit Eselon II terkait dengan kurang tepat dalam menentukan faktor risiko, selanjutnya segera memperbaiki faktor risiko tersebut dan hasil perbaikan masukan ke dalam tautan tindak lanjut;
- Melengkapi bukti formulir pemantauan MR secara berkala sesuai dengan rencana pengendalian pada Biro HKLN, Biro Keuangan dan BMN, dan BPISDKP dan melengkapi bukti formulir pemantauan MR sesuai dengan rencana pengendalian pada LPMUKP (TW I, TW III Tahun 2024);
- Melengkapi dokumen data dukung pelaksanaan pengendalian sesuai
- dengan formulir Penilaian MR yang ditetapkan pada Biro Keuangan dan BMN, Pusdatin, LPMUKP, dan BPISDKP;
- Form penilaian MR pada LPMUKP yang mengalami perubahan kegiatan (dalam tahap proses verifikasi itjen)

Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan maturitas SPIP antara lain:

- Melengkapi kekurangan dokumen untuk komponen struktur dan proses pada kertas kerja penjaminan kualitas (dalam tahap proses verifikasi Itjen).

Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan kelebihan pembayaran provisi antara lain:

- Biro Keuangan dan BMN segera berkoordinasi dengan LPMUKP agar menindaklanjuti surat Sekretariat Jenderal Nomor B.964/SJ/HP.510/VIII/2024 terkait dengan tindak lanjut laporan hasil reviu atas laporan keuangan Semester I TA 2024 satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada poin 1 kelebihan provisi dengan melengkapi dasar hukum, penjelasan kelebihan provisi, dan tindak lanjut penyelesaian kelebihan provisi.

- Biro Perencanaan

Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan sistem perencanaan penganggaran dan belum seluruhnya dilengkapi dengan data dukung yang memadai antara lain:

- Penyesuaian jumlah/volume output dan anggaran antara RKA dengan Renja, belum sama, pada RO 2328.CAN.001 Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Sekretariat Jenderal pada Renja sebanyak 115 dan RKA-K/L sebanyak 124 dan RO 2328.EBA.962 Layanan Umum, dan 2328.EBA.994 Layanan Perkantoran Renja sebanyak 17 dan RKA-K/L sebanyak 16.
- Belum Terdapat Data Dukung harga satuan untuk detail kegiatan pada RO 2323.EBC.954.055.H Belanja Jasa Lainnya berupa Paket Penilaian Kompetensi Promosi Jabatan Struktural, dan RO 2328.EBA.962.055.E Belanja Jasa Lainnya berupa Paket Kegiatan Capacity Building.
- Detail kegiatan pada kegiatan “cadangan” pada RO lingkup LPUMKP.

- LPMUKP

Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan aplikasi e-Debitur belum berjalan antara lain:

- Memastikan kembali data debitur telah sesuai antara data debitur pada aplikasi dengan data bagian keuangan dengan cut off bulan September 2024 selanjutnya mengunggah data tersebut pada aplikasi SIDAK.

11) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90 ;
2. Baik, apabila NKA $> 80 - 90$;
3. Cukup, apabila NKA $> 60 - 80$;
4. Kurang, apabila NKA $> 50 - 60$;
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Sampai dengan bulan Juni 2024 pada Aplikasi Monev Kemenkeu sudah terdapat modul Nilai Kinerja berdasarkan Perencanaan Anggaran yang berasal dari Aspek Efektivitas yaitu Capaian Rincian Output (CRO).

Perkembangan Nilai Kinerja berdasarkan Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 6,82 dimana perkembangan yang nilainya terdiri dari dua Aspek:

Aspek efektivitas atas:

- 1) Capaian Rincian Output (CRO) dengan nilai 15,16
- 2) Nilai Indikator Kinerja Program (IKP) akan terlihat di akhir tahun.

Aspek Efisiensi atas:

- 1) Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)
- 2) Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK)

Tabel 38 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	99,12	81	81	88,72	109,53	82	88,72	109,53

Tabel 39 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	80	82	83	92,78	65	100	70	97,86	75	99,12

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024 Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal melampaui target mencapai 88,72 dan juga melampaui target Renstra 2024. Dalam lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Anggaran atau yang sekarang menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran selalu tercapai di atas target yang ditetapkan Perjanjian Kinerja.

Dimana penggunaan dan efisiensi SBK akan terlihat setelah direalisasikan dan kondisi saat ini menunggu hasil pemetaan rincian output (RO) yang memenuhi kriteria penggunaan RO Kementerian Lembaga oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Partisipasi Sekretariat Jenderal sebagai Eselon I untuk penginputan Capaian Output melalui Aplikasi SAKTI sampai dengan bulan Juni 2024 antara lain:

- 1) Januari sebanyak 35 Satuan Kerja
- 2) Februari sebanyak 35 Satuan Kerja
- 3) Maret sebanyak 35 Satuan Kerja
- 4) April sebanyak 63 Satuan Kerja
- 5) Mei sebanyak 62 Satuan Kerja
- 6) Juni belum terdapat partisipasi pengisian

Berdasarkan partisipasi Capaian Output, dari 71 jumlah satker lingkup Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Satker Pusat, UPT dan Satker TP, masih belum

seluruhnya berpartisipasi dalam penginputan Capaian Output pada Aplikasi SAKTI, sehingga diharapkan Sekretariat Jenderal dapat lebih cepat dalam pengisian partisipasi Capaian Output sebagai bagian dari komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran. Diinformasikan dalam Aplikasi Monev Kemenkeu terkait Partisipasi Caput Eselon I untuk saat ini Satker Sekretariat Jenderal masih terjadi duplikasi data Satuan Kerja yang berjumlah 71, dimana seharusnya sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-174/AG/AG.3/2024 tanggal 13 Februari 2024 hal Penyampaian Kode Satker Tugas Pembantuan Lingkup KKP, dimana total Satker Sekretariat Jenderal hanya sebanyak 37 Satker dengan rincian Satker Pusat 2, Satker Kantor Daerah 1 dan Satker Tugas Pembantuan 34, hal ini terjadi karena masih dalam proses penghapusan satker Dekon in aktif oleh Kementerian Keuangan.

Nilai capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV TA. 2024 baru terbentuk pada penilaian Capaian Rincian Output (CRO) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perhitungan dan Penilaian akhir Indikator Kinerja NKA Sekretariat Jenderal secara total dilakukan pada akhir tahun 2024.
- 2) Aplikasi MONEV KEMENKEU masih dalam proses pengembangan, dan sudah ada menu Nilai Kinerja pada dashboard aplikasi MONEV KEMENKEU.

Berdasarkan kondisi yang ada sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, Biro Keuangan dan BMN telah melaksanakan:

- 1) penyesuaian atas manual IKU, untuk tahun 2024 sesuai dengan kebijakan terbaru.
- 2) perkembangan Aplikasi, Biro Keuangan dan BMN berencana akan melakukan Focus Group Discussion terkait dengan penilaian NKA pada Triwulan IV TA 2024.

12)Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal

Tingkat kepatuhan BMN adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan terhadap tingkat kepatuhan BMN dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 40 Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal	100	82,5	82,5	94,00	113,93	82,5	94,00	113,93

Tabel 41 Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal	-	-	-	-	-	-	80	100	80	100

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor B.445/ITJ.1/HP.660/XII/2024 Perihal Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal realisasi Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal tahun 2024 mencapai 94,00 dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 82,5. Perbandingan capaian dua tahun terakhir lebih tinggi 6 poin yaitu 100.

Tambah Tabel

Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal, terdapat 4 (empat) komponen penilaian tingkat kepatuhan BMN yaitu:

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun berjalan (NP1, nilai maksimal adalah 5), terdiri atas:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN tahun berjalan (nilai maksimal adalah 2);
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL tahun berjalan (nilai maksimal adalah 3);
- 2) Tersedianya usulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan IV I tahun berjalan baik ke pengguna barang dan pengelola barang (NP2, nilai maksimal adalah 10). Atas aset hasil pengadaan tahun 2023 lingkup Sekretariat Jenderal yang merupakan kewenangan pengguna, Biro Keuangan dan BMN telah menerima

usulan pengesahan PSP melalui aplikasi SIMAN, dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK PSP oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan.

- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan Triwulan IV I tahun berjalan (NP3, nilai maksimal adalah 10);
- 4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun berjalan didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (Pusat) (NP4, nilai maksimal 10);
- 5) Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (NP5, nilai maksimal 5).

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan BMN dilakukan di akhir tahun anggaran berjalan yaitu di Triwulan IV menunggu hasil yang akan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

13) Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Standar Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran atau output. SBK terdiri dari:

- 1) Standar Biaya Keluaran Umum yang selanjutnya disingkat SBKU, yaitu SBK yang berlaku untuk beberapa atau seluruh Kementerian/Lembaga.
- 2) Standar Biaya Keluaran Khusus yang selanjutnya disingkat SBKK, yaitu SBK yang berlaku untuk 1 (satu) Kementerian/Lembaga. SBK digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang berkualitas dan efisien sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Memperhatikan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam rangka penguatan peran Standar Biaya Keluaran (SBK), hal tersebut diperlukan untuk menghasilkan sebuah keluaran terhadap kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Salah satu pendekatan dalam penyusunan SBK adalah penganggaran berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) yang baik dan sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).

Persentase Implementasi SBK KKP terdiri dari kegiatan identifikasi Standar Biaya Keluaran pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I, penyusunan usulan Standar Biaya Keluaran KKP dan monitoring dan evaluasi penggunaan Standar Biaya Keluaran KKP yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan SBK dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian Indikator Kinerja ini dilakukan setahun sekali dengan skor paling tinggi 100%.

Persentase Implementasi SBK KKP merupakan Indikator Kinerja baru pada Biro Keuangan dan BMN di tahun 2024 dan merupakan IKI mandatori dari Jabatan Fungsional Analis Anggaran, yang terdiri dari 3 tahapan penilaian indikator, yaitu:

- 1) Identifikasi Standar Biaya Keluaran pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I KKP;
- 2) Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran KKP;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP.

Tabel 42 Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	75	75	100	133,33-	-	-	-

Tabel 43 Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran Nomor 197/SJ.2/TU.210/I/2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja mencapai 100 persen dari target tahunan 75. Indikator Kinerja ini baru dibentuk pada tahun anggaran 2024 dikarenakan adanya penambahan formula penghitungan pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan memasukkan porsi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Standar Biaya Khusus (SBK).

Indikator Kinerja Implementasi SBK KKP baru ditetapkan di tahun anggaran 2024 sehingga tidak ada capaian perbandingan di tahun-tahun sebelumnya. Persentase Implementasi SBK KKP terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

Tabel 44 Tahapan Penilaian Capaian Implementasi SBK KKP

No.	Indikator	Skor		Keterangan
		Target	Bobot	
1.	Identifikasi SBK pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I KKP	1	20%	sudah dilaksanakan pada triwulan I
2.	Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran KKP	5	50%	akan dilaksanakan pada tw II dan III
3.	Monev Implementasi SBK KKP	2	30%	akan dilaksanakan pada tw II dan IV

Sasaran Kinerja kedua merupakan capaian kinerja yang dilaksanakan dari Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro Keuangan dan BMN. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja kedua sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan:

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN

Indikator Kinerja dalam Sasaran Kinerja ini terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja yang disajikan sebagai berikut:

14) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Sedangkan di Kementerian Kelautan Dan Perikanan diatur berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 TAHUN 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya area baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Tabel 45 Perbandingan Capaian Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	-	75	75	88,29	117,72	75	88,29	117,72

Tabel 46 Perbandingan Capaian Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang divalidasi oleh Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas disepakati memperoleh hasil penilaian 88,29 dengan kategori “Memenuhi Syarat” dari target Renstra 2024 yaitu 75.

Biro Keuangan dan BMN sebelumnya telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Lingkup Biro Keuangan dan BMN sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.207/SJ.2/KP.440/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, dilanjutkan dengan pencaangan Pembangunan zona Integritas sebagai *entry point* menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta sebagai Langkah awal dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas pada tanggal 31 Januari 2024, dilanjutkan dengan dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 pada tanggal 15, 16 dan 22 Februari 2024 pada tujuh area. Capaian ini dinilai secara tahunan. Pelaksanaan kegiatan dan penilaian di laksanakan di tahun yang sama.

15)Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN

Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dibidang Pengelolaan Keuangan dan BMN yang direncanakan akan diselesaikan pada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 Tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebanyak 3 peraturan yaitu:

- 1) Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan KKP.

Tabel 47 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 48 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025 Perihal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan

Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN adalah 100% atau Selesai dari 3 Peraturan yang disampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penetapan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam dua tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja ini mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.

16) Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN

Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif angka profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan Surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, terdapat beberapa penyesuaian instrumen pada dimensi IP ASN antara lain:

- 1) Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan Pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- 2) Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
- 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 4) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau non klasikal;
- 5) Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- 6) Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu :

- 1) Kualifikasi
- 2) Kompetensi
- 3) Kinerja
- 4) Disiplin

Selama periode Triwulan IV Tahun 2024 sebagian pegawai telah mengikuti beberapa Diklat Teknis khususnya yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Terdapat pula pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Administrator serta terdapat pegawai yang sudah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) dan Magister (S-2). Selain itu pegawai Biro Keuangan dan BMN juga cukup aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan workshop baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Instansi Pembina di luar KKP. Adapun capaian Indikator Kinerja IP ASN lingkup Biro Keuangan dan BMN pada Tahun 2023 dan Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN	-	85	-	-	-	85	-	-

Tabel 50 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN	71	56,00	72	66,80	73	74,85	78	79,95	79	89,49

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor B.62/SJ.3/TU.140/II/2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025 Biro Keuangan memperoleh nilai IP ASN 88,59 dari target tahunan dan Renstra 2024 85. Capaian 5 tahun terakhir tidak seluruhnya mencapai target. Tahun 2019 capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan dan BMN terus mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2024 ini, capaian Nilai IP ASN diharapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Adapun kenaikan target disebabkan adanya beberapa penyesuaian instrumen pada dimensi IP ASN sehingga mempengaruhi kenaikan bobot pada perhitungan setiap komponen.

17) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro Keuangan dan BMN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 51 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 52 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi Indikator Kinerja di tahun 2024 mencapai 100% dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 100%. Dalam lima tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja selalu tercapai sesuai target yaitu 100%

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 199/SJ.2/RC.610/I/2025 Perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Sekretariat Jenderal ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 53 Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Unit Eselon II Lingkungan Sekretariat Jenderal Triwulan IV 2024

No.	Eselon II	Jumah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100,00
2.	Biro Keuangan dan BMN	0	0	100,00
3.	Biro Umum dan PBJ	15	15	100,00
4.	Biro Hukum	0	0	100,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100,00
6.	Biro HKLN	0	0	100,00
7.	Pusdatin	1	1	100,00
8.	LPMUKP	0	0	100,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00
10.	Satker Dekon	0	0	100,00
SETJEN		16	16	100,00

18) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kinerja mereka. SAKIP mencakup beberapa komponen utama, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja (30%): Ini melibatkan perencanaan tujuan dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh instansi selama periode tertentu.
- 2) Pengukuran Kinerja (30%): Instansi mengumpulkan data dan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaporan Kinerja (15%): Instansi melaporkan hasil kinerja mereka kepada entitas yang lebih tinggi, seperti kementerian atau lembaga yang mengawasi mereka.
- 4) Evaluasi Kinerja (25%): Instansi melakukan evaluasi mandiri terhadap implementasi SAKIP dan menilai sejauh mana kinerja mereka sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut disebutkan bahwasanya komponen SAKIP terdiri atas Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Sedangkan pada tingkat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Indikator nilai SAKIP Biro Keuangan dan BMN pada Tahun 2024 adalah 84 (Kategori A, Memuaskan). Adapun nilai dari indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN dilakukan secara tahunan.

Tabel 54 Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN	85,50	84	84	84,55	100,65	84	84,55	100,65

Tabel 55 Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN	100	100	90	81,49	91	94,73	92	97,50	80,50	85,50

Realisasi Indikator Kinerja mencapai angka 84,55 dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 84. Dalam lima tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja selalu tercapai sesuai target yang sudah ditentukan di setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.1245/SJ/RC.610/X/2024 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 pada Biro Keuangan dan BMN didapatkan perolehan Nilai Penilaian AKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 yang dirinci pada tabel berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,00	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,60
4	Evaluasi Internal	25	22,50	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,50	84,55
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan). Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya.
- b. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- c. Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Keuangan Tahun 2023 sebesar 109,05 dan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 109,30.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja Biro Keuangan telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat waktu.
- b. Substansi Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
 - ii. Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - iii. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk Laporan Kinerja Tahunan.
 - iv. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

4) Evaluasi Internal

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku.
- b. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023.
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Catatan dan hasil evaluasi di atas akan ditindaklanjuti pada bulan Januari Tahun 2025.

19) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN

Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Biro Keuangan dan BMN berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik dalam bentuk surat maupun bab.

Penilaian capaian terhadap Indikator Kinerja ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Biro Keuangan dan BMN sebagai objek pengawasan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Biro Keuangan dan BMN selama periode pengukuran.

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat Jenderal yang menjadi sasaran Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN periode Triwulan IV Tahun 2024, adalah Laporan Hasil Audit yang terbit pada bulan Desember 2023 s.d Maret 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan 30 Juni 2024.

Tabel 56 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	100	95	95	100	105,26	95	100	105,26

Tabel 57 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	80	100	60	82,35	65	100	70	100	75	100

Realisasi Indikator Kinerja mencapai persentase 100% dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 95%. Dalam lima tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN selalu tercapai di angka 100% dari target di masing-masing tahun anggaran.

Pada periode ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa kali audit di lingkup Sekretariat Jenderal. Biro Keuangan dan BMN menjadi salah satu Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal yang memiliki temuan atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal. Adapun daftar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang menjadi target penilaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN” Triwulan IV Tahun 2024 diantaranya:

No	Obyek Pemeriksaan	Eselon II	Jenis Pengawasan	Jumlah Rekomendasi
1	Hasil Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023 Pada Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan BMN	Evaluasi	4
2	Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	Biro Keuangan dan BMN	Reviu	1
3	Hasil Reviu Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi 2023-2-24 Lingkup Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan BMN	Reviu	3
TOTAL				9

Upaya dalam rangka penyelesaian rekomendasi terkait dengan MR antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan Unit Kerja Unit Eselon II terkait dengan kurang tepat dalam menentukan faktor risiko, selanjutnya segera memperbaiki faktor risiko tersebut dan hasil perbaikan masukan ke dalam link tindak lanjut;
- 2) Melengkapi bukti formulir pemantauan MR secara berkala sesuai dengan rencana pengendalian pada Biro HKLN, Biro Keuangan dan BMN, dan BPISDKP dan melengkapi bukti formulir pemantauan MR sesuai dengan rencana pengendalian pada LPMUKP (TW I, TW III Tahun 2024);
- 3) Melengkapi dokumen data dukung pelaksanaan pengendalian sesuai dengan formulir Penilaian MR yang ditetapkan pada Biro Keuangan dan BMN, Pusdatin, LPMUKP, dan BPISDKP;
- 4) Form penilaian MR pada LPMUKP yang mengalami perubahan kegiatan (dalam tahap proses verifikasi itjen)

Adapun Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 58 Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Biro Perencanaan	21	21	100	0	0
2	Biro Keuangan dan BMN	36	36	100	0	0
3	Biro Hukum	66	66	100	0	0
4	Biro Umum dan PBJ	0	0	100	0	0
5	Biro SDMAO	7	7	100	0	0
6	Biro HKLN	18	18	100	0	0
7	Pusdatin	11	11	100	0	0
8	LPMUKP	17	17	100	0	0
9	BPISDKP	20	20	100	0	0
Sekretariat Jenderal		196	196	100	0	0

20) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur KKP dan berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi serta menindaklanjuti hasil evaluasi Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan yang terstandar, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan aplikasi melalui *collaboration office* melalui laman <https://portal.kkp.go.id> dengan komponen penilaian pada keaktifan 100% oleh pejabat eselon 2 dengan maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4 pada setiap triwulan. Pada Triwulan IV Tahun 2024.

Pada Triwulan IV, capaian mencapai angka 100%. Capaian Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN disajikan pada tabel berikut:

Tabel 59 Perbandingan Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN	133,33	94	94	100	106,38	94	100	106,38

Tabel 60 Perbandingan Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Biro Keuangan dan BMN	80	94,58	82	91,11	84	84,93	88	100	92	133,33

Realisasi Indikator Kinerja mencapai angka 100 dari target tahunan dan Renstra 2024 yaitu 94. Dalam lima tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja selalu di atas target yang telah ditetapkan di setiap tahun anggaran yang berbeda.

21) Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN

Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan dan BMN merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2022 yang digunakan sebagai monitoring maupun evaluasi terhadap anggaran di lingkup Biro Keuangan dan BMN. Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan dan BMN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro Keuangan dan BMN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Keuangan dan BMN. Penarikan data realisasi anggaran dapat dilakukan pada Aplikasi Kemenkeu SAKTI pada Modul Bendahara Cetak Laporan. Untuk menguji kesesuaian data realisasi anggaran biasanya operator Bendahara atau PPK akan mengambil data setiap akhir bulan. Hal ini dikarenakan data tersebut juga sebagai penunjang LPJ Bendahara perbulannya. Saat ini Biro Keuangan dan BMN memiliki delapan Tim Kerja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Memorandum Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12.581.275.160 Perihal Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran Biro Keuangan dan BMN per tim kerja di luar Belanja Modal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 61 Realisasi Anggaran Biro Keuangan dan BMN per 30 Juni 2024

NO.	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	SISA ANGGARAN	% Realisasi
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	5.630.202.000	5.581.920.993	48.281.007	99,14
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	7.007.629.000	6.999.354.167	8.274.833	99,88
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024		12.637.831.000	12.581.275.160	6.137.278.238	99,55

Sumber: SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel 62 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2024		
	Tahunan		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Realisasi	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	99,36	95	95	99,55	104,78	95	99,55	104,78

Tabel 63 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN dari Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	87	94,05	95	97,38	95	97,28	95	97,75	95	99,36

Capaian sampai dengan Triwulan IV melampaui dari target tahunan 2024 dan Renstra 2024 di angka 99,55% dari 95%. Selama lima tahun berturut-turut, realisasi anggaran Biro Keuangan dan BMN selalu melampaui target dari setiap tahun anggaran yang berbeda.

BAB IV

PENUTUP



Kesimpulan Umum

Biro Keuangan dan BMN merupakan Unit Eselon II yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja merupakan rangkuman yang berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana aksi tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan APBN.

Sebanyak 54 Pegawai Biro Keuangan dan BMN yang melaksanakan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan BMN secara transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja dengan target yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Seluruh target Indikator Kinerja di Triwulan IV tahun 2024 telah mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,59. Tercapainya target Indikator Kinerja tersebut didukung dengan agenda Pembangunan Zona Integritas yang sedang dilaksanakan di lingkungan Biro Keuangan dan BMN.

Biro Keuangan dan BMN juga selalu menyampaikan nilai-nilai Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, Sinergi (SAILS) sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Biro Keuangan dan BMN.

Diharapkan dengan telah disusunnya Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang berkelanjutan di lingkup Biro Keuangan dan BMN.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN DAN BMN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyawati

Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan : Sekretaris Jenderal

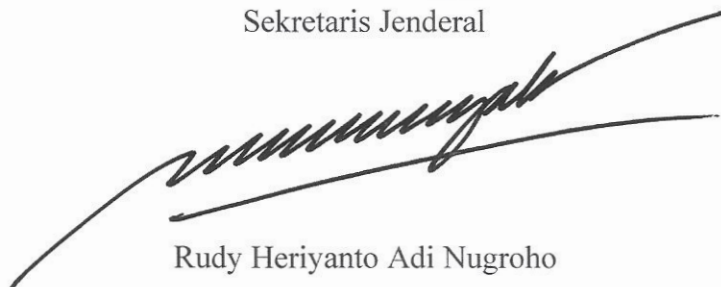
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Setyawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KEUANGAN DAN BMN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	WTP (5)
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	73,25
		3	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3
		4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3,35
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,76
		6	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	3
		7	Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100
		8	Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75
		9	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)	≤0,5
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	95
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	81
		12	Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	82,5
		13	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN	14	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	75
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100
		16	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	83
		17	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (%)	100
		18	Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (%)	95
		20	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	94
		21	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	9.839.930.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	7.706.643.000
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024		17.546.573.000

Jakarta, 23 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Setyawati



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS NOMOR B.159/SJ.2/KP.440/I/2024

- Pertimbangan : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan kinerja Biro Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penetapan Tim Pengelolaan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan Tahun 2024;
- Dasar : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Tim Kinerja Biro Keuangan (terlampir)

- Untuk
- : 1. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan format, substansi, waktu, pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku (triwulanan/semesteran/tahunan);
 2. Menyusun Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi pada setiap kegiatan dan waktu pelaporan yang telah ditentukan;
 3. Mengikuti pembahasan Laporan Kinerja berdasarkan penanggung jawab IKU masing-masing;
 4. Memenuhi bukti/data dukung yang cukup mendeskripsikan IKU ;

Surat tugas ini berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.

Jakarta, 16 Januari 2024
Kepala Biro Keuangan,



Setyawati

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.159/SJ.2/KP.440/I/2024
Tanggal : 16 Januari 2024

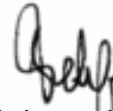
Susunan Tim Pengelolaan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Penanggungjawab Tim Kerja	Nama Penanggungjawab
1.	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1. Dicky Asoksan 2. Alia Rahmadani
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	73,25	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1. Adityo LN 2. Bagus Aji
3.	Level Maturitas SPIP KKP (level)	3	Kepatuhan Internal	1. Kuni Afifah 2. Wisnu Danang S.
4.	Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	3,35	Pengelolaan Barang Milik Negara	1. I Putu Surya S. P.
5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (nilai)	93,76	Perbendaharaan	1. Revo Triono 2. Paulus Tupado
6.	Indeks Pengelolaan BLU Sekretariat Jenderal (IPB Sekjen)	3	PNBP-BLU	Budiani Ayu Damayanti

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Penanggungjawab Tim Kerja	Nama Penanggungjawab
7.	Nilai pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	100	PNBP-BLU	Brigitta D. Putrianti
8.	Nilai Kinerja Pembinaan Badan Layanan Umum Sektor Kelautan dan Perikanan	75	PNBP-BLU	Budiani Ayu Damayanti
9.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2023 (persen)	≤0,5	Tindak Lanjut	Harianto Eka Putra
10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (persen)	95	Tindak Lanjut	Faaza Naima
11.	Nilai Kinerja Anggaran Setjen (nilai)	86	Pelaksanaan anggaran	1. Irmala S. 2. Amilia
12.	Tingkat Kepatuhan BMN Setjen (persen)	82,5	Pengelolaan Barang Milik Negara	1. Sundari Ika Binarti 2. Wuri Samiyoto
13.	Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	Pelaksanaan Anggaran	1. Aries Sariyanto 2. Ika Desmiarti
14.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	Dukungan Manajerial	1. Kuni Afifah 2. Rahmah Nurhilal
15.	Persentase Program Penyusunan Peraturan perundang – undangan bidang Keuangan (persen)	100	Dukungan Manajerial	1. Muhono 2. Budiani Ayu D.

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	Penanggungjawab Tim Kerja	Nama Penanggungjawab
16.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro Keuangan (Indeks)	85	Dukungan Manajerial	1. Wiji Mutia 2. Naufal Rifqi Y
17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Keuangan (persen)	100	Dukungan Manajerial	Rif'ani Aswab
18.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan (nilai)	92	Dukungan Manajerial	1. Satriani Situmorang 2. Dading Surya Al Majid
19.	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Keuangan (persen)	75	Dukungan Manajerial	1. Wiji Mutia 2. Naufal Rifqi Y
20.	Unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	Dukungan Manajerial	1. Satriani Situmorang 2. M. Hadi
21.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	95	Dukungan Manajerial	Brythania AMP

Jakarta, 16 Januari 2024
Kepala Biro Keuangan,


Setyawati



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2023**

	1.	Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2.	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2023 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3.	Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4.	Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023</i>	2.	Sistematika Pelaporan
		Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 terdiri dari:
		a. Ringkasan Eksekutif;
		b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2023 yang memuat opini;

- c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2023*

3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2023

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023.

*Hasil Pemeriksaan
SPI dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan*

4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

- a. Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran serta Keselarasan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam Rangka Pertanggungjawaban Program/Kegiatan Pemerintah Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp5,82 Triliun dan Potensi Sanksi Administrasi Sebesar Rp341,80 Miliar;
- c. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 42 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp6,81 Triliun dan Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 17 K/L Minimal Sebesar Rp3,51 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
- d. Rekonsiliasi Volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2020 s.d. 2023 Belum Selesai Dilaksanakan dan Belum Terdapat Evaluasi Menyeluruh atas Implementasi Kebijakan HGBT di Bidang Industri dan/atau di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum;
- e. Penganggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan pada APBN Tahun 2023 Belum Didukung dengan Perencanaan Program/Kegiatan yang Memadai;
- f. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 81 K/L Minimal Sebesar Rp7,05 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- g. Perencanaan dan Penganggaran atas Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan Berupa Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tertentu dan Rumah Tapak/Satuan Rumah

Susun, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Panas Bumi Tahun 2023 Belum Memadai;

- h. Perencanaan dan Penganggaran Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* Tahun 2023 untuk Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah Belum Memadai;
- i. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan *Prefunding* untuk Pemenuhan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 melalui Penerbitan Surat Berharga Negara pada Akhir Tahun 2023 Belum Memadai, serta Belum Didukung dengan Ketentuan Teknis secara Memadai;
- j. Pengelolaan Kas dan Rekening pada K/L Belum Sepenuhnya Memadai dan Aplikasi SPRINT pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Dapat Mendukung Pelaporan Saldo Kas yang Akurat;
- k. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Belum Melakukan Tindakan Penagihan Aktif Piutang Pajak Secara Optimal;
- l. Pengaturan Persetujuan Perubahan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang Belum Dimanfaatkan Belum Memadai;
- m. Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- n. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Belum Sepenuhnya Didukung Pengaturan yang Jelas dan Pengendalian yang Memadai.

*Rekomendasi pada
LHP atas SPI dan
Kepatuhan*

5.

Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- a. berkoordinasi dengan:
 - 1) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PANRB untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya;

- 2) Menteri PANRB untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2015 agar pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan APBN yang andal dan akurat dalam rangka mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
 - 3) Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan penyempurnaan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang selaras dan terintegrasi antara sistem pelaporan keuangan dan kinerja, serta didukung kerangka kerja logis yang berkualitas;
 - 4) Menteri BUMN dan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT KAI (Persero) dan PTPN I;
- b. melalui Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik lebih optimal berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk segera menyelesaikan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan HGBT di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik atas keseluruhan aspek sesuai Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022;
 - c. melakukan perbaikan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan: 1) kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA, 2) pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA, dan 3) penerapan mekanisme RPATA oleh satker Badan Layanan Umum (BLU);
 - d. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - 1) menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan supaya berkoordinasi dengan Direktur Transformasi dan Proses Bisnis, serta Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan agar dapat melakukan komunikasi antar subsistem dan validasi data, khususnya dalam hal perbedaan data antara Modul Penerimaan Negara dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);

- 2) menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) supaya lebih optimal berkoordinasi dengan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) DJA selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN Belanja Subsidi dalam merencanakan dan menganggarkan belanja subsidi Pajak DTP, serta mengusulkan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Subsidi pada tahun berjalan, termasuk atas kekurangan anggaran dan pengesahan belanja subsidi Pajak DTP tahun 2023;
 - 3) menginstruksikan Kepala Kanwil DJP dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan 10.097 ketetapan pajak;
- e. memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk:
- 1) melakukan *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak dan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk melakukan pengawasan berdasarkan *risk profile* tersebut;
 - 2) berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait untuk memperbaiki mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan sehingga dapat memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas;
- f. menyusun kajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan DAAU *Specific Grant* Dukungan Penggajian PPPK Daerah untuk mendukung perbaikan kualitas perencanaan kegiatan guna mendorong peningkatan kualitas belanja daerah;
- g. memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran untuk menyusun aturan terkait tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* dengan mempertimbangkan sumber pengadaan utang dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan analisis atas data *outlook* kondisi pasar keuangan domestik dan global, data historis penerbitan Surat Berharga Negara, proyeksi saldo rekening Saldo Anggaran Lebih dan BLU, serta potensi pembiayaan melalui Pinjaman Tunai, termasuk analisis mengenai kriteria kondisi dan besaran kebutuhan *prefunding*;

- h. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk: (1) melakukan evaluasi dan upaya peningkatan kompetensi bendahara dengan memperhatikan standar kompetensi bendahara yang diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, (2) bersama-sama Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran belanja negara dan sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait pengelolaan anggaran belanja K/L, dan (3) mengoptimalkan pemanfaatan Sistem SPAN untuk mendukung identifikasi kontrak yang dapat diberikan perpanjangan penyelesaian ke tahun berikutnya atas pembebanan RPATA sejak tahap pendaftaran kontrak;
- i. memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyempurnakan Aplikasi SIMAN agar dapat mendukung secara optimal keseluruhan tahap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) termasuk pengawasan dan pengendalian BMN serta berkoordinasi secara aktif dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan sengketa aset antar lembaga; dan
- j. memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan APIP K/L lainnya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan anggaran belanja negara dalam rangka peningkatan kualitas penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Penjelasan lebih terperinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih terperinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 – 2023

6.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 – 2023

Entitas Pemeriksaan pada Tahun 2023 mencakup 84 K/L dan satu BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	85	84	82	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	2	4	1	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	-	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	87	88	83	85

Perincian opini LKKL dan LKBUN sebagaimana terlampir.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

7.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

BPK telah melakukan reviu atas 47 kriteria. Berdasarkan hasil reviu tersebut, sebanyak 25 kriteria telah mencapai level *advanced*, 14 kriteria telah mencapai level *good*, dan delapan kriteria masih berada pada level *basic*, dengan perincian sebagai berikut.

- a. Pilar Pelaporan Fiskal, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced* dan empat kriteria telah mencapai level *good*;
- b. Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced* dan empat kriteria telah mencapai level *good*;
- c. Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced*, tiga kriteria telah mencapai level *good*, dan satu kriteria masih berada pada level *basic*; dan
- d. Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, dari 11 kriteria terdapat satu kriteria yang telah mencapai level *advanced*, tiga kriteria telah mencapai level *good*, dan tujuh kriteria masih berada pada level *basic*.

Hasil reviu tahun 2023 menunjukkan terdapat kenaikan capaian Pemerintah pada satu kriteria dibandingkan dengan capaian tahun 2022, yaitu pada pilar Pelaporan Fiskal atas kriteria Cakupan Belanja Perpajakan. Kriteria tersebut meningkat dari level *good* menjadi *advanced* karena Pemerintah telah menerapkan kebijakan *sunset provision* yaitu memberikan batasan waktu yang jelas mengenai saat mulai dan berakhirnya kebijakan pemberian insentif perpajakan.

Penilaian atas pemenuhan kriteria pada keempat pilar transparansi fiskal tersebut didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2023.

Jakarta, 21 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Perincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WDP	⁶⁾	⁶⁾
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara ¹⁾	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ⁶⁾	WTP	WTP	WDP	⁶⁾	⁶⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) ¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

ruif

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
80.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86.	121	Badan Ekonomi Kreatif ³⁾	WTP	3)	3)	3)	3)
87.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
88.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ⁴⁾	4)	4)	WTP	WTP	WTP
89.	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁷⁾	7)	7)	7)	WTP	WTP
90.	125	Badan Pangan Nasional ⁸⁾	8)	8)	8)	8)	WDP
91.	126	Otorita Ibu Kota Nusantara ⁸⁾	8)	8)	8)	8)	WTP
92.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2019
- 2) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2019
- 3) : Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak Tahun 2020 karena telah dilikuidasi dan digabung ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 4) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2021
- 5) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2021
- 6) : Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak Tahun 2022 karena telah dilikuidasi
- 7) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2022 yang merupakan gabungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BA 079), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BA 080), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BA 081), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (BA 082), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 042)
- 8) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

n. r. w. f

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 93/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Hal : Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Triwulan IV 2024
Tanggal : 9 Januari 2025

Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, berikut kami sampaikan capaian indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) periode triwulan IV 2024.

Komponen	Nilai Tercapai	Porsi IKU	Capaian IKU Periodik
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Alokasi Belanja	4	15%	12
Penyelesaian Kualitas Pelaporan Keuangan	4	15%	12
Penyerapan Realisasi Anggaran	4	20%	16
Transparansi Pengelolaan Keuangan	5	15%	15
Kondisi Keuangan	4	15%	12
Tindak Lanjut atas Pemeriksaan	4,5	20%	18
Nilai Akumulasi Capaian Periodik			85

Dokumen laporan pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/APKRokeuBMN_IKUIPK. Demikian kami sampaikan, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja Biro Keuangan dan BMN.

Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*hunting*), Faksimile (021) 85903713
E-mail deputi1@bpkp.go.id Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/SP-42/D1/02/2025 14 Januari 2025
Lampiran : Satu Laporan
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-232/D102/1/2024 tanggal 31 Desember 2024, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 secara umum telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,683 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3;
 - b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,616 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
 - c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,526 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3.

Uraian lebih lanjut hasil evaluasi disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Aryanto Wibowo

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala BPKP (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 150-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-22/KN/KN.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
Kementerian/Lembaga Tahun 2023

16 Februari 2024

Yth. Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Umum/Kepala Biro SDM
dan Umum/Kepala Biro Umum dan Keuangan
(sebagaimana terlampir)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan tersebut memberikan dasar dalam perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dimana terdapat perubahan parameter/subparameter, formula serta sumber data yang digunakan dari perhitungan IPA pada tahun anggaran 2022.
- Adapun hasil pengukuran masing-masing K/L sesuai Keputusan Menteri dimaksud dapat diakses pada tautan s.id/IndeksPengelolaanAset untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- Lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa pada perhitungan ini terdapat beberapa faktor penyesuaian yang diberikan kepada seluruh K/L, khususnya pada subparameter Realisasi PNBPN Pemanfaatan Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang dan subparameter Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, yang dikarenakan oleh:
 - Transisi penggunaan aplikasi SIMAN dari versi 1 ke versi 2 di tahun 2023, dimana baru secara terbatas diterapkan, baik dari segi modul maupun K/L yang menerapkan; dan
 - Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 belum dilaksanakan pada semua K/L.
- Dengan mempertimbangkan bahwa perhitungan sebagaimana diatur dalam KMK 288/KM.6/2023 direncanakan sebagai acuan dalam perhitungan IPA untuk Tahun Anggaran 2024 tanpa faktor penyesuaian sebagaimana angka 3 di atas, maka beberapa hal yang harus Saudara perhatikan adalah :

Parameter	Hal yang
Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP Terkait BMN	- Ketaatan pada ketentuan pengelolaan BMN; - Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK atas LHP LKPP terkait BMN di tahun berikutnya; dan - Menyampaikan <i>update</i> progres tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud kepada Pengelola Barang.
Realisasi PNBPN di Bidang Pengelolaan BMN	- Menyusun dan menetapkan target PNBPN dari Pengelolaan BMN berdasarkan capaian tahun-tahun anggaran sebelumnya; - Meningkatkan realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, utamanya melalui Pemanfaatan BMN melalui persetujuan Pengelola Barang; - Optimalisasi BMN untuk meningkatkan persentase kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; - Tindak lanjut atas BMN dalam kategori Rusak Berat; dan - Melakukan perekaman persetujuan Pengelola Barang serta realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN yang disetorkan ke Kas Negara pada aplikasi SIMAN.

Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN	a. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; b. Penyampaian Laporan Barang Pengguna berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; dan c. Penyampaian usulan RKBMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu.
Asuransi BMN	a. Melakukan identifikasi atas BMN yang merupakan target dalam program asuransi BMN; b. Mengajukan usulan pengasuransian BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Menyampaikan data polis pengasuransian BMN kepada Pengelola Barang.
Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	a. Melakukan tindak lanjut atas seluruh persetujuan Pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang; dan b. Pengkinian data atas persetujuan serta tindak lanjut dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	a. Melakukan identifikasi terhadap BMN yang masuk dalam kategori Rusak Berat; b. Menyampaikan usulan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat kepada Pengelola/Pengguna Barang; dan c. Melakukan tindak lanjut atas persetujuan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat sehingga tidak menambah jumlah dan nilai pada Daftar Barang Pengguna.
BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan	a. Identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan; b. Mengusulkan dan melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah; dan c. Pengkinian data atas sertifikat hak atas tanah BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	a. Melakukan/menyampaikan usulan Penetapan Status Penggunaan atas BMN; b. Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; dan c. Optimalisasi Penggunaan BMN sesuai hasil/rekomendasi pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Encep Sudarwan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3. Chief Reporting Officer Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat
4. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB



BA	:	032	IPA	IPA Nasional	Ket
KL	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,51	3,42	Di atas Rata-rata

Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

No	Parameter/Subparameter	Data		Nilai Parameter/ Subparameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
1.1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d T-1			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60
		4	4	100%	-	15%	4	
1.2	Realisasi PNPB di Bidang Pengelolaan Aset					Bobot		0,40
						10%		
1.2.1	Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN	PNBP dari Pengelolaan BMN	estimasi/target pendapatan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00
		Rp23.684.787.932	Rp6.653.861.000	356%	-	50%	4,0	
1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan Berdasarkan Persetujuan	Total Nilai Pendapatan Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00
						50%	4	
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan								
2.1	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN					Bobot		0,31
						10%		
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
		31 Oktober 2023	10 November 2023	4	-	30%	4	
2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,90
		12 Mei 2023	12 Mei 2023	3	-	30%	3,0	
		28 Juli 2023	31 Juli 2023	3				
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,00
			15 Februari 2023	1	1	40%	3	
		14 Juli 2023	20 Juli 2023	4	4			
2.2	Asuransi BMN	Progres		Indeks		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,40
		Penyerahan Polis Asuransi BMN		4	-	10%	4	
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
3.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,30
		21	45	47%	110%	15%	2	
3.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir	-		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,30
		546.877.085.102	459.273.414.013	Saldo Akhir < Saldo Awal	-	10%	3	
4. Administrasi BMN yang Andal								
4.1	BMN memiliki dokumen kepemilikan					Bobot		0,60
						15%		
4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks sebelum bobot	3,00
		22750082	25342694	90%	110%	75%	4	
4.1.2	Penuntasan Target Sertifikasi BMN	Target Sertifikasi yang diselesaikan t-0	Target Keseluruhan Sertifikasi t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,00
		66	62	106%	110%	25%	4	
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		0,60
						15%		
4.2.1	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Rerata Hasil Pengukuran SBSK s.d t-0				Bobot	Indeks sebelum bobot	2,80
							4	
4.2.2	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	BMN Tanah dan/atau Bangunan PSP t-0	Total BMN T/B t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
		7933	9677	82%	110%	30%	4	
*menyesuaikan parameter								
Nilai IPA								3,51

Penyesuaian Kelompok		Kelompok (Satker)
Menaik	Menurun	
100%	100%	1 s.d. 10
105%	95%	11 s.d. 100
110%	90%	101 s.d. 500
115%	85%	>500

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 40/SJ.1/RC.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2024 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.20 (sesuai Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-738/PB.2/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output dan Penilaian IKPA Belanja K/L Tahun 2024).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2024 sebesar 93,84 dari target nilai 93,76.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2024 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Lingkup Inspektorat Jenderal
4. Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.60	82.45	91.68	96.67	99.18	96.79	97.66	94.34	100%	0.50	93.84
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	12.37	18.34	9.67	9.92	9.68	24.41				
			Nilai Aspek	91.03		96.08				97.66				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	94.29	97.90	97.33	100.00	98.80	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.14	19.58	9.73	10.00	9.88	25.00				
			Nilai Aspek	97.15		98.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.43	96.29	95.27	99.82	97.08	96.76	96.08	100%	0.00	96.08
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.41	19.26	9.53	9.98	9.71	24.19				
			Nilai Aspek	94.72		97.11				96.76				
3	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.07	95.14	93.97	99.38	94.48	95.51	94.75	100%	0.50	94.25
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.06	19.03	9.40	9.94	9.45	23.88				
			Nilai Aspek	93.54		95.74				95.51				
4	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	99.66	88.22	89.38	97.30	97.40	96.28	92.39	93.27	100%	0.50	92.77
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.97	13.23	17.88	9.73	9.74	9.63	23.10				
			Nilai Aspek	93.94		95.09				92.39				
5	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	99.60	66.38	95.50	96.36	99.73	99.07	97.87	93.00	100%	0.50	92.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	9.96	19.10	9.64	9.97	9.91	24.47				
			Nilai Aspek	82.99		97.67				97.87				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	98.84	86.18	85.26	97.83	99.59	95.85	96.24	93.25	100%	0.75	92.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.88	12.93	17.05	9.78	9.96	9.59	24.06				
			Nilai Aspek	92.51		94.63				96.24				
7	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.38	75.30	90.15	96.49	99.18	95.78	97.87	92.88	100%	0.75	92.13
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.94	11.30	18.03	9.65	9.92	9.58	24.47				
			Nilai Aspek	87.34		95.40				97.87				
8	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	99.44	70.48	88.42	99.58	99.56	95.55	97.74	92.10	100%	0.00	92.10
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.94	10.57	17.68	9.96	9.96	9.55	24.43				
			Nilai Aspek	84.96		95.78				97.74				
9	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.69	83.06	92.33	100.00	97.13	100.00	92.36	100%	0.50	91.86
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.80	16.61	9.23	10.00	9.71	25.00				
			Nilai Aspek	89.35		93.13				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.87	100.00	99.99	100%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
4	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	99.85	98.67	100.00	99.52	100.00	99.79	100%	0.00	99.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	9.87	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				
6	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	100.00	98.15	100.00	100.00	99.89	100.00	99.62	100%	0.00	99.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.63	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				
7	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	100.00	99.42	100.00	100.00	97.29	100.00	99.61	100%	0.00	99.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.18				100.00				
8	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.91				100.00				
9	123	032	649684	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II	Nilai	100.00	100.00	98.77	100.00	100.00	97.80	100.00	99.53	100%	0.00	99.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.75	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.14				100.00				
10	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.83	100.00	100.00	99.36	100.00	99.50	100%	0.00	99.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.57	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.30				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	100.00	99.43	96.00	100.00	100.00	100.00	99.49	100%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.89	9.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.86				100.00				
12	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	100.00	98.38	100.00	100.00	97.90	100.00	99.47	100%	0.00	99.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.68	10.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.07				100.00				
13	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	100.00	98.78	100.00	100.00	97.08	100.00	99.46	100%	0.00	99.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.76	10.00	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.96				100.00				
14	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.37	0.00	0.00	99.79	100.00	79.45	80%	0.00	99.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.47	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.58				100.00				
15	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.68	100.00	100.00	97.52	100.00	99.29	100%	0.00	99.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.54	10.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.80				100.00				
16	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	99.18	100.00	100.00	93.13	100.00	99.15	100%	0.00	99.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.84	10.00	10.00	9.31	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.08				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

17	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	100.00	98.32	100.00	100.00	100.00	97.50	99.04	100%	0.00	99.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.66	10.00	10.00	10.00	24.38				
					Nilai Aspek	100.00		99.58				97.50				
18	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	100.00	96.96	96.00	99.08	100.00	100.00	98.90	100%	0.00	98.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.39	9.60	9.91	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.01				100.00				
19	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	95.44	100.00	100.00	97.27	100.00	98.82	100%	0.00	98.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.09	10.00	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.18				100.00				
20	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	92.76	99.31	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.86	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.38		99.83				100.00				
21	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	93.25	98.48	100.00	100.00	99.97	100.00	98.68	100%	0.00	98.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.99	19.70	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.63		99.61				100.00				
22	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	93.16	98.36	100.00	100.00	100.00	100.00	98.65	100%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.97	19.67	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.58		99.59				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

23	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	93.99	97.72	100.00	99.92	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.80	9.77	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.91				100.00				
24	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	93.01	97.86	100.00	100.00	99.71	100.00	98.49	100%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	19.57	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		99.39				100.00				
25	053	032	649771	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI	Nilai	100.00	91.31	99.04	100.00	100.00	99.02	100.00	98.41	100%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.81	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	95.66		99.51				100.00				
26	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.21	98.25	0.00	0.00	99.44	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	19.65	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.11		98.85				100.00				
27	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	89.76	100.00	100.00	100.00	98.85	100.00	98.35	100%	0.00	98.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	94.88		99.71				100.00				
28	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	94.29	97.91	97.33	100.00	98.80	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	19.58	9.73	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	97.15		98.51				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

29	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	94.05	99.58	0.00	0.00	96.28	100.00	78.65	80%	0.00	98.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.92	0.00	0.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	97.03		97.93				100.00				
30	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	88.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.21	100%	0.00	98.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.03		100.00				100.00				
31	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	90.90	97.65	100.00	100.00	100.00	100.00	98.17	100%	0.00	98.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	19.53	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.45		99.41				100.00				
32	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	92.59	96.14	100.00	100.00	99.61	100.00	98.08	100%	0.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	19.23	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	96.30		98.94				100.00				
33	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	91.88	96.60	99.43	100.00	100.00	100.00	98.05	100%	0.00	98.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	19.32	9.94	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		99.01				100.00				
34	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	92.35	97.45	100.00	100.00	96.82	100.00	98.02	100%	0.00	98.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.85	19.49	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	96.18		98.57				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	89.31	98.92	100.00	100.00	97.68	100.00	97.95	100%	0.00	97.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	19.78	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	94.66		99.15				100.00				
36	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	91.33	96.55	100.00	100.00	99.40	100.00	97.95	100%	0.00	97.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.31	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		98.99				100.00				
37	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	89.92	97.57	100.00	100.00	99.12	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.51	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.96		99.17				100.00				
38	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	92.08	95.54	100.00	99.61	100.00	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.81	19.11	10.00	9.96	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.04		98.79				100.00				
39	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	89.81	96.86	100.00	100.00	99.78	100.00	97.82	100%	0.00	97.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	19.37	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.91		99.16				100.00				
40	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	91.81	96.50	100.00	100.00	96.83	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.30	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	95.91		98.33				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	88.20	97.25	100.00	100.00	100.00	100.00	97.68	100%	0.00	97.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.23	19.45	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.10		99.31				100.00				
42	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	89.32	96.68	100.00	100.00	99.50	100.00	97.68	100%	0.00	97.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	19.34	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	94.66		99.04				100.00				
43	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	87.72	97.95	100.00	100.00	99.18	100.00	97.67	100%	0.00	97.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.16	19.59	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	93.86		99.28				100.00				
44	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	93.22	94.14	98.00	100.00	100.00	100.00	97.61	100%	0.00	97.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	18.83	9.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.61		98.04				100.00				
45	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	83.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.58	100%	0.00	97.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.58	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.93		100.00				100.00				
46	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	91.14	95.68	100.00	100.00	97.54	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	19.14	10.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	95.57		98.31				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

47	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	94.78	98.53	100.00	100.00	85.66	100.00	97.49	100%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.22	19.71	10.00	10.00	8.57	25.00				
					Nilai Aspek	97.39		96.05				100.00				
48	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.93	97.81	100.00	100.00	86.16	100.00	97.42	100%	0.00	97.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	19.56	10.00	10.00	8.62	25.00				
					Nilai Aspek	97.47		95.99				100.00				
49	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	86.50	100.00	100.00	100.00	94.47	100.00	97.42	100%	0.00	97.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	9.45	25.00				
					Nilai Aspek	93.25		98.62				100.00				
50	167	032	649568	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG	Nilai	100.00	89.84	99.13	0.00	0.00	95.98	100.00	77.90	80%	0.00	97.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.83	0.00	0.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		97.55				100.00				
51	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	90.75	95.30	100.00	100.00	96.75	100.00	97.35	100%	0.00	97.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.06	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	95.38		98.01				100.00				
52	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	86.21	100.00	0.00	0.00	99.20	100.00	77.85	80%	0.00	97.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	93.11		99.60				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

53	071	032	649814	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Nilai	100.00	88.56	99.10	0.00	0.00	97.31	100.00	77.84	80%	0.00	97.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.82	0.00	0.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	94.28		98.21				100.00				
54	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	84.75	99.37	97.00	100.00	99.25	100.00	97.21	100%	0.00	97.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.87	9.70	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	92.38		98.91				100.00				
55	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	89.23	94.26	100.00	100.00	99.21	100.00	97.16	100%	0.00	97.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.38	18.85	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	94.62		98.37				100.00				
56	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	92.15	96.00	92.00	100.00	99.34	100.00	97.16	100%	0.00	97.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.82	19.20	9.20	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	96.08		96.84				100.00				
57	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	84.30	97.09	100.00	100.00	100.00	100.00	97.06	100%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.65	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.15		99.27				100.00				
58	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.88	98.55	92.00	100.00	98.18	100.00	97.06	100%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.71	9.20	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.44		97.18				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

59	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	84.81	98.69	100.00	100.00	95.84	100.00	97.04	100%	0.00	97.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	19.74	10.00	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	92.41		98.63				100.00				
60	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	90.44	95.67	96.00	97.92	99.41	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.57	19.13	9.60	9.79	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.22		97.25				100.00				
61	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	88.38	95.86	100.00	100.00	95.40	100.00	96.97	100%	0.00	96.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.17	10.00	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		97.82				100.00				
62	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	90.87	95.40	92.00	100.00	99.18	100.00	96.83	100%	0.00	96.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.63	19.08	9.20	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	95.44		96.65				100.00				
63	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	79.08	99.48	100.00	100.00	100.00	100.00	96.76	100%	0.00	96.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.86	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.54		99.87				100.00				
64	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	91.88	94.53	100.00	100.00	90.56	100.00	96.74	100%	0.00	96.74
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	18.91	10.00	10.00	9.06	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		96.27				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

65	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	90.79	99.42	100.00	100.00	81.72	100.00	96.67	100%	0.00	96.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	19.88	10.00	10.00	8.17	25.00				
					Nilai Aspek	95.40		95.29				100.00				
66	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBANGAN	Nilai	100.00	88.86	96.17	94.00	100.00	96.96	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.23	9.40	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		96.78				100.00				
67	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	83.45	97.50	100.00	100.00	95.83	100.00	96.60	100%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.50	10.00	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	91.73		98.33				100.00				
68	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	82.50	98.40	100.00	100.00	94.75	100.00	96.53	100%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.38	19.68	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	91.25		98.29				100.00				
69	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	86.59	93.72	100.00	100.00	97.98	100.00	96.53	100%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	18.74	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		97.92				100.00				
70	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	90.57	92.69	100.00	100.00	93.37	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.59	18.54	10.00	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	95.29		96.51				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

71	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	81.27	98.58	100.00	100.00	95.57	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	19.72	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	90.64		98.54				100.00				
72	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	80.52	99.59	94.67	100.00	99.78	100.00	96.44	100%	0.00	96.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.08	19.92	9.47	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	90.26		98.51				100.00				
73	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	88.62	96.26	100.00	100.00	98.69	100.00	97.41	100%	1.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.25	10.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	94.31		98.74				100.00				
74	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	92.93	89.77	98.67	100.00	95.96	100.00	96.36	100%	0.00	96.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	17.95	9.87	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	96.47		96.10				100.00				
75	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	85.91	98.39	100.00	100.00	94.63	96.67	96.19	100%	0.00	96.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.89	19.68	10.00	10.00	9.46	24.17				
					Nilai Aspek	92.96		98.25				96.67				
76	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	81.29	97.33	99.00	100.00	96.33	100.00	96.19	100%	0.00	96.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	19.47	9.90	10.00	9.63	25.00				
					Nilai Aspek	90.65		98.16				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

77	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	78.59	100.00	96.88	100.00	96.98	100.00	96.17	100%	0.00	96.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	20.00	9.69	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	89.30		98.46				100.00				
78	009	032	649640	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	90.89	95.45	0.00	0.00	91.76	100.00	76.90	80%	0.00	96.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.63	19.09	0.00	0.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	95.45		93.61				100.00				
79	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	86.62	96.65	92.00	100.00	95.79	100.00	96.10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	19.33	9.20	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	93.31		96.11				100.00				
80	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	79.79	97.06	99.00	100.00	98.19	100.00	96.10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.97	19.41	9.90	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	89.90		98.56				100.00				
81	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	77.23	99.54	100.00	100.00	95.26	100.00	96.02	100%	0.00	96.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.58	19.91	10.00	10.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	88.62		98.70				100.00				
82	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	74.48	100.00	100.00	100.00	98.34	100.00	96.01	100%	0.00	96.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	20.00	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	87.24		99.58				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

83	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	87.67	92.20	100.00	100.00	100.00	97.41	95.94	100%	0.00	95.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	18.44	10.00	10.00	10.00	24.35				
					Nilai Aspek	93.84		98.05				97.41				
84	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	91.34	92.91	92.00	100.00	94.30	100.00	95.91	100%	0.00	95.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	18.58	9.20	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		94.80				100.00				
85	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	75.82	98.16	99.00	100.00	100.00	100.00	95.91	100%	0.00	95.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.37	19.63	9.90	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.91		99.29				100.00				
86	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	85.66	96.27	0.00	0.00	96.17	100.00	76.72	80%	0.00	95.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	19.25	0.00	0.00	9.62	25.00				
					Nilai Aspek	92.83		96.22				100.00				
87	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	89.81	95.80	100.00	100.00	82.06	100.00	95.84	100%	0.00	95.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.47	19.16	10.00	10.00	8.21	25.00				
					Nilai Aspek	94.91		94.46				100.00				
88	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	86.92	93.34	0.00	0.00	99.59	100.00	76.67	80%	0.00	95.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	18.67	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		96.47				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

89	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	87.46	92.12	95.43	98.90	98.47	100.00	95.82	100%	0.00	95.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	18.42	9.54	9.89	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	93.73		96.23				100.00				
90	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	90.72	99.58	84.45	100.00	88.52	100.00	95.82	100%	0.00	95.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.92	8.45	10.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	95.36		93.14				100.00				
91	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	84.42	95.02	0.00	0.00	99.82	100.00	76.65	80%	0.00	95.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.66	19.00	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.21		97.42				100.00				
92	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	82.02	96.66	0.00	0.00	99.66	100.00	76.60	80%	0.00	95.75
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	19.33	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	91.01		98.16				100.00				
93	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	86.94	92.34	92.63	100.00	99.31	100.00	95.70	100%	0.00	95.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	18.47	9.26	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	93.47		96.07				100.00				
94	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	85.21	89.04	100.00	100.00	100.00	99.89	95.56	100%	0.00	95.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	17.81	10.00	10.00	10.00	24.97				
					Nilai Aspek	92.61		97.26				99.89				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

95	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	84.78	94.30	100.00	100.00	89.83	100.00	95.56	100%	0.00	95.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	18.86	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		96.03				100.00				
96	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	87.60	90.07	94.00	100.00	99.35	100.00	95.49	100%	0.00	95.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.14	18.01	9.40	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	93.80		95.86				100.00				
97	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	82.43	93.42	98.00	100.00	0.00	100.00	85.85	90%	0.00	95.39
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.36	18.68	9.80	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.22		97.14				100.00				
98	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	86.89	92.67	98.67	100.00	89.49	100.00	95.38	100%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	18.53	9.87	10.00	8.95	25.00				
					Nilai Aspek	93.45		95.21				100.00				
99	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	86.60	90.56	98.00	100.00	94.02	100.00	95.30	100%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.99	18.11	9.80	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.30		95.64				100.00				
100	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	75.79	97.98	100.00	100.00	92.84	100.00	95.25	100%	0.00	95.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.37	19.60	10.00	10.00	9.28	25.00				
					Nilai Aspek	87.90		97.71				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

101	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	80.00	84.67	97.75	100.00	100.00	100.00	100.00	95.25	100%	0.00	95.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.70	19.55	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.34		99.44				100.00				
102	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	82.91	98.35	99.00	100.00	91.51	96.32	95.24	100%	0.00	95.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.44	19.67	9.90	10.00	9.15	24.08				
					Nilai Aspek	91.46		97.22				96.32				
103	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	85.68	94.66	94.00	100.00	100.00	100.00	96.18	100%	1.00	95.18
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	18.93	9.40	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.84		97.17				100.00				
104	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	86.41	91.05	0.00	0.00	98.98	100.00	76.07	80%	0.00	95.09
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.96	18.21	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	93.21		95.02				100.00				
105	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	88.61	96.11	100.00	81.82	93.30	100.00	95.03	100%	0.00	95.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.22	10.00	8.18	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	94.31		92.81				100.00				
106	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.11	93.04	100.00	100.00	93.61	100.00	94.99	100%	0.00	94.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.02	18.61	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	90.06		96.66				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

107	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	84.65	96.23	96.00	96.67	87.67	100.00	94.98	100%	0.00	94.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.70	19.25	9.60	9.67	8.77	25.00				
					Nilai Aspek	92.33		94.14				100.00				
108	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.07	94.18	95.00	100.00	88.43	100.00	94.94	100%	0.00	94.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.76	18.84	9.50	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.54		94.40				100.00				
109	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	81.35	93.65	0.00	0.00	100.00	100.00	75.93	80%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	18.73	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		96.83				100.00				
110	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	79.43	94.91	0.00	0.00	99.68	100.00	75.86	80%	0.00	94.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	18.98	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		97.29				100.00				
111	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.67	96.30	100.00	100.00	93.40	100.00	94.80	100%	0.00	94.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.20	19.26	10.00	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	87.34		97.42				100.00				
112	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.32	82.65	100.00	100.00	93.88	100.00	94.77	100%	0.00	94.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.85	16.53	10.00	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek	96.16		94.13				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

113	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	86.86	96.20	100.00	100.00	82.96	96.81	94.77	100%	0.00	94.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.24	10.00	10.00	8.30	24.20				
					Nilai Aspek	93.43		94.79				96.81				
114	103	032	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAU- BAU	Nilai	100.00	78.65	94.21	100.00	100.00	90.84	100.00	94.72	100%	0.00	94.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	18.84	10.00	10.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	89.33		96.26				100.00				
115	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	73.16	98.83	92.00	100.00	97.56	100.00	94.70	100%	0.00	94.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.97	19.77	9.20	10.00	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	86.58		97.10				100.00				
116	127	032	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Nilai	100.00	81.84	97.78	92.00	100.00	84.07	100.00	94.44	100%	0.00	94.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	19.56	9.20	10.00	8.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		93.46				100.00				
117	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	78.88	93.46	0.00	0.00	100.00	100.00	75.52	80%	0.00	94.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.83	18.69	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.44		96.73				100.00				
118	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	87.57	90.57	100.00	100.00	99.98	92.41	94.35	100%	0.00	94.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.14	18.11	10.00	10.00	10.00	23.10				
					Nilai Aspek	93.79		97.64				92.41				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

119	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	89.71	86.81	94.00	100.00	94.19	98.76	94.33	100%	0.00	94.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	17.36	9.40	10.00	9.42	24.69				
					Nilai Aspek	94.86		93.75				98.76				
120	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	79.10	96.26	98.13	100.00	94.03	95.88	94.30	100%	0.00	94.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.25	9.81	10.00	9.40	23.97				
					Nilai Aspek	89.55		97.11				95.88				
121	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	80.77	88.29	94.80	100.00	98.78	100.00	94.13	100%	0.00	94.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.12	17.66	9.48	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	90.39		95.47				100.00				
122	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	75.24	91.47	100.00	100.00	95.53	100.00	94.13	100%	0.00	94.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.29	18.29	10.00	10.00	9.55	25.00				
					Nilai Aspek	87.62		96.75				100.00				
123	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	80.96	89.99	100.00	100.00	89.58	100.00	94.10	100%	0.00	94.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.14	18.00	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	90.48		94.89				100.00				
124	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	76.74	95.30	0.00	0.00	96.72	100.00	75.24	80%	0.00	94.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.51	19.06	0.00	0.00	9.67	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		96.01				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

125	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	75.62	94.38	100.00	100.00	87.20	100.00	93.94	100%	0.00	93.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.34	18.88	10.00	10.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	87.81		95.40				100.00				
126	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	74.71	96.77	97.00	100.00	86.53	100.00	93.91	100%	0.00	93.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.21	19.35	9.70	10.00	8.65	25.00				
					Nilai Aspek	87.36		95.07				100.00				
127	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	61.72	98.11	100.00	100.00	100.00	100.00	93.88	100%	0.00	93.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.26	19.62	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.86		99.53				100.00				
128	083	032	649800	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA	Nilai	100.00	76.78	98.86	0.00	100.00	81.66	100.00	84.45	90%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.52	19.77	0.00	10.00	8.17	25.00				
					Nilai Aspek	88.39		93.51				100.00				
129	076	032	649746	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN	Nilai	100.00	77.39	92.27	0.00	0.00	100.00	100.00	75.06	80%	0.00	93.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.61	18.45	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.70		96.14				100.00				
130	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	85.75	84.12	96.00	100.00	94.31	100.00	93.72	100%	0.00	93.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.86	16.82	9.60	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	92.88		93.61				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

131	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	73.20	99.54	96.57	100.00	81.62	100.00	93.71	100%	0.00	93.71
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.98	19.91	9.66	10.00	8.16	25.00				
					Nilai Aspek	86.60		94.43				100.00				
132	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	68.34	91.94	100.00	100.00	100.00	100.00	93.64	100%	0.00	93.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	18.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.17		97.99				100.00				
133	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	72.60	98.12	94.40	99.15	97.63	100.00	94.63	100%	1.00	93.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.89	19.62	9.44	9.92	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	86.30		97.32				100.00				
134	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	68.36	95.08	95.10	100.00	98.39	100.00	93.62	100%	0.00	93.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	19.02	9.51	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	84.18		97.14				100.00				
135	135	032	649788	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II	Nilai	100.00	71.60	89.38	100.00	100.00	99.64	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.74	17.88	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	85.80		97.26				100.00				
136	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	72.27	95.78	0.00	0.00	98.14	100.00	74.81	80%	0.00	93.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.84	19.16	0.00	0.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	86.14		96.96				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

137	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	74.89	86.00	100.00	100.00	99.86	100.00	93.42	100%	0.00	93.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.23	17.20	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	87.45		96.46				100.00				
138	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	71.99	95.31	100.00	100.00	84.76	100.00	93.34	100%	0.00	93.34
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.80	19.06	10.00	10.00	8.48	25.00				
					Nilai Aspek	86.00		95.02				100.00				
139	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	71.85	93.79	97.33	100.00	100.00	100.00	94.27	100%	1.00	93.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.78	18.76	9.73	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.93		97.78				100.00				
140	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.10	94.65	92.67	100.00	97.87	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.22	18.93	9.27	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	84.05		96.30				100.00				
141	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	72.14	93.35	0.00	0.00	99.60	100.00	74.45	80%	0.00	93.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.82	18.67	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	86.07		96.48				100.00				
142	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	85.20	92.35	94.00	100.00	70.82	100.00	92.73	100%	0.00	92.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	18.47	9.40	10.00	7.08	25.00				
					Nilai Aspek	92.60		89.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	75.12	90.34	0.00	0.00	96.66	100.00	74.00	80%	0.00	92.50
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.27	18.07	0.00	0.00	9.67	25.00				
					Nilai Aspek	87.56		93.50				100.00				
144	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	80.00	84.22	93.37	96.00	96.92	95.83	100.00	93.18	100%	0.75	92.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.63	18.67	9.60	9.69	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	82.11		95.53				100.00				
145	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	66.87	95.80	100.00	100.00	81.96	100.00	92.39	100%	0.00	92.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.03	19.16	10.00	10.00	8.20	25.00				
					Nilai Aspek	83.44		94.44				100.00				
146	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	64.99	96.60	100.00	100.00	82.14	100.00	92.28	100%	0.00	92.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.75	19.32	10.00	10.00	8.21	25.00				
					Nilai Aspek	82.50		94.68				100.00				
147	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	68.37	0.00	0.00	100.00	100.00	73.67	80%	0.00	92.09
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.67	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		84.19				100.00				
148	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	88.07	77.12	0.00	0.00	99.59	100.00	73.59	80%	0.00	91.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	15.42	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	94.04		88.36				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

149	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.76	83.00	92.44	100.00	98.91	100.00	92.55	100%	0.75	91.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.81	16.60	9.24	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	89.38		93.59				100.00				
150	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	69.22	89.34	0.00	0.00	99.58	100.00	73.21	80%	0.00	91.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.38	17.87	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	84.61		94.46				100.00				
151	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	74.42	89.00	92.33	100.00	82.97	100.00	91.49	100%	0.00	91.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	17.80	9.23	10.00	8.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		91.08				100.00				
152	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	88.08	75.00	0.00	0.00	99.68	100.00	73.18	80%	0.00	91.48
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	15.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.04		87.34				100.00				
153	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	90.46	72.62	0.00	0.00	99.90	100.00	73.08	80%	0.00	91.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.57	14.52	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	95.23		86.26				100.00				
154	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	74.43	84.09	100.00	100.00	99.21	93.64	91.31	100%	0.00	91.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	16.82	10.00	10.00	9.92	23.41				
					Nilai Aspek	87.22		95.83				93.64				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

155	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.46	83.86	96.00	100.00	84.23	100.00	91.26	100%	0.00	91.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	16.77	9.60	10.00	8.42	25.00				
					Nilai Aspek	88.23		91.02				100.00				
156	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	76.19	92.78	92.00	100.00	0.00	92.86	63.84	70%	0.00	91.21
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.43	0.00	9.20	10.00	0.00	23.22				
					Nilai Aspek	88.10		100.00				92.86				
157	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	80.00	70.16	89.53	99.30	99.55	96.75	100.00	90.99	100%	0.00	90.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	10.52	17.91	9.93	9.96	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	75.08		96.28				100.00				
158	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	67.79	92.35	92.34	99.38	94.68	97.60	91.68	100%	0.75	90.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.17	18.47	9.23	9.94	9.47	24.40				
					Nilai Aspek	83.90		94.69				97.60				
159	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	69.78	90.81	0.00	0.00	0.00	100.00	63.63	70%	0.00	90.90
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.47	18.16	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.89		90.81				100.00				
160	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	86.56	73.40	0.00	0.00	100.00	100.00	72.66	80%	0.00	90.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	14.68	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.28		86.70				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

161	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	80.00	87.15	88.25	95.33	94.64	90.58	99.17	91.57	100%	1.00	90.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	13.07	17.65	9.53	9.46	9.06	24.79				
					Nilai Aspek	83.58		92.20				99.17				
162	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	83.95	71.69	0.00	0.00	99.52	100.00	71.88	80%	0.00	89.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.59	14.34	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	91.98		85.61				100.00				
163	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	75.04	87.75	94.00	90.00	90.75	93.64	89.69	100%	0.00	89.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.26	17.55	9.40	9.00	9.07	23.41				
					Nilai Aspek	87.52		90.62				93.64				
164	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	55.91	91.01	0.00	0.00	99.86	100.00	71.57	80%	0.00	89.47
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.39	18.20	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	77.96		95.44				100.00				
165	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	73.84	80.51	0.00	0.00	93.67	100.00	71.55	80%	0.00	89.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.08	16.10	0.00	0.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	86.92		87.09				100.00				
166	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	80.00	83.50	83.03	92.35	92.42	93.20	100.00	89.93	100%	0.75	89.18
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.53	16.61	9.24	9.24	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.75		90.25				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

167	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	64.31	89.08	0.00	0.00	88.51	100.00	71.31	80%	0.00	89.14
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.65	17.82	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	82.16		88.80				100.00				
168	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	64.14	88.83	0.00	0.00	0.00	100.00	62.39	70%	0.00	89.12
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.62	17.77	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.07		88.83				100.00				
169	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	60.54	74.70	100.00	100.00	100.00	100.00	89.02	100%	0.00	89.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.08	14.94	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.27		93.68				100.00				
170	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	37.31	97.60	96.62	99.64	92.31	100.00	88.97	100%	0.00	88.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.60	19.52	9.66	9.96	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	68.66		96.54				100.00				
171	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	71.69	77.00	0.00	0.00	97.68	100.00	70.92	80%	0.00	88.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.75	15.40	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	85.85		87.34				100.00				
172	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	75.79	71.97	0.00	0.00	100.00	100.00	70.76	80%	0.00	88.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.37	14.39	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.90		85.99				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

173	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	77.48	70.50	0.00	0.00	100.00	100.00	70.72	80%	0.00	88.40
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.62	14.10	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.74		85.25				100.00				
174	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	59.50	75.30	98.67	100.00	97.85	99.06	88.40	100%	0.00	88.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.93	15.06	9.87	10.00	9.79	24.76				
					Nilai Aspek	79.75		92.96				99.06				
175	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	79.91	74.00	0.00	0.00	0.00	100.00	61.79	70%	0.00	88.27
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.99	14.80	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.96		74.00				100.00				
176	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	83.49	65.96	0.00	0.00	97.82	100.00	70.50	80%	0.00	88.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	13.19	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	91.75		81.89				100.00				
177	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	73.56	70.67	0.00	0.00	100.00	100.00	70.17	80%	0.00	87.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.03	14.13	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.78		85.34				100.00				
178	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	60.55	73.58	95.20	100.00	93.12	99.87	87.60	100%	0.00	87.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.08	14.72	9.52	10.00	9.31	24.97				
					Nilai Aspek	80.28		90.47				99.87				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

179	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	74.72	68.77	0.00	0.00	100.00	100.00	69.96	80%	0.00	87.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.21	13.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.36		84.39				100.00				
180	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	60.00	86.06	0.00	0.00	0.00	100.00	61.21	70%	0.00	87.45
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.00	17.21	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.00		86.06				100.00				
181	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	90.91	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	78.64	90%	0.00	87.37
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	10.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		83.33				100.00				
182	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	66.29	62.43	100.00	100.00	97.97	100.00	87.23	100%	0.00	87.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.94	12.49	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	83.15		90.10				100.00				
183	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	71.24	69.17	0.00	0.00	100.00	100.00	69.52	80%	0.00	86.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.69	13.83	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.62		84.59				100.00				
184	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	66.43	72.69	0.00	0.00	99.78	100.00	69.48	80%	0.00	86.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.96	14.54	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	83.22		86.24				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

185	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	62.35	60.55	100.00	100.00	100.00	100.00	86.46	100%	0.00	86.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.35	12.11	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.18		90.14				100.00				
186	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	69.38	78.39	0.00	0.00	0.00	97.50	60.46	70%	0.00	86.37
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	15.68	0.00	0.00	0.00	24.38				
					Nilai Aspek	84.69		78.39				97.50				
187	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	94.11	50.00	0.00	0.00	99.56	100.00	69.07	80%	0.00	86.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.12	10.00	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	97.06		74.78				100.00				
188	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.64	81.82	100.00	100.00	73.45	100.00	86.31	100%	0.00	86.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.60	16.36	10.00	10.00	7.35	25.00				
					Nilai Aspek	75.32		88.82				100.00				
189	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	71.43	76.48	0.00	0.00	99.61	92.22	69.03	80%	0.00	86.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.71	15.30	0.00	0.00	9.96	23.06				
					Nilai Aspek	85.72		88.05				92.22				
190	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	72.89	69.19	0.00	0.00	91.39	100.00	68.91	80%	0.00	86.14
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.93	13.84	0.00	0.00	9.14	25.00				
					Nilai Aspek	86.45		80.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

191	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	66.70	68.90	0.00	0.00	100.00	100.00	68.79	80%	0.00	85.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.01	13.78	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.35		84.45				100.00				
192	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	70.83	65.79	0.00	0.00	99.56	100.00	68.74	80%	0.00	85.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.62	13.16	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	85.42		82.68				100.00				
193	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	90.91	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	68.64	80%	0.00	85.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		75.00				100.00				
194	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	62.60	71.22	0.00	0.00	100.00	100.00	68.63	80%	0.00	85.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.39	14.24	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.30		85.61				100.00				
195	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	77.45	65.74	0.00	0.00	88.52	100.00	68.62	80%	0.00	85.77
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.62	13.15	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	88.73		77.13				100.00				
196	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	64.61	69.81	0.00	0.00	99.51	100.00	68.60	80%	0.00	85.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.69	13.96	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	82.31		84.66				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

197	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	73.42	65.19	0.00	0.00	95.22	100.00	68.57	80%	0.00	85.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.01	13.04	0.00	0.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	86.71		80.21				100.00				
198	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	50.00	76.21	80.95	94.00	99.24	100.00	98.89	86.67	100%	1.00	85.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	5.00	11.43	16.19	9.40	9.92	10.00	24.72				
					Nilai Aspek	63.11		93.55				98.89				
199	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	80.28	65.16	0.00	0.00	84.11	100.00	68.49	80%	0.00	85.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.04	13.03	0.00	0.00	8.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.14		74.64				100.00				
200	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	45.45	100.00	0.00	0.00	66.28	100.00	68.45	80%	0.00	85.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.82	20.00	0.00	0.00	6.63	25.00				
					Nilai Aspek	72.73		83.14				100.00				
201	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	48.05	81.56	0.00	0.00	99.24	100.00	68.44	80%	0.00	85.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.21	16.31	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	74.03		90.40				100.00				
202	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	61.81	70.43	0.00	0.00	100.00	100.00	68.36	80%	0.00	85.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.27	14.09	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.91		85.22				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

203	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	46.48	67.29	100.00	100.00	100.00	100.00	85.43	100%	0.00	85.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.97	13.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.24		91.82				100.00				
204	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	73.75	69.72	0.00	0.00	83.34	100.00	68.34	80%	0.00	85.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.06	13.94	0.00	0.00	8.33	25.00				
					Nilai Aspek	86.88		76.53				100.00				
205	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	42.97	68.99	100.00	100.00	100.00	100.00	85.24	100%	0.00	85.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.45	13.80	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	71.49		92.25				100.00				
206	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	54.56	75.00	0.00	0.00	99.87	100.00	68.17	80%	0.00	85.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	15.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		87.44				100.00				
207	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	64.06	67.70	0.00	0.00	100.00	100.00	68.15	80%	0.00	85.19
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.61	13.54	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.03		83.85				100.00				
208	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	62.38	69.35	0.00	0.00	99.17	100.00	68.14	80%	0.00	85.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.36	13.87	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	81.19		84.26				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

209	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	52.43	75.00	0.00	0.00	99.49	100.00	67.81	80%	0.00	84.77
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.86	15.00	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	76.22		87.25				100.00				
210	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	54.01	75.00	0.00	0.00	92.81	100.00	67.38	80%	0.00	84.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.10	15.00	0.00	0.00	9.28	25.00				
					Nilai Aspek	77.01		83.91				100.00				
211	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	65.13	63.01	0.00	0.00	100.00	100.00	67.37	80%	0.00	84.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.77	12.60	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.57		81.51				100.00				
212	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	55.22	83.34	0.00	0.00	93.26	92.22	67.33	80%	0.00	84.17
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.28	16.67	0.00	0.00	9.33	23.06				
					Nilai Aspek	77.61		88.30				92.22				
213	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	64.19	71.95	0.00	0.00	0.00	99.49	58.89	70%	0.00	84.13
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.63	14.39	0.00	0.00	0.00	24.87				
					Nilai Aspek	82.10		71.95				99.49				
214	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	37.49	67.53	100.00	100.00	99.84	100.00	84.11	100%	0.00	84.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.62	13.51	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	68.75		91.84				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

215	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	49.54	73.72	0.00	0.00	100.00	100.00	67.18	80%	0.00	83.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.43	14.74	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.77		86.86				100.00				
216	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	52.13	79.37	0.00	0.00	0.00	100.00	58.69	70%	0.00	83.85
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.82	15.87	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.07		79.37				100.00				
217	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	37.06	82.98	0.00	0.00	99.11	100.00	67.07	80%	0.00	83.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.56	16.60	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	68.53		91.05				100.00				
218	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	52.49	71.13	0.00	0.00	98.73	100.00	66.97	80%	0.00	83.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.87	14.23	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	76.25		84.93				100.00				
219	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.04	74.59	0.00	0.00	95.00	100.00	66.92	80%	0.00	83.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.51	14.92	0.00	0.00	9.50	25.00				
					Nilai Aspek	75.02		84.80				100.00				
220	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	65.61	62.00	0.00	0.00	95.83	100.00	66.82	80%	0.00	83.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.84	12.40	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	82.81		78.92				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

221	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	48.00	73.85	0.00	0.00	98.19	100.00	66.79	80%	0.00	83.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.20	14.77	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	74.00		86.02				100.00				
222	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	54.04	68.28	0.00	0.00	100.00	100.00	66.76	80%	0.00	83.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.11	13.66	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.02		84.14				100.00				
223	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.50	70.93	0.00	0.00	100.00	100.00	66.76	80%	0.00	83.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.58	14.19	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.25		85.47				100.00				
224	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	64.36	71.62	0.00	0.00	76.86	100.00	66.66	80%	0.00	83.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.65	14.32	0.00	0.00	7.69	25.00				
					Nilai Aspek	82.18		74.24				100.00				
225	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	46.03	80.05	100.00	100.00	99.64	81.55	83.27	100%	0.00	83.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.90	16.01	10.00	10.00	9.96	20.39				
					Nilai Aspek	73.02		94.92				81.55				
226	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.58	69.33	0.00	0.00	99.89	100.00	66.44	80%	0.00	83.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.59	13.87	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	75.29		84.61				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

227	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.32	61.96	0.00	0.00	99.53	100.00	66.39	80%	0.00	82.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.05	12.39	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	80.16		80.75				100.00				
228	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.12	69.20	0.00	0.00	100.00	100.00	66.36	80%	0.00	82.95
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.52	13.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.06		84.60				100.00				
229	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	60.69	64.05	0.00	0.00	93.78	100.00	66.29	80%	0.00	82.86
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.10	12.81	0.00	0.00	9.38	25.00				
					Nilai Aspek	80.35		78.92				100.00				
230	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.02	79.63	0.00	0.00	62.95	100.00	66.22	80%	0.00	82.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.00	15.93	0.00	0.00	6.30	25.00				
					Nilai Aspek	80.01		71.29				100.00				
231	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	63.77	66.59	0.00	0.00	0.00	100.00	57.88	70%	0.00	82.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.57	13.32	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.89		66.59				100.00				
232	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	57.74	62.19	0.00	0.00	99.98	100.00	66.10	80%	0.00	82.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.66	12.44	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	78.87		81.09				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

233	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	46.09	70.87	0.00	0.00	100.00	100.00	66.09	80%	0.00	82.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.91	14.17	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.05		85.44				100.00				
234	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	37.46	91.96	0.00	0.00	70.10	100.00	66.02	80%	0.00	82.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.62	18.39	0.00	0.00	7.01	25.00				
					Nilai Aspek	68.73		81.03				100.00				
235	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	47.79	69.89	0.00	0.00	97.58	100.00	65.90	80%	0.00	82.38
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.17	13.98	0.00	0.00	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	73.90		83.74				100.00				
236	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	44.71	70.93	0.00	0.00	100.00	100.00	65.89	80%	0.00	82.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.71	14.19	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	72.36		85.47				100.00				
237	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	41.57	72.29	0.00	0.00	100.00	100.00	65.69	80%	0.00	82.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.24	14.46	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.79		86.15				100.00				
238	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	53.65	63.38	0.00	0.00	99.58	100.00	65.68	80%	0.00	82.10
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.05	12.68	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	76.83		81.48				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

239	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	37.15	75.83	0.00	0.00	98.90	100.00	65.63	80%	0.00	82.04
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.57	15.17	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	68.58		87.37				100.00				
240	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	44.22	70.03	0.00	0.00	99.78	100.00	65.62	80%	0.00	82.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.63	14.01	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	72.11		84.91				100.00				
241	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	35.57	81.48	0.00	0.00	89.65	100.00	65.60	80%	0.00	82.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.34	16.30	0.00	0.00	8.97	25.00				
					Nilai Aspek	67.79		85.57				100.00				
242	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	69.40	57.95	0.00	0.00	85.51	100.00	65.55	80%	0.00	81.94
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	11.59	0.00	0.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	84.70		71.73				100.00				
243	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	45.64	77.87	0.00	0.00	80.26	100.00	65.45	80%	0.00	81.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.85	15.57	0.00	0.00	8.03	25.00				
					Nilai Aspek	72.82		79.07				100.00				
244	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	31.96	88.57	0.00	0.00	78.71	100.00	65.38	80%	0.00	81.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.79	17.71	0.00	0.00	7.87	25.00				
					Nilai Aspek	65.98		83.64				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

245	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	39.42	72.10	0.00	0.00	100.00	100.00	65.33	80%	0.00	81.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.91	14.42	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	69.71		86.05				100.00				
246	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	47.30	75.32	0.00	0.00	0.00	100.00	57.16	70%	0.00	81.66
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.10	15.06	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.65		75.32				100.00				
247	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	46.07	67.01	0.00	0.00	100.00	100.00	65.31	80%	0.00	81.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.91	13.40	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.04		83.51				100.00				
248	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	43.57	68.93	0.00	0.00	99.36	100.00	65.26	80%	0.00	81.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.54	13.79	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	71.79		84.15				100.00				
249	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.17	56.26	0.00	0.00	99.45	100.00	65.22	80%	0.00	81.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.03	11.25	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	80.09		77.86				100.00				
250	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	35.95	74.41	0.00	0.00	99.43	100.00	65.22	80%	0.00	81.52
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.39	14.88	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	67.98		86.92				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

251	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	58.05	61.62	0.00	0.00	91.11	100.00	65.14	80%	0.00	81.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.71	12.32	0.00	0.00	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	79.03		76.37				100.00				
252	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	52.06	60.92	0.00	0.00	100.00	100.00	64.99	80%	0.00	81.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.81	12.18	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.03		80.46				100.00				
253	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	45.62	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56.84	70%	0.00	81.20
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.84	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	72.81		75.00				100.00				
254	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	54.78	58.18	0.00	0.00	100.00	100.00	64.85	80%	0.00	81.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.64	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.39		79.09				100.00				
255	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	43.69	65.48	0.00	0.00	100.00	100.00	64.65	80%	0.00	80.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.55	13.10	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	71.85		82.74				100.00				
256	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	54.55	75.00	0.00	0.00	64.46	100.00	64.63	80%	0.00	80.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	15.00	0.00	0.00	6.45	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		69.73				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

257	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	36.95	72.99	0.00	0.00	94.66	100.00	64.61	80%	0.00	80.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	14.60	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	68.48		83.83				100.00				
258	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	36.76	72.90	0.00	0.00	95.00	100.00	64.59	80%	0.00	80.74
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.51	14.58	0.00	0.00	9.50	25.00				
					Nilai Aspek	68.38		83.95				100.00				
259	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	37.89	71.88	0.00	0.00	94.68	100.00	64.53	80%	0.00	80.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.68	14.38	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	68.95		83.28				100.00				
260	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	42.68	72.22	0.00	0.00	86.69	100.00	64.52	80%	0.00	80.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.40	14.44	0.00	0.00	8.67	25.00				
					Nilai Aspek	71.34		79.46				100.00				
261	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	40.07	70.46	0.00	0.00	93.33	100.00	64.44	80%	0.00	80.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.01	14.09	0.00	0.00	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	70.04		81.90				100.00				
262	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	38.60	73.67	0.00	0.00	88.93	100.00	64.42	80%	0.00	80.52
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.79	14.73	0.00	0.00	8.89	25.00				
					Nilai Aspek	69.30		81.30				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

263	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	27.88	56.69	100.00	100.00	100.00	100.00	80.52	100%	0.00	80.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	11.34	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.94		89.17				100.00				
264	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	28.40	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	64.26	80%	0.00	80.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.26	15.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.20		87.50				100.00				
265	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	46.46	61.91	0.00	0.00	98.81	100.00	64.23	80%	0.00	80.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.97	12.38	0.00	0.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	73.23		80.36				100.00				
266	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	41.50	69.28	0.00	0.00	91.51	100.00	64.23	80%	0.00	80.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.23	13.86	0.00	0.00	9.15	25.00				
					Nilai Aspek	70.75		80.40				100.00				
267	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	32.33	71.79	0.00	0.00	100.00	100.00	64.21	80%	0.00	80.26
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.85	14.36	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.17		85.90				100.00				
268	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	42.23	73.18	0.00	0.00	82.01	100.00	64.17	80%	0.00	80.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.33	14.64	0.00	0.00	8.20	25.00				
					Nilai Aspek	71.12		77.60				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

269	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	35.30	72.25	0.00	0.00	92.63	100.00	64.01	80%	0.00	80.01
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.30	14.45	0.00	0.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	67.65		82.44				100.00				
270	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	36.77	67.33	0.00	0.00	100.00	100.00	63.98	80%	0.00	79.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.52	13.47	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.39		83.67				100.00				
271	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	49.94	63.52	0.00	0.00	87.17	100.00	63.91	80%	0.00	79.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.49	12.70	0.00	0.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	74.97		75.35				100.00				
272	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	36.89	72.59	0.00	0.00	88.52	100.00	63.90	80%	0.00	79.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.53	14.52	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	68.45		80.56				100.00				
273	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	30.29	71.81	0.00	0.00	100.00	100.00	63.91	80%	0.00	79.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.54	14.36	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.15		85.91				100.00				
274	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	41.96	62.95	0.00	0.00	100.00	100.00	63.88	80%	0.00	79.86
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.29	12.59	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	70.98		81.48				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	29.11	75.00	0.00	0.00	94.82	100.00	63.85	80%	0.00	79.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.37	15.00	0.00	0.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	64.56		84.91				100.00				
276	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	38.39	64.23	0.00	0.00	100.00	100.00	63.60	80%	0.00	79.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.76	12.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	69.20		82.12				100.00				
277	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	31.68	69.20	0.00	0.00	100.00	100.00	63.59	80%	0.00	79.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.75	13.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.84		84.60				100.00				
278	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	33.86	67.19	0.00	0.00	99.91	100.00	63.51	80%	0.00	79.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.08	13.44	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	66.93		83.55				100.00				
279	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	36.47	67.29	0.00	0.00	95.57	100.00	63.49	80%	0.00	79.36
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.47	13.46	0.00	0.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	68.24		81.43				100.00				
280	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	48.15	66.42	0.00	0.00	0.00	100.00	55.51	70%	0.00	79.30
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.22	13.28	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.08		66.42				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

281	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	51.22	76.14	100.00	100.00	96.22	66.85	79.25	100%	0.00	79.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.68	15.23	10.00	10.00	9.62	16.71				
					Nilai Aspek	75.61		93.09				66.85				
282	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	40.93	64.94	0.00	0.00	92.34	100.00	63.36	80%	0.00	79.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.14	12.99	0.00	0.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	70.47		78.64				100.00				
283	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	39.24	62.04	0.00	0.00	100.00	100.00	63.29	80%	0.00	79.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.89	12.41	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	69.62		81.02				100.00				
284	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	37.93	65.90	0.00	0.00	93.58	100.00	63.23	80%	0.00	79.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.69	13.18	0.00	0.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	68.97		79.74				100.00				
285	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	36.04	68.35	0.00	0.00	91.22	100.00	63.20	80%	0.00	79.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.41	13.67	0.00	0.00	9.12	25.00				
					Nilai Aspek	68.02		79.79				100.00				
286	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	71.32	66.87	0.00	0.00	84.86	82.50	63.18	80%	0.00	78.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.70	13.37	0.00	0.00	8.49	20.63				
					Nilai Aspek	85.66		75.87				82.50				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	35.37	64.34	0.00	0.00	100.00	100.00	63.17	80%	0.00	78.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.31	12.87	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.69		82.17				100.00				
288	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	34.22	64.84	0.00	0.00	100.00	100.00	63.10	80%	0.00	78.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.13	12.97	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.11		82.42				100.00				
289	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	35.17	64.28	0.00	0.00	99.72	100.00	63.10	80%	0.00	78.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.28	12.86	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	67.59		82.00				100.00				
290	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	48.34	64.57	0.00	0.00	0.00	100.00	55.17	70%	0.00	78.81
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.25	12.91	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.17		64.57				100.00				
291	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	35.19	74.16	0.00	0.00	0.00	100.00	55.11	70%	0.00	78.73
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.28	14.83	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.60		74.16				100.00				
292	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	27.59	69.98	0.00	0.00	98.40	100.00	62.97	80%	0.00	78.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.14	14.00	0.00	0.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	63.80		84.19				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

293	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	46.17	55.22	0.00	0.00	99.96	100.00	62.97	80%	0.00	78.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.93	11.04	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	73.09		77.59				100.00				
294	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	36.75	65.39	0.00	0.00	93.54	100.00	62.94	80%	0.00	78.68
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.51	13.08	0.00	0.00	9.35	25.00				
					Nilai Aspek	68.38		79.47				100.00				
295	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	25.99	69.82	0.00	0.00	100.00	100.00	62.86	80%	0.00	78.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.90	13.96	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.00		84.91				100.00				
296	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	56.86	57.27	0.00	0.00	0.00	100.00	54.98	70%	0.00	78.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.53	11.45	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	78.43		57.27				100.00				
297	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	18.93	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	62.84	80%	0.00	78.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.84	15.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	59.47		87.50				100.00				
298	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	19.83	74.02	0.00	0.00	100.00	100.00	62.78	80%	0.00	78.47
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.97	14.80	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	59.92		87.01				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

299	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	25.03	69.86	0.00	0.00	99.98	100.00	62.72	80%	0.00	78.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.75	13.97	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	62.52		84.92				100.00				
300	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	32.26	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.84	70%	0.00	78.34
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.84	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.13		75.00				100.00				
301	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	30.73	65.22	0.00	0.00	100.00	100.00	62.65	80%	0.00	78.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.61	13.04	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.37		82.61				100.00				
302	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	32.33	63.90	0.00	0.00	99.85	100.00	62.61	80%	0.00	78.27
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.85	12.78	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	66.17		81.87				100.00				
303	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	29.39	65.78	0.00	0.00	100.00	100.00	62.56	80%	0.00	78.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.41	13.16	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.70		82.89				100.00				
304	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	45.77	55.39	0.00	0.00	95.99	100.00	62.54	80%	0.00	78.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.87	11.08	0.00	0.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	72.89		75.69				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

305	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	48.83	61.91	0.00	0.00	0.00	100.00	54.71	70%	0.00	78.15
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.32	12.38	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.42		61.91				100.00				
306	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	24.98	75.00	0.00	0.00	87.43	100.00	62.49	80%	0.00	78.11
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.75	15.00	0.00	0.00	8.74	25.00				
					Nilai Aspek	62.49		81.22				100.00				
307	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	33.59	62.61	0.00	0.00	98.96	100.00	62.46	80%	0.00	78.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.04	12.52	0.00	0.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	66.80		80.79				100.00				
308	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	34.42	62.42	0.00	0.00	97.94	100.00	62.44	80%	0.00	78.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.16	12.48	0.00	0.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	67.21		80.18				100.00				
309	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	36.90	60.88	0.00	0.00	97.15	100.00	62.43	80%	0.00	78.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	12.18	0.00	0.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	68.45		79.02				100.00				
310	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	32.59	73.26	0.00	0.00	0.00	100.00	54.54	70%	0.00	77.92
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.89	14.65	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.30		73.26				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

311	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	43.79	55.62	0.00	0.00	94.83	100.00	62.18	80%	0.00	77.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.57	11.12	0.00	0.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	71.90		75.23				100.00				
312	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	32.47	61.09	0.00	0.00	99.56	100.00	62.04	80%	0.00	77.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.87	12.22	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	66.24		80.33				100.00				
313	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	52.06	50.09	0.00	0.00	98.47	96.11	61.70	80%	0.00	77.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.81	10.02	0.00	0.00	9.85	24.03				
					Nilai Aspek	76.03		74.28				96.11				
314	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	29.96	72.36	0.00	0.00	0.00	100.00	53.97	70%	0.00	77.09
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.49	14.47	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.98		72.36				100.00				
315	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	35.13	58.16	0.00	0.00	97.60	100.00	61.66	80%	0.00	77.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.27	11.63	0.00	0.00	9.76	25.00				
					Nilai Aspek	67.57		77.88				100.00				
316	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	26.06	66.44	0.00	0.00	93.71	100.00	61.57	80%	0.00	76.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.91	13.29	0.00	0.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	63.03		80.08				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

317	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	38.77	55.45	0.00	0.00	95.05	100.00	61.41	80%	0.00	76.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.82	11.09	0.00	0.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	69.39		75.25				100.00				
318	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	20.56	66.84	0.00	0.00	99.12	100.00	61.36	80%	0.00	76.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.08	13.37	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	60.28		82.98				100.00				
319	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	31.13	58.24	0.00	0.00	100.00	100.00	61.32	80%	0.00	76.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.67	11.65	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.57		79.12				100.00				
320	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	31.08	63.77	0.00	0.00	88.79	100.00	61.30	80%	0.00	76.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.66	12.75	0.00	0.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	65.54		76.28				100.00				
321	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	14.03	73.81	0.00	0.00	94.08	100.00	61.27	80%	0.00	76.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.10	14.76	0.00	0.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	57.02		83.95				100.00				
322	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	27.90	60.46	0.00	0.00	99.83	100.00	61.26	80%	0.00	76.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.19	12.09	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	63.95		80.15				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

323	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	22.11	64.69	0.00	0.00	100.00	100.00	61.25	80%	0.00	76.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.32	12.94	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	61.06		82.35				100.00				
324	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	29.48	59.17	0.00	0.00	100.00	100.00	61.26	80%	0.00	76.57
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.42	11.83	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.74		79.59				100.00				
325	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	57.56	49.18	0.00	0.00	77.64	100.00	61.23	80%	0.00	76.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.63	9.84	0.00	0.00	7.76	25.00				
					Nilai Aspek	78.78		63.41				100.00				
326	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	28.55	59.20	0.00	0.00	100.00	100.00	61.12	80%	0.00	76.40
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.28	11.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.28		79.60				100.00				
327	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	36.94	58.56	0.00	0.00	87.02	100.00	60.96	80%	0.00	76.19
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	11.71	0.00	0.00	8.70	25.00				
					Nilai Aspek	68.47		72.79				100.00				
328	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	28.27	69.19	0.00	0.00	78.22	100.00	60.90	80%	0.00	76.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.24	13.84	0.00	0.00	7.82	25.00				
					Nilai Aspek	64.14		73.71				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

329	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	37.39	57.02	0.00	0.00	88.91	100.00	60.90	80%	0.00	76.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.61	11.40	0.00	0.00	8.89	25.00				
					Nilai Aspek	68.70		72.97				100.00				
330	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	39.97	54.03	0.00	0.00	90.43	100.00	60.84	80%	0.00	76.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.00	10.81	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	69.99		72.23				100.00				
331	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	33.98	71.27	0.00	0.00	99.74	86.00	60.83	80%	0.00	76.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.10	14.25	0.00	0.00	9.97	21.50				
					Nilai Aspek	66.99		85.51				86.00				
332	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	28.36	59.34	0.00	0.00	96.43	100.00	60.77	80%	0.00	75.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	11.87	0.00	0.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	64.18		77.89				100.00				
333	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	21.03	63.06	0.00	0.00	99.44	100.00	60.71	80%	0.00	75.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.15	12.61	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	60.52		81.25				100.00				
334	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	15.35	66.14	0.00	0.00	100.00	100.00	60.53	80%	0.00	75.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.30	13.23	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	57.68		83.07				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

335	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	31.29	53.94	0.00	0.00	100.00	100.00	60.48	80%	0.00	75.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.69	10.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.65		76.97				100.00				
336	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	33.46	55.95	0.00	0.00	92.17	100.00	60.43	80%	0.00	75.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.02	11.19	0.00	0.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	66.73		74.06				100.00				
337	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	37.67	60.73	0.00	0.00	0.00	100.00	52.80	70%	0.00	75.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.65	12.15	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.84		60.73				100.00				
338	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	20.66	62.44	0.00	0.00	97.46	100.00	60.33	80%	0.00	75.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.10	12.49	0.00	0.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	60.33		79.95				100.00				
339	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	37.77	60.19	0.00	0.00	95.51	92.22	60.31	80%	0.00	75.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.67	12.04	0.00	0.00	9.55	23.06				
					Nilai Aspek	68.89		77.85				92.22				
340	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	19.30	62.99	0.00	0.00	95.34	100.00	60.03	80%	0.00	75.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.90	12.60	0.00	0.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	59.65		79.17				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

341	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	30.33	52.40	0.00	0.00	98.27	100.00	59.86	80%	0.00	74.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.55	10.48	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	65.17		75.34				100.00				
342	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	27.88	52.92	0.00	0.00	100.00	100.00	59.77	80%	0.00	74.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	10.58	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.94		76.46				100.00				
343	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	18.18	60.74	0.00	0.00	98.15	100.00	59.69	80%	0.00	74.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.73	12.15	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	59.09		79.45				100.00				
344	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	23.76	62.04	0.00	0.00	87.00	100.00	59.67	80%	0.00	74.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.56	12.41	0.00	0.00	8.70	25.00				
					Nilai Aspek	61.88		74.52				100.00				
345	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	12.50	69.93	0.00	0.00	87.50	100.00	59.61	80%	0.00	74.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	13.99	0.00	0.00	8.75	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		78.72				100.00				
346	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	30.00	56.06	0.00	0.00	87.68	100.00	59.48	80%	0.00	74.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.50	11.21	0.00	0.00	8.77	25.00				
					Nilai Aspek	65.00		71.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

347	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	32.23	63.99	0.00	0.00	68.24	100.00	59.46	80%	0.00	74.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.83	12.80	0.00	0.00	6.82	25.00				
					Nilai Aspek	66.12		66.12				100.00				
348	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	22.04	61.93	0.00	0.00	86.92	100.00	59.38	80%	0.00	74.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.31	12.39	0.00	0.00	8.69	25.00				
					Nilai Aspek	61.02		74.43				100.00				
349	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	32.59	63.88	0.00	0.00	65.10	100.00	59.17	80%	0.00	73.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.89	12.78	0.00	0.00	6.51	25.00				
					Nilai Aspek	66.30		64.49				100.00				
350	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	25.79	64.16	0.00	0.00	0.00	100.00	51.70	70%	0.00	73.86
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.87	12.83	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	62.90		64.16				100.00				
351	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	12.50	60.30	0.00	0.00	100.00	100.00	58.94	80%	0.00	73.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	12.06	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		80.15				100.00				
352	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	32.37	56.91	0.00	0.00	76.07	100.00	58.84	80%	0.00	73.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.86	11.38	0.00	0.00	7.61	25.00				
					Nilai Aspek	66.19		66.49				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

353	068	032	691045	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	29.35	60.32	0.00	0.00	0.00	100.00	51.47	70%	0.00	73.52
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.40	12.06	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.68		60.32				100.00				
354	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	26.56	59.72	0.00	0.00	0.00	100.00	50.93	70%	0.00	72.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.98	11.94	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.28		59.72				100.00				
355	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	18.94	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	57.84	80%	0.00	72.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.84	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	59.47		75.00				100.00				
356	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	32.03	53.88	0.00	0.00	0.00	100.00	50.58	70%	0.00	72.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.80	10.78	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.02		53.88				100.00				
357	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	16.98	55.43	0.00	0.00	91.25	100.00	57.76	80%	0.00	72.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.55	11.09	0.00	0.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	58.49		73.34				100.00				
358	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	36.36	36.52	0.00	0.00	100.00	100.00	57.76	80%	0.00	72.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.45	7.30	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.18		68.26				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

359	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	27.71	55.98	0.00	0.00	0.00	100.00	50.35	70%	0.00	71.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.16	11.20	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.86		55.98				100.00				
360	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	20.96	50.00	0.00	0.00	92.39	100.00	57.38	80%	0.00	71.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.14	10.00	0.00	0.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	60.48		71.20				100.00				
361	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	88.39	96.21	100.00	100.00	90.79	0.00	71.58	100%	0.00	71.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.24	10.00	10.00	9.08	0.00				
					Nilai Aspek	94.20		96.75				0.00				
362	022	032	645693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	76.21	99.65	100.00	100.00	92.25	0.00	70.59	100%	0.00	70.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.43	19.93	10.00	10.00	9.23	0.00				
					Nilai Aspek	88.11		97.98				0.00				
363	113	032	691043	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	22.32	52.44	0.00	0.00	74.24	100.00	56.26	80%	0.00	70.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.35	10.49	0.00	0.00	7.42	25.00				
					Nilai Aspek	61.16		63.34				100.00				
364	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	31.15	47.21	0.00	0.00	89.82	91.25	55.91	80%	1.00	68.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.67	9.44	0.00	0.00	8.98	22.81				
					Nilai Aspek	65.58		68.52				91.25				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

365	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	41.57	65.93	0.00	0.00	92.86	65.00	54.96	80%	0.00	68.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.24	13.19	0.00	0.00	9.29	16.25				
					Nilai Aspek	70.79		79.40				65.00				
366	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	32.65	62.66	0.00	0.00	0.00	82.50	48.05	70%	0.00	68.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.90	12.53	0.00	0.00	0.00	20.63				
					Nilai Aspek	66.33		62.66				82.50				
367	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	13.24	50.00	0.00	0.00	76.94	100.00	54.68	80%	0.00	68.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.99	10.00	0.00	0.00	7.69	25.00				
					Nilai Aspek	56.62		63.47				100.00				
368	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	63.48	82.25	0.00	0.00	0.00	57.22	33.83	50%	0.00	67.66
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31				
					Nilai Aspek	81.74		82.25				57.22				
369	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	18.18	50.00	0.00	0.00	61.36	100.00	53.86	80%	0.00	67.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.73	10.00	0.00	0.00	6.14	25.00				
					Nilai Aspek	59.09		55.68				100.00				
370	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	12.50	50.00	0.00	0.00	69.75	100.00	53.85	80%	0.00	67.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	10.00	0.00	0.00	6.98	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		59.88				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

371	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	14.85	44.83	0.00	0.00	0.00	100.00	46.19	70%	0.00	65.99
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.23	8.97	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	57.43		44.83				100.00				
372	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	13.58	48.93	0.00	0.00	100.00	82.50	52.45	80%	0.00	65.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.04	9.79	0.00	0.00	10.00	20.63				
					Nilai Aspek	56.79		74.47				82.50				
373	066	032	691042	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	17.25	33.07	0.00	0.00	0.00	100.00	44.20	70%	0.00	63.15
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.59	6.61	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.63		33.07				100.00				
374	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	55.73	69.12	0.00	0.00	95.50	30.00	49.23	80%	0.00	61.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.36	13.82	0.00	0.00	9.55	7.50				
					Nilai Aspek	77.87		82.31				30.00				
375	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	14.37	70.46	0.00	0.00	100.00	47.50	48.12	80%	0.00	60.15
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.16	14.09	0.00	0.00	10.00	11.88				
					Nilai Aspek	57.19		85.23				47.50				
376	085	032	691044	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	41.88	70%	0.00	59.82
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		25.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

377	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	35.77	64.75	0.00	0.00	0.00	53.33	41.65	70%	0.00	59.50
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.37	12.95	0.00	0.00	0.00	13.33				
					Nilai Aspek	67.89		64.75				53.33				
378	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	55.50	55.81	0.00	0.00	99.93	30.00	46.98	80%	0.00	58.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.33	11.16	0.00	0.00	9.99	7.50				
					Nilai Aspek	77.75		77.87				30.00				
379	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	37.92	63.97	0.00	0.00	97.35	30.00	45.72	80%	0.00	57.15
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.69	12.79	0.00	0.00	9.74	7.50				
					Nilai Aspek	68.96		80.66				30.00				
380	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	35.50	63.14	0.00	0.00	88.16	30.00	44.27	80%	0.00	55.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.33	12.63	0.00	0.00	8.82	7.50				
					Nilai Aspek	67.75		75.65				30.00				
381	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	25.26	60.44	0.00	0.00	0.00	44.00	36.88	70%	0.00	52.68
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.79	12.09	0.00	0.00	0.00	11.00				
					Nilai Aspek	62.63		60.44				44.00				
382	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	12.50	58.14	0.00	0.00	99.58	30.00	40.96	80%	0.00	51.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	11.63	0.00	0.00	9.96	7.50				
					Nilai Aspek	56.25		78.86				30.00				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 108/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Ketua Tim Kerja BLU PNB
Hal : Capaian IKU Nilai Pengelolaan PNB Sektor KP, Indeks Pengelolaan BLU KKP, dan Nilai Kinerja Pembinaan BLU Sektor KP Triwulan IV 2024
Tanggal : 10 Januari 2025

Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja lingkup Biro Keuangan, berikut kami sampaikan capaian indikator kinerja utama tim kerja BLU PNB yang mendukung capaian indikator kinerja lingkup Biro Keuangan periode triwulan IV 2024, sebagai berikut:

1. Nilai Pengelolaan PNB Sektor Kelautan dan Perikanan

Komponen	Bobot		Persentase (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan usulan dan penetapan rencana PNB	1	1	30	30
Regulasi/ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan PNB	1	1	10	10
Monitoring pelaksanaan PNB dilakukan secara bulanan	12	12	30	30
Penyusunan laporan pelaksanaan PNB dan disampaikan ke Menteri Keuangan secara semester	2	2	20	20
Penyusunan Usulan Penggunaan Sebagian Dana PNB ke Menteri Keuangan	1	1	10	10
Nilai Akumulasi Capaian Periodik			100	100

2. Indeks Pengelolaan Badan Layanan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Parameter	Bobot		Konversi dalam Indeks		Capaian Bobot x Realisasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Presentase Realisasi PNB BLU	40%	40%	3	4	1,60
2	Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kementerian keuangan	35%	35%	3	3	1,05
3	Ketepatan waktu penyampaian laporan BLU	25%	25%	3	2,75	0,69
Nilai Akumulasi Capaian Periodik		100%	100%	3		3,34

3. Nilai Kinerja Pembinaan Badan Layanan Umum Sektor Kelautan dan Perikanan

No	Parameter	Target		Capaian		Bobot x Realisasi
		Bobot	Parameter	Target	Realisasi	
1	Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU T-2	25%	25,00%	1	1	25,00%
2	Pelaksanaan rapat pembinaan dengan Deras dan BLU dan pelaporan kepada Menteri	25%	25,00%	2	2	25,00%
3	Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring pengellaan BLU dilakukan secara bulanan	50%	25,00%	12	6	25,00%
Nilai Akumulasi Capaian Periodik		100	75,00%			75,00%

Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dian Hesty Andayani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP
Lampiran : -
Tanggal : 30 September 2024

Bersama ini disampaikan bahwa Itjen KKP telah melaksanakan pengukuran IKU Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI), dengan hasil sebesar 0,0939% dengan target kurang dari 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi besarnya nilai keuangan terhadap besarnya realisasi anggaran. Adapun rincian capaian tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571,218,613.00	631,793,931,033.00	0.0904%
2	Ditjen PKRL	175,999,847.00	399,297,824,951.00	0.0441%
3	Ditjen PSDKP	1,118,316,959.00	1,119,216,743,475.00	0.0999%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568,110,399.00	842,679,861,445.00	0.0674%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647,733,195.00	1,087,136,906,277.00	0.0596%
6	BPPSDMKP	1,832,712,563.00	1,342,845,268,762.00	0.1365%
7	Ditjen PDSPKP	998,491,792.00	339,604,537,406.00	0.2940%
8	BPPMHKP	11,350,000.00	497,626,943,467.00	0.0023%
9	Itjen	23,878,250.00	75,393,908,501.00	0.0317%
	Jumlah	5,947,811,618.00	6,335,595,925,317.00	0.0939%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 51/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
2. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2024

Lampiran : -

Tanggal : 7 Januari 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024" sebagai berikut:

1. Capaian IKU tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup KKP pada periode Tahun 2024 sebesar **94,02%** (tuntas **3162** dari **3363** rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 51/ITJ.0/TU.140/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	196	196	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PKRL	453	434	95,81%	19	4,19%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69%	98	15,31%
4	Ditjen PSDKP	126	126	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	841	790	93,94%	51	6,06%
6	BPPSDMKP	454	451	99,34%	3	0,66%
7	Ditjen PDSPKP	193	188	97,41%	5	2,59%
8	BPPMHKP	395	372	94,18%	23	5,82%
9	Itjen	65	63	96,92%	2	3,08%
TOTAL		3363	3162	94,02	201	5,98



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 182/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

2. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA per level tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai Indikator Kinerja NKPA pada Triwulan IV tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal



Partisipasi Eselon I

Monitoring / Partisipasi Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Eselon I ↑↓	Nama Eselon I ↑↓	Jumlah Satker ↑↓	Jan ↑↓	Feb ↑↓	Mar ↑↓	Apr ↑↓	Mei ↑↓	Jun ↑↓	Jul ↑↓	Ags ↑↓	Sep ↑↓	Okt ↑↓	Nov ↑↓	Des ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	37	3	3	3	37	37	37	37	37	37	37	37	37
2	02	Inspektorat Jenderal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	55
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	50	16	16	16	16	49	49	49	50	50	50	50	49
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64	30	30	30	30	64	64	64	64	64	64	64	64
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	40	2	2	2	2	40	40	40	40	40	40	40	40
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	43	9	9	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
8	12	Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

MONEV



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RolePilih TA (2024)Logout

NK Perencanaan KL

Monitoring / NK Perencanaan KL

Download Excel

Tampilkan10entri

Cari:

No. ↑↓	Kode K/L ↑↓	K/L ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS ↑↓	IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.18	88.86	94.99	97.04	90.17	52.25

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-15 13:52:07



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	88.72	100.00	99.50	60.00	52.95
2	02	Inspektorat Jenderal	90.61	100.00	100.00	100.00	37.40
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	84.12	99.33	91.51	88.40	28.65
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	86.99	88.26	98.73	95.24	43.70
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94.01	100.00	98.31	96.00	67.80
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82.38	98.05	99.17	33.33	33.35
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	97.90	100.00	98.22	98.31	92.45
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95.28	100.00	94.51	92.65	89.90
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	82.83	73.08	99.47	81.08	53.55

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	88.72	100.00	99.50	60.00	52.95

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)



No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	NK Perencanaan Anggaran ↕	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↕	Penggunaan SBK ↕	Efisiensi SBK ↕
37	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,29	96,39	100,00	100,00
35	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	86,18	100,00	50,00	41,20
36	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00
38	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00
39	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
40	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
41	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00
42	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00
43	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	75,00	100,00	0,00	0,00
44	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
45	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
46	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00
47	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00
48	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00
49	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
50	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
51	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
52	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
60	000947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
61	000948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00
62	000949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	75,00	100,00	0,00	0,00
63	000950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	75,00	100,00	0,00	0,00
64	000951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
65	000952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	75,00	100,00	0,00	0,00
66	000953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
67	000954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	75,00	100,00	0,00	0,00
68	000955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00
69	000956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
70	000957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
71	000958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
1	010076	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	030321	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	030311	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	040003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	050004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	060032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	070044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	080001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	090009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
10	100004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	110008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	120009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
13	130005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↔	UEI ↔	NK Perencanaan Anggaran ↔	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↔	CRO ↔	Penggunaan SBK ↔	Efisiensi SBK ↔
1	02	Inspektorat Jenderal	90.61	100.00	100.00	100.00	37.40

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	03	Ditjen Perikanan Tangkap	84.12	99.33	91.51	88.40	28.65

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
49	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	93,46	100,00	100,00	56,40
1	619061	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	90,00	100,00	100,00	33,35
2	629172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
3	639183	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	90,00	100,00	100,00	33,35
4	649097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	90,00	100,00	100,00	33,35
5	663143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,00	100,00	100,00	33,35
7	679138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35
9	693223	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAU	90,00	100,00	100,00	33,35
10	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	90,00	100,00	100,00	33,35
11	113114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	90,00	100,00	100,00	33,35
12	128123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	90,00	100,00	100,00	33,35
13	138138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
15	138118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	90,00	100,00	100,00	33,35
16	188124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	90,00	100,00	100,00	33,35
17	178113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35
21	219066	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	90,00	100,00	100,00	33,35
22	229119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	90,00	100,00	100,00	33,35
24	238138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. MUSA TENGGARA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
27	238173	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PENALONGAN	90,00	100,00	100,00	33,35
28	238214	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA SUNGAILIT	90,00	100,00	100,00	33,35
30	238239	PELABUHAN PERIKANAN PNTAI TELUK BATANG	90,00	100,00	100,00	33,35
31	239993	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PEMANGKAT	90,00	100,00	100,00	33,35
32	248189	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. MUSA TENGGARA TIMUR	90,00	100,00	100,00	33,35
33	253107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	90,00	100,00	100,00	33,35
34	268138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	90,00	100,00	100,00	33,35

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
36	289381	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	90,00	100,00	100,00	33,35
38	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KAWADANG	90,00	100,00	100,00	33,35
39	319088	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	90,00	100,00	100,00	33,35
41	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
42	340130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	90,00	100,00	100,00	33,35
43	427055	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SELATAN	90,00	100,00	100,00	33,35
44	427061	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	90,00	100,00	100,00	33,35
45	427070	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	90,00	100,00	100,00	33,35
46	427082	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONGDONG	90,00	100,00	100,00	33,35
47	518127	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	90,00	100,00	100,00	33,35
48	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	90,00	100,00	100,00	33,35
50	537005	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	90,00	100,00	100,00	33,35
51	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN BATU	90,00	100,00	100,00	33,35
52	560402	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	90,00	100,00	100,00	33,35
55	623483	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAMARAN	90,00	100,00	100,00	33,35
56	623320	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	90,00	100,00	100,00	33,35
57	633493	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	90,00	100,00	100,00	33,35
26	239139	SALAI BESAR PEMANGKAPAN IKAN	89,28	100,00	100,00	28,55
53	623461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMHON	86,58	95,44	100,00	33,35
25	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KABANGANTU	84,05	92,06	100,00	33,35
23	339726	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	83,77	100,00	75,00	6,45
37	399170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	82,50	90,00	100,00	33,35
29	339221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	81,98	93,75	66,67	33,35
19	199127	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	81,76	89,01	100,00	33,35
5	059130	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
20	308117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	66,90	73,64	66,67	33,35
18	389143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	61,49	70,87	33,33	33,35
54	633479	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	51,34	59,56	66,67	0,00
40	829067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	36,66	44,44	33,33	0,00
58	933707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	27,02	31,58	33,33	0,00
8	988143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
14	348134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
35	388133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 51 sampai 58 dari 58 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Selanjutnya](#)



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	04	Ditjen Perikanan Budidaya	86.99	88.26	98.73	95.24	43.70

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
51	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
52	029173	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
53	030104	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
54	040200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
55	050101	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
56	060144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	100,00	100,00	100,00	100,00
57	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
58	080144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
59	090120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
60	100133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
61	110142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
62	120134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
63	130139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
64	140125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
65	150138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
66	160123	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
67	170114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
68	180144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
69	190138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
70	200118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00
71	210200	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
72	220111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00
73	230139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
74	240179	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
75	250100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan 5BK	Efisiensi 5BK
76	306131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	100,00	100,00	100,00	100,00
78	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00
79	306171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
81	339066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
82	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
83	346151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
85	031347	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
39	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPE) KARAWANG	92,42	100,00	100,00	49,45
50	633482	SEDTOTJEN PERIKANAN BUDIDAYA	92,31	100,00	93,33	53,20
44	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAH	92,02	100,00	100,00	46,80
38	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	90,52	100,00	100,00	36,80
26	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	90,13	100,00	100,00	34,20
24	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	90,08	100,00	100,00	33,85
45	567384	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDANJIN	89,98	100,00	100,00	33,20
40	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG LINGGUL DAN KEKETRANGAN KARANGSEM	89,74	100,00	100,00	31,60
41	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATSU	89,68	100,00	100,00	31,20
49	507900	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	88,98	100,00	100,00	26,55
23	237037	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI SELAM	88,86	100,00	100,00	25,75
46	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	86,86	100,00	90,91	18,45
43	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATES	86,25	100,00	90,00	15,00
48	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	86,24	100,00	85,71	17,80
47	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	85,93	100,00	85,71	15,75
42	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDQ	85,72	100,00	85,71	14,30
80	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	42,94	57,25	0,00	0,00
1	819022	DINAS KETAHANAN PANGSA, KELAUTAN DAN PERTAHANAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00

MONEV



DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Role

Pilih TA (2024)

Logout

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑	Kode UEI ↑	UEI ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑	CRO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	94.01	100.00	98.31	96.00	67.80

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-15 14:27:35

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
47	440867	STASIUN PENGAWASAN SDKP PORTIANKAR	98,89	98,81	100,00	98,55
3	031601	STASIUN PSDKP CILACAP	98,08	100,00	100,00	87,20
44	440812	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	97,53	100,00	100,00	83,55
7	003133	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	96,49	100,00	100,00	76,60
31	350103	STASIUN PSDKP BINA	96,18	100,00	100,00	74,50
46	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELANAN	95,66	100,00	100,00	71,05
43	350105	STASIUN PSDKP TABARAN	95,34	100,00	100,00	68,90
38	320156	PANGKALAN PSDKP NATHM	95,00	100,00	100,00	66,65
48	440803	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	94,86	99,81	100,00	66,65
24	310141	STASIUN PSDKP AMBON	93,99	98,65	100,00	66,65
29	340100	STASIUN PSDKP KUPANG	93,83	96,43	100,00	76,70
45	440823	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP SITUNG	93,67	98,23	100,00	66,65
49	440830	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,57	96,57	100,00	47,60
26	320135	PANGKALAN PSDKP BENDU	88,79	96,30	66,67	66,00
19	170443	STASIUN PSDKP TAHUNA	84,95	97,71	66,67	33,35
2	020000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
4	030017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
5	040013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00
10	080004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
13	110038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00
14	120004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
16	140038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
18	160004	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00
21	190036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
22	190033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RD	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
69	030005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75,00	100,00	0,00	0,00
70	030006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	75,00	100,00	0,00	0,00
71	030007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	75,00	100,00	0,00	0,00
72	030008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MUSA TENGGARA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
74	030009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	75,00	100,00	0,00	0,00
75	030010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	75,00	100,00	0,00	0,00
76	030011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
77	030012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	75,00	100,00	0,00	0,00
78	030013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
79	030014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	75,00	100,00	0,00	0,00
80	031000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00
81	031001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
83	031003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
65	030015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	57,59	76,79	0,00	0,00
73	030016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MUSA TENGGARA TIMUR	49,88	66,50	0,00	0,00
82	031002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	37,50	50,00	0,00	0,00
1	013023	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	039023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	069022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	079023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	099020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
12	109025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139026	DINAS KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17	139027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	179005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82.38	98.05	99.17	33.33	33.35

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
35	427844	BALAI BESAR PENGUJIAN PEMERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPP3KP)	100,00	100,00	100,00	100,00
36	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUJIAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	80,00	100,00	20,00	20,00
37	691000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00
38	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
39	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
40	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	75,00	100,00	0,00	0,00
41	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00
42	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	75,00	100,00	0,00	0,00
43	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
44	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
45	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00
46	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00
47	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00
48	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
49	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
50	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
51	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00
52	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00
53	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
54	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
55	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00
56	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75,00	100,00	0,00	0,00
57	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	75,00	100,00	0,00	0,00
58	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	75,00	100,00	0,00	0,00
59	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 25 dari 74 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
60	881031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	75,00	100,00	0,00	0,00
61	881032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	75,00	100,00	0,00	0,00
62	881033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	75,00	100,00	0,00	0,00
63	881034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALIKU UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
64	881035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BAKEM	75,00	100,00	0,00	0,00
65	881036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
66	881037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	75,00	100,00	0,00	0,00
67	881038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	75,00	100,00	0,00	0,00
68	881039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
69	881040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	75,00	100,00	0,00	0,00
70	881041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	75,00	100,00	0,00	0,00
71	881042	DINAS PERTANIAN, PANGSAI, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	75,00	100,00	0,00	0,00
73	881044	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	75,00	100,00	0,00	0,00
74	881045	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	75,00	100,00	0,00	0,00
72	881043	DINAS PERTANIAN, PANGSAI DAN PERIKANAN PAPUA PESUINGAN	41,25	55,00	0,00	0,00
17	179026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	0,75	1,00	0,00	0,00
1	019074	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	029091	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	039018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	049034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	059033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	069023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	079034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	089005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	099040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 26 sampai 50 dari 74 entri

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya



NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	97.90	100.00	98.22	98.31	92.45

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
27	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	100,00	100,00	100,00	100,00
37	479431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
44	881046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
45	881047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
46	881048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
47	881049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
49	881051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	100,00	100,00	100,00	100,00
50	881052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
51	881053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
52	881054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
53	881055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
54	881056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
55	881057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
56	881058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
57	881059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
58	881060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
60	881062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
61	881063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
62	881064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
63	881065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00
64	881066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
67	881069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
68	881070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	100,00	100,00	100,00	100,00
69	881071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	100,00	100,00	100,00	100,00
70	881072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALIKU UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 25 dari 77 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
71	001073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00
72	001074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
73	001075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00
74	001076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
75	001077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
76	001078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
66	001068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	99,81	99,75	100,00	100,00
38	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SURABAYA	98,70	100,00	100,00	91,35
40	409546	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	98,32	100,00	100,00	88,80
36	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	98,11	100,00	100,00	87,40
39	477456	LOKA KAMKASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	97,16	100,00	100,00	81,05
43	022345	SEKRETARIAT DINJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	96,84	98,41	100,00	86,90
35	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	96,42	100,00	100,00	76,10
65	001067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	95,83	94,44	100,00	100,00
41	409332	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	94,42	100,00	100,00	62,80
59	001061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	89,43	85,90	100,00	100,00
48	001050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	65,63	87,50	0,00	0,00
77	001079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	46,43	28,57	100,00	100,00
23	249088	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	12,45	16,60	0,00	0,00
1	020002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	030613	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3	040035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	050034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
5	060024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
6	070035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 26 sampai 50 dari 77 entri

Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 100 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95.28	100.00	94.51	92.65	89.90

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
3	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
5	238763	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	100,00	100,00	100,00	100,00
6	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
9	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTAHAN PESISIR	100,00	100,00	100,00	100,00
12	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
13	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN ULMU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
14	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
18	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	403830	BALAI RISET BUDI DAYA IKAN HIAS	100,00	100,00	100,00	100,00
20	403831	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
22	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
23	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
24	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL, EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
25	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	100,00	100,00	100,00	100,00
26	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	100,00	100,00	100,00	100,00
29	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	100,00	100,00	100,00	100,00
30	417511	POLITEKNIK HASIL USAHA PERIKANAN (POLTEK HUP) JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
31	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	100,00	100,00	100,00	100,00
32	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
34	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAGHERU	100,00	100,00	100,00	100,00
36	440613	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 25 dari 41 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
40	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MEHENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
41	653216	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APAMATUR SUKAMANDI	100,00	100,00	100,00	100,00
2	238018	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SITUNG	99,88	99,84	100,00	100,00
10	403620	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	99,60	100,00	100,00	97,30
28	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	99,56	99,41	100,00	100,00
38	624402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99,43	100,00	100,00	96,20
21	403813	LOKA RISET BUDIDAYA BUMPUT LAUT	96,66	100,00	100,00	77,70
11	403813	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	95,22	100,00	100,00	68,10
37	623035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	92,35	89,80	100,00	100,00
15	403618	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	91,66	100,00	66,67	66,65
16	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	91,66	100,00	66,67	66,65
17	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	91,66	100,00	66,67	66,65
33	421983	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MEHENGAH PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00
35	437830	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MEHENGAH SORONG	75,00	100,00	0,00	0,00
39	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	6,82	9,09	0,00	0,00
8	352585	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 26 sampai 41 dari 41 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

https://monev.kemenkeu.go.id/app2024/unit/nkasatker/MDMy/MTI=#

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-15 14:39:37

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	82.83	73.08	99.47	81.08	53.55

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
9	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00
19	649051	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
20	649068	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTRIKONG	100,00	100,00	100,00	100,00
29	649057	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00
31	649078	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00
43	649771	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI	100,00	100,00	100,00	100,00
48	662897	BALAI (3) STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4	427396	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	99,57	100,00	100,00	97,15
15	567756	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	96,06	100,00	100,00	73,70
3	427587	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN 1	95,00	100,00	100,00	66,65
23	649093	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	95,00	100,00	100,00	66,65
39	649733	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	95,00	100,00	100,00	66,65
14	567094	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	94,84	100,00	100,00	65,60
12	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKAPAPAN	94,56	97,75	100,00	75,00
2	427342	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA 1	92,50	100,00	100,00	50,00
22	649089	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	92,50	100,00	100,00	50,00
32	649082	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	92,50	100,00	100,00	50,00
33	649084	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II	92,50	100,00	100,00	50,00
38	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	92,50	100,00	100,00	50,00
44	649786	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II	92,50	100,00	100,00	50,00
36	649104	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	91,66	100,00	66,67	66,65
34	649686	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	91,43	95,24	100,00	66,65
11	567516	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	91,39	100,00	100,00	42,60
35	649099	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	90,70	100,00	75,00	54,65
13	567651	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	90,00	100,00	75,00	50,00

Menampilkan 1 sampai 25 dari 48 entri

Sebelumnya **1** 2 Selanjutnya



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
5	437624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	89,37	95,83	100,00	50,00
40	649746	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAKJUNG BALAI ASAHAN	89,34	95,79	100,00	50,00
24	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	87,50	100,00	50,00	50,00
26	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	87,50	100,00	50,00	50,00
42	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	87,50	100,00	50,00	50,00
45	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAJI-BALI	87,50	100,00	50,00	50,00
46	649600	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAJURUNA	87,50	100,00	50,00	50,00
47	649614	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	87,50	100,00	50,00	50,00
28	649640	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TALJUNG PINANG	87,49	94,44	66,67	66,65
18	649693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG	86,67	100,00	66,67	33,35
21	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TIRUAKAN	86,67	100,00	66,67	33,35
25	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	86,67	100,00	66,67	33,35
30	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	86,67	100,00	66,67	33,35
37	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	86,67	100,00	66,67	33,35
10	667481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	85,00	100,00	100,00	0,00
41	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	85,00	100,00	100,00	0,00
1	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA 1	83,78	96,15	66,67	33,35
7	440607	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	83,38	100,00	57,14	17,75
6	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	80,00	100,00	50,00	0,00
8	667432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	75,00	100,00	0,00	0,00
16	667812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	75,00	100,00	0,00	0,00
17	649691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	75,00	100,00	0,00	0,00
27	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	75,00	100,00	0,00	0,00

Menampilkan 26 sampai 48 dari 48 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.445/ITJ.1/HP.660/XII/2024 18 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024
pada Sekretariat Jenderal

Yth. Kepala Biro Keuangan dan BMN
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2024 pada tanggal 02 s.d. 06 Desember 2024 dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor : B.409/ITJ.1/KP.440/XI/2024 tanggal 26 November 2024 dengan hasil sebagai berikut :

1. Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024, dilakukan terhadap Komponen Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada 5 (lima) subkomponen, meliputi :
 - a. Tersedianya dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024;
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2024 ke pengguna barang;
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke Pengguna Barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024;
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (Pusat), dan
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
2. Hasil penilaian Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024 memperoleh nilai 91,50 dari nilai maksimum 100, dengan rincian pada tabel berikut :

No	Subkomponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024	12,5	12,5
	a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024	5	5
	b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2024	7,5	7,5
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 ke pengguna barang	25	25
3	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024	25	25
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (Pusat)	25	25
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	12,5	6,5
Hasil Penilaian		100	94,00

3. Berdasarkan penilaian tersebut, subkomponen yang belum mendapatkan nilai optimal, yaitu :

- a. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024, yaitu sebanyak 890 unit BMN, belum seluruhnya dilengkapi Berita Acara Pemakaian atau hanya sebanyak 737 unit (82,81%), disebabkan petugas BMN belum menyusun Berita Acara Pemakaian
- b. Laporan BMN Semester I Tahun 2024 tidak disampaikan tepat waktu, seharusnya paling lambat tanggal 26 Juli 2024, namun pada reuiu Itjen pada tanggal 26 Juli 2024 ditingkat KKP, Laporan BMN UAPPB-E1 Periode Semester I per 30 Juni 2024 lingkup Sekretariat Jenderal KKP masih dalam proses penyusunan, disebabkan petugas BMN belum mempedomani ketentuan terkait batas waktu penyusunan Laporan BMN.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2018 Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik

Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada:

- 1) Bab II. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara;
 - 2) Angka 4. Pejabat yang membidangi urusan BMN Dalam rangka melaksanakan pengamanan dan Pemeliharaan BMN, Pejabat yang membidangi urusan BMN mempunyai tugas yaitu antara lain: membuat register barang, membuat Daftar Barang Ruangan, membuat Berita Acara Pemakaian BMN.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, pada: Bab II, Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yaitu Waktu Penyampaian laporan keuangan Semester I Tingkat UAPPA-E1 pada 26 Juli.

Atas kelemahan tersebut, direkomendasikan agar Saudari mengkoordinasikan Penerbitan Berita Acara Pemakaian terhadap Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal dan penyusunan Laporan BMN tingkat Eselon I tepat waktu.

Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dimaksud agar diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Lampiran. Lembar Kerja Penilaian Kualitas Pengelolaan BMN pada Sekretariat Jenderal Tahun 2024

NO	Komponen/Sub Komponen	Jawaban	Bobot	Nilai	Keterangan	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal
B	Kualitas Pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra		100	94.00		
I	Nilai rata-rata tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit eselon I		100	94.00		
a	Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024		12.5	12.5		
1	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2024	Y	5	5	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-40/MK.6/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan pada Tahun 2024 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2024 (Satker Pusat)	A	7.5	7.5	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. ≤ 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL ≤ 10%	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2024 yaitu jumlah BMN dari pengadaan dan pemeliharaan sebanyak 163 unit seluruhnya (100%) telah dialokasikan di RKAKL dengan rincian sebagai berikut: 1. Terdapat usulan pengadaan pada RKBMN Satker Biro Umum dan PBJ berupa pengadaan kendaraan dinas Jabatan Eselon I, Pejabat Eselon II, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri melalui mekanisme pembelian dan sewa total sebanyak 9 unit, dialokasikan pada RKAKL Tahun 2024 sebanyak 18 unit serta usulan pemeliharaan kendaraan sebanyak 125 unit dan bangunan sebanyak 9 unit yang seluruhnya telah dialokasikan pada RKAKL Tahun 2024. 2. Terdapat usulan pemeliharaan pada RKBMN Satker BPISDKP berupa kendaraan sebanyak 5 unit dan gedung bangunan sebanyak 15 unit yang seluruhnya telah dialokasikan pada RKAKL Tahun 2024 dan tidak terdapat pengadaan.
b	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 ke pengguna barang	A	25	25	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan PSP BMN ≤ 10%	Prosentase usulan PSP atas pengadaan BMN lingkup Setjen tahun 2024 sebesar 99,43% dengan rincian berdasarkan data SimanV2: 1. Pengadaan BMN pada Biro Umum dan PBJ sebanyak 852 Unit senilai Rp13.768.153.949,00 telah diusulkan PSP sebanyak 847 unit BMN 2. Pengadaan BMN pada BPISDKP sebanyak 20 Unit senilai Rp784.662.500,00 telah diusulkan seluruhnya.

NO	Komponen/Sub Komponen	Jawaban	Bobot	Nilai	Keterangan	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal
c	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024	A	25	25	a. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 80% b. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 50% s.d. < 80% c. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 10% s.d. < 50% d. apabila prosentase usulan penghapusan BMN < 10%	Persentase realisasi usulan penghapusan BMN sebesar 100% berdasarkan Data SIMAN s.d. TW III 2024 terdapat 46 unit BMN rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp3.407.616.500,00 seluruhnya telah diusulkan penghapusannya.
d	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (Pusat)	A	25	25	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian ≤ 10%	Pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian sebanyak 737 NUP dari 890 NUP atau sebesar 82,81%, yaitu terdapat 890 BMN lingkup Setjen dan BPISDKP Tahun 2024 telah dilengkapi dengan BA Pemakaian ataupun DIR sebanyak 737 NUP.
e	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	B	12.5	6.5	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu	1. Dokumen Laporan BMN UAPPB-E1 Periode Tahunan lingkup Sekretariat Jenderal KKP TA 2023 disusun pada bulan 16 Februari 2024; 2. Dokumen Laporan BMN UAPPB-E1 Periode Semester I per 30 Juni 2024 lingkup Sekretariat Jenderal KKP disusun pada bulan Juli 2024, namun berdasarkan reviu Itjen pada tanggal 26 Juli 2024 di tingkat KKP, Laporan BMN UAPPB-E1 Periode Semester I per 30 Juni 2024 lingkup Sekretariat Jenderal KKP masih dalam proses penyusunan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 197/SJ.2/TU.210/I/2025

Yth : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran
Hal : Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Standar Biaya
Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2025

Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja lingkup Biro Keuangan dan BMN, berikut kami sampaikan laporan capaian indikator kinerja utama Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja lingkup Biro Keuangan dan BMN periode Triwulan IV Tahun 2024 berupa Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot		Persentase (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Identifikasi SBK pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I KKP	1	1	20	20
Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran KKP	5	5	50	50
Monev Implementasi SBK KKP	2	2	30	30
Nilai Akumulasi Capaian Periodik			100	100

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nugroho Budiharto

Tembusan:
Katimja Dukungan Manajerial



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM <https://kkp.go.id> SUREL setjen@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2024

Pada hari ini, hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang penetapannya berdasarkan kepada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2024 telah melaksanakan finalisasi penilaian terhadap 1 (satu) Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang diusulkan dalam Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan hasil sebagai berikut:

UNIT ORGANISASI	NILAI	KETERANGAN
Biro Keuangan dan BMN	88,29	Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2024

Yang Menetapkan:

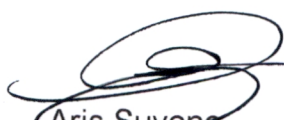
Biro Perencanaan


Agus Haryanto

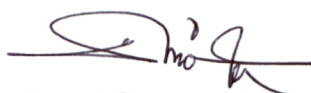
Biro Hukum


Mukti Ali

Biro Keuangan dan BMN


Aris Suyono

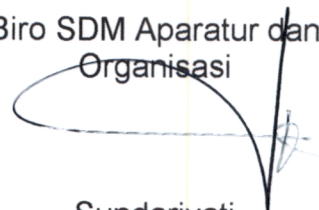
Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerjasama Luar Negeri


Emmi Simarmata

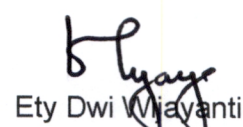
Pusat Data, Statistik dan
Informasi


Mareta Nirmalanti

Biro SDM Aparatur dan
Organisasi


Sundariyati

Biro Umum dan Pengadaan
Barang/Jasa


Ety Dwi Wiayanti

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS

Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Statistik;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup KKP;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP;
5. Para Sekretaris Badan;

Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025

Lampiran : Satu Lampiran

Tanggal : 09 Januari 2025

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan penetapan target capaian IP ASN Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP** Triwulan IV/Semester II Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar **88,44** (kategori **Tinggi**) terdiri dari
 - a. kualifikasi: 21,23;
 - b. kompetensi: 36,53;
 - c. kinerja: 25,70; dan
 - d. disiplin 4,98.Target sebesar **85** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **104,05%** (melebihi target), terlampir nilai detail;
2. **Capaian IKU IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal** Triwulan IV/Semester II Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar **87,05** (kategori **Tinggi**) terdiri dari
 - a. kualifikasi: 21,85;
 - b. kompetensi: 33,06;
 - c. kinerja: 27,14; dan
 - d. disiplin 5,00.

Target sebesar **85** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **102,41%** (melebihi target), terlampir nilai detail;

3. Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 dan Target Semester I dan Semester II/Akhir Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Unit	Tahun 2024			Target 2025		
		Capaian	Target	Prosentase (%)	Periode Pengukuran	Semester I	Semester II/ Akhir Tahun
1	Setjen	87,05	85	102,41	Semesteran	81	87
2	Ditjen PKRL	90,86	88	103,25	Semesteran	81	87
3	Ditjen Perikanan Tangkap	89,10	84	106,07	Semesteran	81	87
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	86,80	85	102,11	Semesteran	81	87
5	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	89,12	87	102,43	Semesteran	81	87
6	Ditjen PSDKP	87,25	82	106,40	Semesteran	81	87
7	Inspektorat Jenderal	90,82	85	106,84	Semesteran	82	88
8	BPPSDMKP	86,23	79	109,15	Semesteran	81	87
9	BPPMHKP	88,77	86	103,22	Semesteran	81	87
	IPASN KKP	88,44 (Tinggi)	85 (Tinggi)	104,05	Semesteran	82 (Tinggi)	88 (Tinggi)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riza Trianzah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran

No : B.62/SJ.3/TU.140/I/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	21,85	33,06	27,14	5	87,05
2	Ditjen Kelautan Ruang Laut	21,22	37,95	26,69	5	90,86
3	Ditjen Perikanan Tangkap	21	36,53	26,57	5	89,10
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	21,03	35,17	25,60	5	86,80
5	Ditjen PDS	21,76	37,28	25,06	5	89,12
6	Ditjen PSDKP	21,11	35,84	25,31	5	87,25
7	Inspektorat Jenderal	21,21	39,49	25,12	5	90,82
8	BPPSDMKP	20,90	35,77	24,69	4.87	86,23
9	BPPMHKP	20,95	37,67	25,16	4.99	88,77
	Total	21,23	36,53	25,7	4,98	88.44 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 10.499 PNS KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 09 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>

2. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	12,5	30	5	72,5
2	Biro Perencanaan	21,84	33,5	26,63	5	86,97
3	Biro Keuangan	21,1	35,96	26,54	5	88,59
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20,9	37,39	26,47	5	89,76
5	Biro Hukum	21,74	34,47	28,97	5	90,18
6	Biro HKLN	21,43	32,01	27,14	5	85,58
7	Biro Umum dan PBJ	20,72	36,92	25,19	5	87,83
8	Pusdatin	21,17	35,63	28,33	5	90,13
9	BPISKP	22,75	39,17	25	5	91,92
	Total	21,85	33,06	27,14	5	87,05 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 492 PNS lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 09 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024>

3. Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN) Tahun 2024

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

- a) **Kualifikasi** bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Sebelumnya:

No	Nama Kualifikasi *)	Nilai
1	Pendidikan S3	25
2	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1/D.IV	15
4	Pendidikan DIII/SM	10
5	Pendidikan DII/DI/SMA	5
6	Pendidikan SMP/SD	1

Saat ini:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b) **Kompetensi** bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c) **Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021)** bobot nilai 30

Sebelumnya:

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Saat ini:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d) **Disiplin** bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

e) **Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN**

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$\begin{aligned}
 W_{1j} * R_{1j} &= \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator} \\
 &\quad \text{Kualifikasi ke-j} \\
 W_{2k} * R_{2k} &= \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator} \\
 &\quad \text{Kualifikasi ke-k} \\
 W_{3l} * R_{3l} &= \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator} \\
 &\quad \text{Kualifikasi ke-l} \\
 W_{4m} * R_{4m} &= \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator} \\
 &\quad \text{Kualifikasi ke-m}
 \end{aligned}$$



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Riza Trianzah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dari : Kepala Biro Hukum

Hal : Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024

Lampiran : -

Tanggal : 4 Januari 2025

Sehubungan dengan penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2024 (Juli s.d. Desember), bersama ini kami laporkan beberapa hal berikut:

1. bahwa penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
2. capaian IKU persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2024 diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penetapan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024;
3. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) rancangan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. 25 (dua puluh lima) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. 14 (empat belas) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana sampai dengan semester II telah berhasil diselesaikan seluruh peraturan perundang-undangan dimaksud dengan persentase sebesar **100% (seratus persen)**, dengan **realisasi** sebagai berikut:

Unit Kerja	PERMEN-KP		KEPMEN-KP	
	DIUSULKAN	SELESAI	DIUSULKAN	SELESAI
DITJEN PKRL	5	5	3	3
DITJEN PT	-	-	4	4
DITJEN PB	2	2	-	-
DITJEN PDSPKP	3	3	-	-
DITJEN PSDKP	5	5	-	-
ITJEN	-	-	-	-
BPPSDMKP	5	5	-	-
BPPMHKP	2	2	-	-
ROREN	1	1	2	2
ROKEU-BMN	1	1	2	2
ROSDMAO	1	1	-	-
ROKUM	-	-	1	1
ROHKLN	-	-	1	1
ROUM-PBJ	-	-	-	-
PUSDATIN	-	-	1	1
TOTAL	25	25	14	14
SUBTOTAL	Dari 39 Usulan Rancangan, 39 Rancangan Telah Selesai			

4. capaian target Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja dihitung sebagai berikut:

RANCANGAN PERMEN KP			RANCANGAN KEPMEN KP		
No.	Tahapan	Capaian (%)	No	Tahapan	Capaian (%)
1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20	1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20
2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35	2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35
3.	Permohonan masukan/tanggapan kepada unit organisasi terkait	50	3.	Permohonan masukan/tanggapan kepada unit organisasi terkait	50
4.	Pembahasan rancangan	75	4.	Pembahasan rancangan	70
5.	Permohonan harmonisasi rancangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	5.	Permohonan paraf persetujuan pimpinan unit organisasi terkait	85
			6.	Penetapan Menteri	100

5. adapun rincian penilaian hasil capaian IKU persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan semester II tahun 2024, sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Permen/ Kepmen	Persentase	Permen/ Kepmen	Persentase
1.	SET.DITJEN PKRL	8	100%	8	100%
2.	SET.DITJEN PT	4	100%	4	100%
3.	SET.DITJEN PB	2	100%	2	100%
4.	SET.DITJEN PDSPKP	3	100%	3	100%
5.	SET.DITJEN PSDKP	5	100%	5	100%
6.	SET.ITJEN	-	-	-	-
7.	SET. BPPSDMKP	5	100%	5	100%
8.	SET. BPPMHKP	2	100%	2	100%
9.	ROREN	3	100%	3	100%
10.	ROKEU-BMN	3	100%	3	100%
11.	ROSDMAO	1	100%	1	100%
12.	ROKUM	1	100%	1	100%
13.	ROHKLN	1	100%	1	100%
14.	ROUM-PBJ	-	100%	-	100%
15.	PUSDATIN	1	100%	1	100%

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Hukum berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan semangat **#BerbahagiaMelayani** dan **#BerkinerjaSepenuhHati**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

Nomor : B.1245/SJ/RC.610/X/2024 29 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 pada Biro Keuangan dan BMN

Yth.

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Keuangan Tahun 2024 memperoleh nilai 84,55 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada Biro Keuangan Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,00	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,60
4.	Evaluasi Internal	25	22,50	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,50	84,55
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Keterangan :

- Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023
- Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian unit sampling pada Evaluasi SAKIP Setjen ([SIMWAS I KKP](#))

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan). Indikator kinerja yang ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan dilakukan *cascading* level atas dengan level di bawahnya.
- 2) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*). anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 3) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- 2) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Keuangan Tahun 2023 sebesar 109,05 dan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 109,30.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja Biro Keuangan telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat waktu.
- 2) Substansi Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.

- c) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk Laporan Kinerja Tahunan.
- d) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

d. Evaluasi Internal

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerja.
 - 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023.
 - 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Keuangan tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/RokeuTLEvaluasiSAKIP2023>.
5. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Keuangan direkomendasikan kepada Saudara agar :
- 1. Meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian Tahun 2023.
 - 2. Meningkatkan capaian komponen perencanaan dan evaluasi internal kinerja pada tahun 2024.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada **Januari 2025**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan Yth:
Inspektur I, Inspektorat Jenderal.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 199/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Hukum
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
4. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
6. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
9. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Keuangan dan BMN

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Setjen

Tanggal : 16 Januari 2025

Sehubungan dengan pengukuran IKU Persentase Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Unit Kerja di lingkungan Setjen atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 , berikut kami sampaikan Capaian IKU dimaksud sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Eselon II	Jumah Temuan	Tindak Lanjut	Capaian (%)
1.	Biro Perencanaan	0	0	100,00
2.	Biro Keuangan	0	0	100,00
3.	Biro Umum dan PBJ	16	16	100,00
4.	Biro Hukum	0	0	100,00
5.	Biro SDMAO	0	0	100,00
6.	Biro HKLN	0	0	100,00
7.	Pusdatin	1	1	100,00
8.	LPMUKP	0	0	100,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00
10.	Satker Dekon	0	0	100,00
SETJEN		17	17	100,00

Adapun progress penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 pada Unit Kerja lingkup Setjen sebagaimana pada tabel berikut:

No	Judul Temuan Pemeriksaan	Uraian Rekomendasi	Eselon II	Uraian Tindak Lanjut	Status
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp442.566.874,00	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp11.830.900,00 dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).	Biro Umum	Telah di tindak lanjuti dengan: 1. Inmen MKP kepada Setjen Nomor R.1075/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Bukti Setor Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp11.830.900,00 dengan rincian: a. NTPN No. 2A4D51JNFUT38TL8, tgl 08 Maret 2024 senilai Rp2.220.000,00 b. NTPN No. C39D148VVEPI2EHM, tgl 06 Mei 2024 senilai Rp2.978.500,00 c. SPM No.2161 tgl 01 Mei 2024 senilai Rp960.000,00 d. NTPN No. 9868761QV3UASFQE tgl 06 Mei 2024 senilai Rp960.000,00 e. SPM No.2161 tgl 01 Mei 2024 senilai Rp540.000,00 f. SPM No.2161 tgl 01 Mei 2024 senilai Rp515.850,00 g. NTPN No. F6E3461QV3U7PHC3 tgl 03 Mei 2024 senilai Rp1.500.000,00 h. NTPN No. 7B6A72G4VPPK8GS6 tgl 06 Mei 2024 senilai Rp3.100.050,00	Tuntas
2.	Pelaksanaan 23 Paket Pekerjaan Belanja 526 pada Empat Eselon I Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp647.301.066,00 dan Satu Paket Diantaranya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp133.813.000,00 dengan menyetorkannya ke	Biro Umum dan PBJ	Telah di tindak lanjuti sesuai dengan: 1. Inmen MKP kepada Setjen Nomor R.1101/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Menyetorkan senilai Rp133.813.000 ke RPL HIBAH Satker Biro Umum	Tuntas

	Senilai Rp7.013.400,00	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Hibah.			
3.	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak Senilai Rp986.230.263,00	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran senilai Rp409.313.835,00 dengan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).	Biro Umum	Telah di tindak lanjuti sesuai dengan: 1. Inmen MKP kepada Setjen Nomor R.1107/MEN-KP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 2. Bukti Setor Biro Umum PBJ senilai Rp385.873.836 dengan rincian: a. NTPN No. 633E62G4VPI46ABJ tgl 17 April 2024 senilai Rp26.655.822,00 b. NTPN No. 3AC340NA04DDFOUK tgl 19 April 2024 senilai Rp8.385.013,00 c. NTPN No. D80202G4VPHMRA3V tgl 05 April 2024 senilai Rp32.025.000,00 d. NTPN No. 8D05C7NAMJPMNQQU tgl 21 Desember 2023 senilai Rp244.692.473,00 e. NTPN No. AEB7561QV3R8FBED tgl 5 April 2024 senilai Rp74.115.527,00 f. NTPN No. 3CFA96U8EUQ2Q41B tgl 20 Agustus 2024 senilai Rp1;	Tuntas
			Pusdatin	3. Bukti Setor Pusdatin senilai Rp23.440.000 dengan NTPN No. 9AA681JNFUT3BBUE tgl 28 Maret 2024 senilai Rp23.440.000	Tuntas

Demikian kami sampaikan untuk menjadi dasar penetapan capaian IKU Persentase Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk diinput sebagai capaian pada aplikasi Kinerjaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 78/SJ.2/RC.610/I/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
3. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

Tanggal : 8 Januari 2025

Memperhatikan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2024 (terlampir), bersama ini kami sampaikan capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Unit Eselon II	Jumlah Rekom	TL (Tuntas)	Nilai Uang	TL (Tuntas)	Capaian IKU (100%)	Sisa Rekom
1.	Biro Perencanaan	21	21	-	-	100%	0
2.	Biro Keuangan dan BMN	36	36	-	-	100%	0
3.	Biro Umum dan PBJ	66	66	115.737.784	115.737.784	100%	0
4.	Biro Hukum	0	0	-	-	100%	0
5.	Biro SDMAO	7	7	-	-	100%	0
6.	Biro HKLN	18	18	-	-	100%	0
7.	Pusdatin	11	11	258.639	258.639	100%	0
8.	LPMUKP	17	17	-	-	100%	0
9.	BPISDKP	20	20	4.555.330	4.555.330	100%	0
SETJEN		196	196	120.551.753	120.551.753	100%	0

Berdasarkan capaian tersebut, kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal atas capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2024 sebesar 100%.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi dasar penetapan capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 2024, selanjutnya capaian tersebut dapat di input pada aplikasi Kinerjaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 51/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
2. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2024

Lampiran : -

Tanggal : 7 Januari 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024" sebagai berikut:

1. Capaian IKU tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup KKP pada periode Tahun 2024 sebesar **94,02%** (tuntas **3162** dari **3363** rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 51/ITJ.0/TU.140/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	196	196	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PKRL	453	434	95,81%	19	4,19%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69%	98	15,31%
4	Ditjen PSDKP	126	126	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	841	790	93,94%	51	6,06%
6	BPPSDMKP	454	451	99,34%	3	0,66%
7	Ditjen PDSPKP	193	188	97,41%	5	2,59%
8	BPPMHKP	395	372	94,18%	23	5,82%
9	Itjen	65	63	96,92%	2	3,08%
TOTAL		3363	3162	94,02	201	5,98



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR 32/SJ.7/TU.210/I/2025

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri;
6. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Hal : Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas.

Tanggal : 6 Januari 2025.

Dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 pukul 12:00 WIB:

1. Penilaian capaian IKU MP menggunakan *platform* Portal *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>);
2. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal adalah sebesar **125,00%**;
3. Target capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal yang harus dipenuhi oleh 7 (tujuh) unit kerja Eselon II dan 1 (satu) unit kerja setara Eselon II adalah sebesar **94,00%**;
4. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal terdapat sebanyak 8 (delapan) unit kerja yang telah mencapai target, antara lain: Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan LPMUKP.
5. Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU MP lingkup Sekretariat

Jenderal adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1, berikut.

No.	Eselon II	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1.	Biro Perencanaan	94,00	133,33	141,84
2.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	94,00	133,33	141,84
3.	Biro Hukum	94,00	133,33	141,84
4.	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri	94,00	100,00	106,38
5.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	94,00	100,00	106,38
6.	Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa	94,00	133,33	141,84
7.	Pusat Data, Statistik dan Informasi	94,00	133,33	141,84
8.	LPMUKP	94,00	133,33	141,84
Sekretariat Jenderal		94,00	125,00	132,98

Tabel 1 Capaian Sementara IKU MP Lingkup Setjen s.d. 1 Januari 2025 Pukul 12:00 WIB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



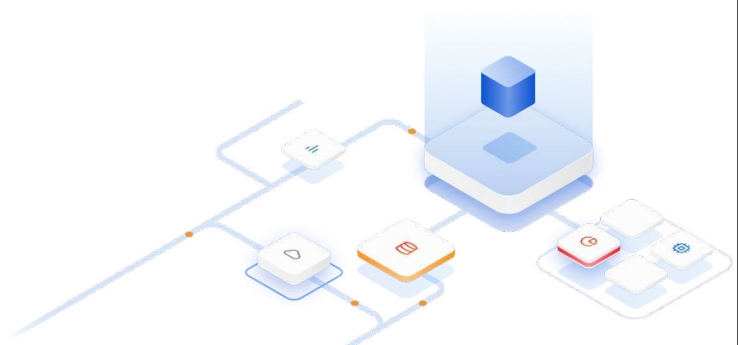
Ditandatangani
Secara Elektronik

Aulia Riza Farhan

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

CAPAIAN IKU MANAJEMEN PENGETAHUAN SETJEN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Sampai Dengan 1 Januari 2025 Pukul 12:00 WIB



CAPAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Capaian MP KKP per Triwulan Tahun 2024



Capaian MP KKP per Unit Kerja TW 4 - 2024



CAPAIAN SEKRETARIAT JENDERAL



Capaian MP KKP per Satuan Kerja SETJEN TW 4 - 2024

Pilih Unit Kerja SETJEN

BIRO PERENCANAAN	133.33%
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN OR...	133.33%
BIRO HUKUM	133.33%
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA ..	100.00%
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	100.00%
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG-JASA	133.33%
PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	133.33%
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN D..	133.33%

CAPAIAN SEKRETARIAT JENDERAL



NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	SATUAN KERJA	NILAI SAAT INI	STATUS
1	ANDY ARTHA DONNY OKTOPURA	KEPALA BIRO PERENCANAAN	BIRO PERENCANAAN	4	Memenuhi
2	RIZA TRIANZAH	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	4	Memenuhi
3	EFFIN MARTIANA	KEPALA BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	4	Memenuhi
4	ARI PRABOWO	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	3	Memenuhi
5	SETYAWATI	KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	3	Memenuhi
6	SOFIYANTO	KEPALA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	4	Memenuhi
7	AULIA RIZA FARHAN	KEPALA PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	4	Memenuhi
8	IR. I NENGAH PUTRA WINATA	DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	Memenuhi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 122/SJ.6/KU.520/I/2025

Yth. : Para Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
Dari : Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian realisasi anggaran lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana terlampir pada memorandum ini. Sebagai informasi, data realisasi anggaran dimaksud berdasarkan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan sampai dengan hari Jumat, 10 Januari 2025 pukul 16.30 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

REALISASI ANGGARAN LINGKUP SATUAN KERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2024

UNIT ESELON II	PAGU TOTAL	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI TERHADAP PAGU EFEKTIF			REALISASI TERHADAP PAGU TOTAL		
				REALISASI	SISA DANA	%	REALISASI	SISA DANA	%
Biro Perencanaan	279,952,553,000	13,087,980,000	266,864,573,000	252,862,971,730	14,001,601,270	94.75%	252,862,971,730	27,089,581,270	90.32%
Biro Keuangan dan BMN	17,059,764,000	4,421,933,000	12,637,831,000	12,581,275,160	56,555,840	99.55%	12,581,275,160	4,478,488,840	73.75%
Biro SDM Aparatur dan Organisasi	18,226,231,000	3,757,541,000	14,468,690,000	14,308,927,072	159,762,928	98.90%	14,308,927,072	3,917,303,928	78.51%
Biro Hukum	16,033,356,000	3,584,519,000	12,448,837,000	12,413,394,401	35,442,599	99.72%	12,413,394,401	3,619,961,599	77.42%
Biro Humas dan KLN	35,157,883,000	7,140,919,000	28,016,964,000	27,882,348,446	134,615,554	99.52%	27,882,348,446	7,275,534,554	79.31%
Biro Umum dan PBJ	332,849,012,000	6,039,819,000	326,809,193,000	325,922,532,400	886,660,600	99.73%	325,922,532,400	6,926,479,600	97.92%
Pusdatin	121,680,988,000	13,516,240,000	108,164,748,000	107,611,105,172	553,642,828	99.49%	107,611,105,172	14,069,882,828	88.44%
TOTAL	820,959,787,000	51,548,951,000	769,410,836,000	753,582,554,381	15,828,281,619	97.94%	753,582,554,381	67,377,232,619	91.79%

Catatan:

1. Pagu total merupakan keseluruhan pagu anggaran, termasuk blokir.
2. Pagu efektif merupakan pagu total dikurangi blokir.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto